

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Dari *Laissez Faire* Ke Ekonomi Campuran**
Bambang Pujiyono
- **Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India**
Arin Fithriana
- **Isu-isu Lingkungan Hidup Pasca Perang Dingin**
Ani Khoirunnisa
- **Strategi Singapura Menyaingi Hong Kong Untuk Mencapai Posisi Finansial Center di Asia Dalam Perspektif Ekonomi Politik**
Edhimurti Sunoko
- **Regionalisme di Korea Selatan : Antara Pembentukan Sejarah dan Proses Berdemokrasi**
Jeanie Annissa
- **Strategi Kebudayaan Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia**
Rusdiyanta



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab:
Dekan FISIP

Pemimpin Redaksi:
Rusdiyanta

Dewan Redaksi:
Bambang Pujiono
Arin Fithriana
Emil Radhiansyah
Doddy Wihardi
Yusran

Reviewer
Dato' Dr. Junaidi Abubakar
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Dr. Syahrial Syarbaini, MA
(Universitas Indonusa Esa Unggul)
Dr. Lili Romli
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Sekretariat
Samsinar, M.Kom

Alamat Redaksi:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur, Jln. Ciledug Raya, Petukangan Utara,
Jakarta Selatan 12260 , Telp: (021)5853753 Ext 252

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini mengalami keterlambatan, mengingat minimnya tulisan yang masuk. oleh karena itu, kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Bambang Pujiyono tentang *Dari Laissez Faire Ke Ekonomi Campuran*, Arin Fithriana tentang *Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India*, Ani Khoirunnisa tentang *Isu-isu Lingkungan Hidup Pasca Perang Dingin*, Edhimurti Sunoko tentang *Strategi Singapura Menyaingi Hong Kong Untuk Mencapai Posisi Finansial Center di Asia Dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Jeanie Annisa tentang *Regionalisme di Korea Selatan : Antara Pembentukan Sejarah dan Proses Berdemokrasi*, Rusdiyanta tentang *Strategi Kebudayaan Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca. Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Juni 2010

Salam kami,

Dewan Redaksi

Daftar Isi

<i>Bambang Pujiono</i>	Dari <i>Laissez Faire</i> Ke Ekonomi Campuran	1-16
<i>Arin Fithriana</i>	Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India	17-37
<i>Ani Khoirunnisa</i>	Isu-isu Lingkungan Hidup Pasca Perang Dingin	38-50
<i>Edhimurti Sunoko</i>	Strategi Singapura Menyaingi Hong Kong Untuk Mencapai Posisi Finansial Center di Asia Dalam Perspektif Ekonomi Politik	51-76
<i>Jeanie Annisa</i>	Regionalisme di Korea Selatan : Antara Pembentukan Sejarah dan Proses Berdemokrasi	77-89
<i>Rusdiyanta</i>	Strategi Kebudayaan Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia	90-102

Dari *Laissez Faire* Ke Ekonomi Campuran

Bambang Pujiyono, MM, M.Si¹

Abstraksi

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor perubahan sistem ekonomi Amerika dari yang semula memegang teguh prinsip laissez faire (tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi) menjadi ekonomi campuran (menggunakan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi).

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu, diantaranya meningkatnya jumlah kekayaan, inovasi teknologi, meningkatnya perdagangan dengan negara lain, dan pragmatisme serta fleksibilitas masyarakat Amerika.

Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem ekonomi campuran yang mengikutsertakan peranan pemerintah dalam perekonomian sangat membantu bangsa Amerika dalam menata dan mencapai kesejahteraan ekonomi.

Latar Belakang

Masyarakat Amerika memiliki ciri tersendiri dalam menata dan menjalankan sistem perekonomian. Jika menelusuri sejarah, setidaknya telah terdapat berbagai perubahan dalam tatanan sistem ekonominya. Kendati demikian, ciri spesifik masih terlihat menonjol. Sejak awal perkembangan koloni bahkan hingga saat ini secara prinsip masyarakat Amerika tetap menggunakan sistem ekonomi kapitalis, meskipun berbagai pergeseran sistem telah terjadi. Sehingga, meskipun terjadi perubahan tatanan, prinsip dan ciri mendasar kapitalisme tetap mewarnai perekonomian masyarakat Amerika.

Pada awal perkembangan hingga menjadi masyarakat yang mulai menapak maju dalam perekonomian, masyarakat Amerika masih memegang teguh selogan ekonomi *laissez faire*. Akan tetapi seiring dengan bergulirnya waktu dan berbagai perkembangan yang terjadi, selogan dan prinsip dasar yang pernah mendominasi sistem ekonomi Amerika ini perlahan mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai sedikit demi sedikit menggeser paradigma mereka dalam menjalankan motif dan prinsip ekonomi.

Peran dan intervensi pemerintah merupakan tindakan yang tidak diinginkan dalam selogan ekonomi *laissez faire*. Pemerintah tidak boleh turut campur dalam kegiatan perekonomian karena dapat mengurangi perolehan keuntungan semaksimal mungkin. Peran pemerintah juga

¹ Dosen FISIP Universitas Budi Luhur

dianggap dapat mendistorsi pasar sehingga tidak memberikan keuntungan maksimal.

Berbagai faktor telah mengakibatkan terjadinya perubahan. Masyarakat Amerika memilih menggunakan sistem ekonomi campuran untuk menata dan menjalankan perekonomian mereka. Pergeseran pandangan ekonomi dan memudarnya *laissez fair* turut mempengaruhi posisi pemerintah. Sistem ekonomi campuran yang kini dijalankan oleh Amerika membuat pemerintah menempati arti penting tersendiri, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan yang disesuaikan dengan ekonomi kapitalis liberal.

Permasalahan

Uraian singkat latar belakang di atas, membawa penulis untuk merumuskan sebuah permasalahan dalam menelaah tulisan yang bertema "Perubahan Ekonomi Amerika dari *Laissez Faire* ke Ekonomi Campuran" ini. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah "Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi Amerika dari *laissez faire* ke ekonomi campuran?"

Perubahan Ekonomi Amerika: Dari *Laissez Faire* Ke Ekonomi Campuran

Sejarah Singkat Perekonomian dan Peranan Pemerintah di Amerika

Awal mula perkembangan ekonomi Amerika berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Eropa yang mencari keuntungan ekonomi melalui penjelajahan samudera. Sekitar abad ke-16 mereka menemukan Dunia Baru yang adalah Amerika sekarang. Usaha penjelajahan orang-orang Eropa untuk mencari keuntungan ekonomi itu berlangsung hingga abad ke-17 dan 18.

Dunia Baru kian hari kian mengalami kemajuan perekonomian. Dari yang semula perekonomian kolonial kecil, menjadi ekonomi pertanian independen yang kecil, sebelum akhirnya menjadi ekonomi industri yang sangat kompleks. Selama evolusi ini, Amerika mengembangkan institusi yang lebih kompleks untuk mengikuti pertumbuhannya. Sementara itu, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian telah menjadi suatu motif yang konsisten dengan ruang lingkup keterlibatan yang secara umum kian mengalami peningkatan.²

Sebelum masa kolonisasi pertama, perekonomian dapat dikatakan masih belum berwujud karena belum ada penduduk yang tinggal menetap. Tatanan perekonomian mulai muncul secara perlahan ketika awal mula

² Redaksi, *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian (Washington D.C.: Lembaga Penerangan Amerika Serikat, 1981), hlm.24.

masa kolonisasi berlangsung. Motif utama dari pembangunan koloni-koloni di awal masa kolonisasi memang tidaklah sama. Ada koloni yang dibangun atas dasar kesalehan dan disiplin seperti Massachusetts, dan ada pula koloni yang dibangun atas dasar kongsi bisnis seperti Virginia. Dan tak jarang kesalehan dan keuntungan yang mendasari pembangunan koloni-koloni itu berjalan seiring.

Sumber kesejahteraan koloni awal di Benua Baru adalah dari hasil tangkapan ikan dan perdagangan pakaian dari bulu binatang. Di samping itu, memancing juga menjadi sumber kekayaan utama terutama di Massachusetts. Akan tetapi, di seluruh koloni, masyarakat pada dasarnya hidup di ladang yang kecil dan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara itu di koloni-koloni lain mulai dibangun perkebunan-perkebunan. Sedangkan kebutuhan barang-barang keperluan yang lebih mewah masih diimpor dari Eropa.

Perekonomian semakin mengalami perkembangan. Industri-industri pendukung mulai muncul seiring dengan pertumbuhan koloni. Mereka mulai membangun armada dan membuat galangan kapal untuk kebutuhan perdagangan. Mereka juga membangun tempat penempatan besi kecil.³ Revolusi Amerika dan kemerdekaan merupakan tonggak penting bagi perekonomian Amerika selanjutnya.

Usaha-usaha masyarakat Amerika menaklukkan wilayah *frontier* (perbatasan) menjadi catatan sangat penting dalam usaha ekspansi dalam rangka membangun dan mengembangkan ekonomi Amerika.⁴ Penemuan mesin pemisah biji kapas oleh Eli Whitney di tahun 1793 semakin membuka pemikiran masyarakat untuk mengembangkan usaha, dan menjadi momentum penting bagi munculnya gerakan ke Barat. Pemilik perkebunan di Selatan membeli lahan dari petani kecil yang terus menerus bergerak ke barat. Usaha-usaha itu semakin meningkatkan kekayaan masyarakat.⁵

Namun ekspansi ke Barat bukanlah permasalahan yang dihadapi dengan mudah. Banyak permasalahan yang harus dipecahkan terkait dengan gerakan ke Barat ini. Masyarakat Amerika harus menghadapi problem ekspansi dengan segala bentuk kerumitannya mengenai tanah, perdagangan bulu binatang, orang-orang Indian, dan pemerintah daerah setempat.⁶

Terjadinya revolusi industri juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Amerika. Revolusi industri bermula di Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dengan cepat pengaruh

³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴ Frederick Jackson Turner, *The Significance of the Frontier in American History*, (Wincosin: Silver Buckle Press, 1984), hlm.ix.

⁵ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.28.

⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

revolusi itu menyebar ke Amerika yang notabene merupakan imigran Eropa.⁷ Revolusi industri turut serta memicu peningkatan pertumbuhan industri di Amerika. Pertumbuhan industri memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang. Berbagai peluang ekonomi yang menjanjikan di Amerika membuat para imigran Eropa semakin banyak berdatangan. Keuntungan ekonomi dan kemakmuran hidup yang mereka peroleh di Amerika menimbulkan sikap dan rasa cinta terhadap Amerika.⁸ Dengan begitu, usaha untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sekaligus menjadi jalan untuk menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme para pendatang terhadap Amerika.

Pada tahun 1861-1865 di Amerika terjadi Perang Sipil. Perang Sipil yang berlangsung turut menentukan nasib bangsa dan sistem ekonominya. Pasca Perang Sipil terjadi percepatan pembangunan ekonomi, dan menjadi cikal bakal bagi perekonomian modern Amerika.

Tahun 1887 merupakan awal momentum penting bagi keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pada saat ini Kongres memberlakukan hukum yang mengatur jalan dan kereta api yang mendukung keberlangsungan perekonomian. Setelah itu muncul berbagai undang-undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan bisnis dan perekonomian. Walaupun sebelumnya di tahun 1890 (melalui pemberlakuan *Sherman Antitrust Act*, undang-undang yang dirancang untuk memulihkan persaingan perdagangan bebas dengan cara memutuskan monopoli) telah ada sedikit wujud campur tangan pemerintah, namun belum menjadi catatan penting dalam pertumbuhan intervensi pemerintah di Amerika.

Tahun 1906 Kongres mensahkan undang-undang untuk memastikan bahwa pangan dan obat-obatan telah diberi label dengan benar dan bahwa daging telah diperiksa sebelum di jual ke pasar. Kemudian pada tahun 1913 pemerintah mendirikan sistem perbankan federal untuk mengatur aliran uang negara dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa peranan pemerintah semakin memiliki arti penting dalam perekonomian Amerika.

Perang Dunia yang baru berakhir pada tahun 1945 ternyata tidak melemahkan perekonomian Amerika. Semula memang banyak orang yang merasa takut bahwa akhir Perang Dunia akan membawa Amerika ke masa-masa ekonomi sulit. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, permintaan

⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

⁸ Lawrence H. Fuchs, *Kaleidoskop Amerika, Ras, Etnik dan Budaya Warga*, terjemahan R. Soeroso (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 28.

konsumen mendorong pertumbuhan industri yang sangat luas Perang Dunia II ini. Pada masa ini Amerika merekonstruksi pengaturan sistem moneter internasional, dunia bisnis memasuki periode yang ditandai dengan konsolidasi, dan angkatan kerja Amerika juga berkembang dengan pesat. Kejadian ini semakin memperkuat perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian Amerika.

Dasawarsa 1960-an dan 1970-an adalah masa terjadinya perubahan besar. Munculnya bangsa-bangsa baru di dunia membuat Amerika menyadari bahwa kekuatan militer tidak lagi sebagai sarana untuk pertumbuhan dan pengembangan, dan Amerika mulai menggeser ke arah kekuatan ekonomi. Setelah masa ini, setiap pergantian rezim selalu ditandai dengan perkembangan-perkembangan dan kemajuan mutakhir bangsa Amerika hampir di segala aspek, terutama ekonomi. Keadaan itu terus berlanjut hingga abad ke-21 saat ini.⁹ Bahkan hingga kini, bangsa Amerika tetap menempati posisi teratas dan penggerak terdepan dalam perekonomian dunia.

Kemajuan perekonomian Amerika yang semakin mengglobal tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pranata suprastruktur yang ada. Ekonomi Amerika memang dilaksanakan oleh pihak swasta dari kalangan pengusaha-pengusaha dan pebisnis. Sungguh begitu, pemerintah juga memiliki andil besar dalam mendorong kesuksesan ekonomi Amerika melalui wilayah ataupun koridor kerjanya sebagai aparaturnegara. Oleh karenanya, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi Amerika menempati posisi penting tersendiri dalam mendorong kemajuan perekonomian Amerika.

Unsur-Unsur Dasar Perekonomian Amerika

Dalam menjalankan perekonomiannya, terdapat beberapa unsur dasar yang terdiri dari sumber daya alami, buruh atau tenaga kerja, dan pasar. Amerika kaya akan sumber daya mineral dan memiliki tanah pertanian yang subur, dan beriklim sedang. Amerika juga memiliki garis pantai yang panjang baik di sepanjang laut Atlantik ataupun Pasifik, dan juga sepanjang Teluk Meksiko. Sungai mengalir jauh dari dalam benua, dan terdapat lima danau besar sepanjang perbatasan Amerika dengan Kanada. Kondisi ini menyediakan akses tambahan bagi kegiatan pelayaran. Lalu lintas air yang luas ini membantu membentuk pertumbuhan perekonomian negara selama berpuluh-puluh tahun dan membantu mengikat lima puluh negara bagian Amerika menjadi suatu unit perekonomian tunggal. Unsur kedua adalah buruh atau tenaga kerja yang mengubah sumber daya alami menjadi barang-barang. Jumlah pekerja

⁹ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.35-45.

yang tersedia, dan yang lebih penting produktivitas mereka membantu menentukan kesehatan perekonomian. Sepanjang sejarahnya Amerika Serikat telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam angkatan kerja, dan oleh karena itu telah turut membantu mendorong stabilnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya alam dan tenaga kerja hanya sebahagian saja dari suatu sistem ekonomi. Kedua sumber daya ini harus diorganisasikan dan diarahkan seefisien mungkin. Dalam perekonomian Amerika, pemimpin-pemimpin usaha yang menangkap tanda-tanda atau isyarat dari pasar menjalankan fungsi ini.¹⁰ Oleh karenanya, pasar merupakan unsur utama yang terpenting dalam perekonomian Amerika.

Dengan unsur-unsur dasar perekonomian yang dimilikinya ini, Amerika membangun sistem perekonomiannya. Melalui sinergi yang efektif dan efisien, Amerika mampu menegakkan dasar dan mengembangkan perekonomiannya hingga menjadi maju seperti sekarang ini. Sungguhpun unsur-unsur ini menjadi bagian yang utama dalam perekonomian Amerika, namun tetaplah membutuhkan pengelolaan yang terstruktur dalam sebuah mekanisme sistem. Pemerintah merupakan unsur yang dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan unsur-unsur dasar ini. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah terasa kian dibutuhkan dalam sistem perekonomian Amerika.

Perubahan Ekonomi Amerika

Pada awal bedirinya Amerika Serikat, para pemimpin pemerintahan enggan membuat peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Semua itu dilatarbelakangi perekonomian Amerika yang menggunakan sistem kapitalis dengan menjunjung tinggi prinsip *laissez faire*. Semboyan *laissez faire* ini dipopulerkan oleh ekonom Inggris yang bernama Adam Smith pada abad ke-18.

Laissez faire merupakan frasa dalam bahasa Perancis yang berarti "biarkan sendiri". Dalam dunia ekonomi dan politik, doktrin ini mengandung makna bahwa sistem ekonomi akan baik bila tidak dicampuri oleh pemerintah.¹¹ Sehingga, pada waktu pertama kali masyarakat Amerika terbentuk, mereka takut akan adanya kekuasaan pemerintah secara berlebihan, dan oleh karenanya berusaha membatasi otoritas pemerintah terhadap individu - termasuk ruang lingkup aktivitas pemerintah di dalam perekonomian.¹²

Sikap ekonomi Amerika ini mulai mengalami perubahan pada akhir abad ke-19, ketika usaha kecil, pertanian dan gerakan buruh mulai

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8-10.

¹¹ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.175.

¹² *Ibid.*, hlm.12.

meminta pemerintah untuk menengahi atas nama mereka.¹³ Menjelang permulaan abad ke-20 terjadi suatu perubahan melalui substitusi dalam masyarakat Amerika.¹⁴ Seiring berjalannya abad ke-20, penggabungan industri Amerika ke dalam perusahaan-perusahaan yang kuat mempercepat campur tangannya pemerintah untuk melindungi bisnis kecil dan konsumen.¹⁵

Semua perubahan ini menuntut masyarakat Amerika untuk mengkaji kembali segala sesuatu, mulai dari mengatur tempat kerjanya, sampai pada peranan pemerintah. Selain itu, tantangan-tantangan jangka panjang yang berkesinambungan membuat masyarakat Amerika menyadari pentingnya campur tangan pemerintah sebagai pusat regulasi dan stabilisasi. Atas dasar itulah, sistem perekonomian Amerika akhirnya mulai perlahan mengalami pergeseran. Semboyan *laissez fair* mulai ditinggalkan. Seiring dengan itu, peran pemerintah pun mulai diturutsertakan dalam perekonomian. Dengan turut sertanya pemerintah dalam kegiatan ekonomi, Amerika Serikat kini menganut sistem ekonomi campuran.

Secara garis besar, perubahan dari *laissez faire* menuju ekonomi campuran disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor itu muncul dan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa Amerika beserta segenap kemajuan dan perubahan yang dilaluinya. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu adalah seperti yang diuraikan berikut ini.

a. Meningkatnya jumlah kekayaan

Struktur terpenting bagi perkembangan ekonomi Amerika berasal dari unit-unit usaha dalam bentuk perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu semula hanya merupakan perusahaan kecil atau pun perusahaan milik keluarga. Sungguh begitu, komponen ini berperan besar dalam mendorong peningkatan jumlah kekayaan masyarakat Amerika.

Pada awalnya, kekayaan masyarakat mulai mengalami peningkatan pada tahun 1860-an melalui aktivitas pertanian dan perkebunan warga. Pertanian dan perkebunan kala itu masih sederhana dan mengandalkan tenaga manusia yakni budak-budak yang diperkerjakan.¹⁶

Keberadaan dari perusahaan-perusahaan Amerika tidak terlepas dari berbagai kendala atau rintangan. Nilai-nilai kekeluargaan yang kental masih mempengaruhi interaksi antar unit usaha dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut terkadang sangat kontras dan

¹³ *Ibid.*, hlm 33.

¹⁴ Alfian Muthalib, *Pergerakan Intelektual dan Penulis AMerika Generasi Tandan Keenam*, (Jakarta: PT. Panji Grafika, 2006), hlm. 2.

¹⁵ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm 80.

¹⁶ Charles Joyner, *Down by the Riverside*, (Chicago: University of Illinois Press, 1984), hlm. 9.

menimbulkan konflik, sehingga mengganggu proses perekonomian yang sedang berjalan. Bisnis yang berhubungan dengan nilai-nilai hukum, politik, dan budaya sering kali menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Terlebih pada masa industrialisasi yang mengakibatkan tingginya tingkat urbanisasi, benturan budaya dalam masyarakat memberikan hambatan tersendiri dalam ekspansi usaha.¹⁷

Meningkatnya jumlah kekayaan masyarakat bermula semenjak terjadinya gerakan ke Selatan dan ke Barat. Inovasi-inovasi baru masyarakat dalam bidang perkebunan, pertanian dan industri sederhana menjadi pemicu bertambahnya jumlah kekayaan dan interaksi harta yang beredar.¹⁸ Keadaan ini secara otomatis memerlukan adanya sebuah otoritas lain di luar bisnis yang dapat membatu dan mengarahkan perekonomian masyarakat yang sedang berkembang.

Penduduk di Barat yang memiliki tingkat keamanan ekonomi lebih baik dari wilayah lain, sebelumnya dilukiskan sebagai kaum yang sangat independen dan menentang berbagai campur tangan dan kontrol pemerintah. Akan tetapi, sebenarnya tanpa disadari, mereka menerima banyak bantuan dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Untuk mendukung kelancaran usaha masyarakat, pemerintah membangun jalan-jalan nasional dan lalu lintas air. Selain itu pemerintah juga membantu penduduk baru untuk bermigrasi ke Barat dan kemudian membantu pergerakan produksi pertanian di daerah Barat menuju pasar.¹⁹

Meningkatnya jumlah kekayaan yang beredar di lingkungan masyarakat turut pula meningkatkan rumitnya berbagai persoalan. Persoalan-persoalan itu memerlukan suatu penyelesaian berupa regulasi agar perselisihan di antara masyarakat tidak terjadi. Otoritas semacam ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pebisnis-pebisnis. Oleh karena itu, masyarakat Amerika mulai menyadari pentingnya pemerintah yang memiliki otoritas tersendiri dalam membuat berbagai aturan perundangan ataupun regulasi untuk menghindari benturan bisnis dan peredaran jumlah kekayaan yang semakin besar dalam masyarakat.

b. Inovasi teknologi

Terjadinya lonjakan dari penemuan-penemuan baru di awal abad ke-19 dalam masyarakat Amerika menyebabkan perubahan sedemikian besar. Besarnya perubahan ini hingga memunculkan istilah "Revolusi Industri Kedua". Pada masa ini inovasi-inovasi signifikan bagi

¹⁷ Alan Trachtenberg, *The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age*, (Canada: Herper Collins Ltd., 1994), hlm. 7.

¹⁸ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm. 28.

¹⁹ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.28.

perekonomian mulai ditemukan. Minyak di temukan di daerah Pennsylvania, mesin tik dibuat, gerbong kereta api dengan mesin pendingin digunakan, ditemukannya telepon, fonograf, dan lampu listrik. Pada awal abad ke-20 mobil menggantikan kuda, dan orang terbang menggunakan pesawat.

Pembuatan barang-pabrik adalah suatu kegiatan ekonomi penting di Amerika.²⁰ Pabrik-pabrik semakin berkembang pesat setelah munculnya berbagai inovasi dan penemuan baru. Kedaan ini semakin membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi Amerika.

Berbagai macam penemuan baru masyarakat Amerika seolah menjadi babak baru dalam perkembangan perekonomian modern Amerika. Kesan penemuan mesin-mesin melalui inovasi teknologi dapat digambarkan sama dengan kesan pada saat penjelajahan ke wilayah Barat dan upaya penaklukan wilayah-wilayah perbatasan. Kesemuanya sangat berarti dan berpengaruh besar bagi perekonomian Amerika. Proses dan keberlangsungannya pun sama-sama penuh dengan kontradiksi.

Penemuan mesin-mesin baru menjadi penyebab utama terjadinya kelimpahan produk-produk baru dan perubahan karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Disaat inspirasi teknologi itu baru berada pada seperempat dari perjalanannya, telah mampu mengejutkan masyarakat dan seolah membangunkan mereka dari alam tidur dan kegelapan. Keadaan itu karena disertai dengan mekanisasi industri, transportasi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kendati begitu, tidak semua pihak yang senang dengan kondisi yang sedang berlangsung. Ada pihak-pihak yang menyetujui perubahan, namun banyak pula yang tidak megharapkan perubahan itu terjadi, terutama di kawasan perkampungan. Hal itu disebabkan karena perubahan yang terjadi semakin memperjelas batas-batas antara yang kaya dan yang miskin.²¹

Keadaan dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks ini kian menyadarkan masyarakat Amerika akan pentingnya fungsi dan peranan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat perkembangan dan inovasi-inovasi baru dalam masyarakat bisnis Amerika.

Inovasi teknologi dan aktivitas bisnis merupakan dua hal yang orientasinya mengejar keuntungan. Inovasi teknologi hanya akan memberikan keuntungan jika ditransaksikan dan diambil

²⁰ Stephen S. Birdsall, *Garis Besar Geografi Amerika*, (New York: Wiley and Sons Inc., 1992), hlm. 43.

²¹ Alan Trachtenberg, *The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age*, (Canada: Herper Collins Ltd., 1994), hlm 38-39.

kemanfaatannya melalui aktivitas bisnis. Dalam bisnis, kekayaan dalam segala bentuk jenisnya adalah prioritas utama. Persaingan antar pebisnis dalam usaha memperoleh kekayaan tidak akan berlangsung dengan baik tanpa kaidah-kaidah hukum yang mengatur interaksi diantaranya.²²

Disinilah peranan pemerintah mulai semakin dirasakan. Tanpa adanya peranan pemerintah, interaksi bisnis akan berjalan tanpa koridor yang jelas karena tujuan memperoleh keuntungan maksimal seringkali mengorbankan nilai-nilai lain yang mendasari sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemerintah, keseimbangan interaksi dapat diatur, sehingga celah dalam lingkungan masyarakat tidak begitu jelas.

c. Meningkatnya perdagangan dengan negara lain

Perjalanan sejarah menunjukkan pada abad ke-18, pola pembangunan ekonomi secara regional mulai jelas terlihat. Koloni New England bergantung pada pembangunan kapal dan pelayaran untuk mencari kekayaan perkebunan di Maryland. Koloni Virginia dan Carolina menanam tembakau, padi dan bahan celup. Koloni di New York, Pennsylvania, New Jersey, dan Delaware mengirimkan bahan panen dan bulu binatang.²³

Setelah terjadinya Revolusi Amerika dan kemerdekaan, muncul tatanan perekonomian baru di lingkungan Bangsa Baru tersebut. sebagai mana suatu kontrak ekonomi, Konstitusi menyatakan bahwa seluruh bangsa – yang terbentang dari Maine sampai Georgia, dari Samudra Atlantik sampai Lembah Mississippi – merupakan suatu pasar yang disatukan atau "pasar bersama". Tidak ada tarif ataupun pajak antar negara bagian. Konstitusi menjamin bahwa pemerintah federal dapat mengatur perdagangan dengan bangsa-bangsa asing dan antar negara bagian, membentuk hukum kepailitan yang seragam, membuat uang dan mengatur nilainya, menetapkan standar berat dan ukuran, membangun kantor pos dan jalan, dan menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak paten dan hak cipta, serta pentingnya kepemilikan intelektual.

Alexander Hamilton, salah satu pendiri bangsa dan menteri keuangan pertama, menyarankan suatu strategi pembangunan ekonomi di mana pemerintah federal akan mengasuh industri-industri baru dengan menyediakan subsidi yang jelas dan membebaskan tarif yang melindungi impor. Dia juga mendesak pemerintah federal untuk menciptakan suatu bank nasional dan menanggung hutang publik yang dibuat para penduduk baru selama Perang Revolusi. Meskipun pada awalnya usulan-usulan

²² Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, (Great Britain: Penguin Books, 2006), hlm. 188.

²³ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.26.

Hamilton itu tidak ditanggapi, namun akhirnya mereka membuat tarif menjadi suatu bagian yang penting dari kebijakan luar negeri Amerika.²⁴

Kompetisi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan standar hidup di Amerika Serikat.²⁵ Dengan begitu, bangsa Amerika senantiasa berkompetisi dengan semangat guna mendorong pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang inilah yang semakin membuka peluang untuk melakukan interaksi perdagangan dengan negara lain. Sebaliknya, interaksi perdagangan dengan negara lain juga semakin mengembangkan semangat kompetisi yang ada dalam diri bangsa Amerika untuk mencapai pertumbuhan ekonominya.

Usaha untuk meningkatkan perdagangan dengan negara lain semakin gigih digagas oleh Amerika semenjak interaksi perdagangan mulai memainkan peranan penting dalam hubungan internasional, terutama di awal abad ke-21. Di awal abad ke-21 penggabungan ekonomi global telah menyebabkan beberapa perubahan dan banyak keuntungan. Untuk itu pemerintah dituntut agar dapat membuat berbagai macam regulasi untuk menggairahkan perdagangan Amerika dengan negara-negara lain di dunia guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi Amerika.

Namun di sisi lain, perdagangan global yang dikembangkan Amerika menimbulkan persoalan baru. Akibat meningkatnya aktivitas perdagangan luar negeri, industri manufaktur tradisional mengalami kemunduran. Hal itu menyebabkan defisit besar dalam perdagangan Amerika dengan negara-negara lain.²⁶ Disinilah peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus bisa menciptakan berbagai aturan ataupun regulasi yang tetap mendorong perdagangan dengan negara lain, namun di lain pihak harus tetap melindungi eksistensi dari perdagangan dan manufaktur tradisional domestiknya.

d. Pragmatisme dan fleksibilitas masyarakat Amerika

Pragmatisme dan fleksibilitas masyarakat Amerika telah menghasilkan suatu ekonomi yang luar biasa dinamis.²⁷ Secara sederhana, pragmatis dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat mengutamakan segi kepraktisan (nilai-nilai praktis) dan kegunaan (asas kemanfaatan). Secara filosofis, pragmatisme dapat dipahami melalui beberapa definisi. *Pertama*, pragmatisme dapat dikatakan sebagai paham yang mempercayai bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. *Kedua*,

²⁴ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.27.

²⁵ Alan Greenspan, *Abad Prahara, Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, terjemahan Tome Beka (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 252.

²⁶ *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.4.

²⁷ *Ibid.*, hlm.5.

pragmatisme dapat dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan terus mengalami perubahan (dinamis). *Ketiga*, pragmatisme dapat dikatakan sebagai pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan dan pengalaman, untuk tujuan praktis.²⁸

Pragmatisme merupakan sebuah doktrin personal yang dapat membangun agresifitas diri, dan menekankan pada kemampuan diri untuk dapat berdiri sendiri dan mencukupi kebutuhan sendiri. Dalam pragmatisme, segala sesuatu dapat bersifat dinamis demi untuk tujuan praktis.²⁹ Suatu struktur dasar pragmatisme dan merupakan ciri khas prinsip pragmatis adalah gagasan bahwa pembuktian dari semua pandangan tentang realitas harus ditemukan dalam "alam pengalaman".³⁰

Masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan masalah filsafat dalam kehidupan mereka. Perjalanan hidup mereka lebih bersandar pada pengalaman sehari-hari sebagai antidot terhadap hal-hal yang dogmatis atau utopis. Dalam berbagai segmen kehidupan mereka memadukan berbagai pandangan hidup selama hal ini dapat diterapkan. Namun demikian, banyak pengamat yang meyakini bahwa pragmatisme merupakan falsafah hidup – *the way of life* – bangsa Amerika. Falsafah ini bahkan telah melekat dalam diri insan Amerika semenjak awal kehadiran mereka ke Dunia Baru.³¹ Dengan sikap dan prinsip pragmatis ini, Amerika menata, melaksanakan, dan mengembangkan perekonomian mereka. Pengalaman tentunya menjadi landasan yang utama untuk mencapai tujuan yang bernilai guna lebih baik.

Sebelumnya, masyarakat Amerika yang kapitalis tidak menginginkan adanya peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Ini didasarkan pada prinsip *laissez faire* yang ada dalam ekonomi kapitalis. Akan tetapi, prinsip itu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan dari segi kegunaan. Berdasarkan pengalaman, masyarakat Amerika menyadari bahwa peranan pemerintah memang dibutuhkan dalam mengatur perekonomian di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, demi tujuan praktis, masyarakat Amerika kini menggunakan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sikap pragmatis ini juga telah mendorong terjadinya perubahan besar. Bangsa yang sebelumnya agraris sekarang jauh lebih

²⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 450.

²⁹ Woodbridge Riley, *American Thought*, (Peter Smith: Gloucester Mass, 1959), 279.

³⁰ Albertine Minderop, *Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 56.

³¹ *Ibid.*, 53.

bersifat perkotaan. Pengolahan industri dan manufaktur yang tradisional kini berubah menjadi sangat modern. Sektor jasa yang tadinya belum mendapat perhatian kini telah memiliki arti penting tersendiri dalam perekonomian. Produksi massal kini telah terspesialisasi dan menggunakan kecanggihan inovasi teknologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip pragmatis dan fleksibilitas yang melandasi pemikiran bangsa Amerika turut serta menunjang perkembangan dan perubahan sistem perekonomian bangsa Amerika.

Peran Pemerintah dalam Perekonomian Pasca Perubahan

Dengan adanya perubahan dari *laissez faire* menjadi ekonomi campuran, berarti campur tangan pemerintah telah masuk dalam bidang ekonomi. Setelah menjalankan sistem campuran ini, ternyata eksistensi dan peranan pemerintah sangat penting dalam menunjang usaha peningkatan ekonomi.

Dalam perekonomian Amerika aktivitas pemerintah mempunyai pengaruh yang kuat setidaknya pada empat bidang. Pertama, di bidang stabilitas dan pertumbuhan. Dalam hal ini yang terpenting mungkin adalah peranan pemerintah pusat mengendalikan laju aktivitas ekonomi, mencoba mempertahankan laju pertumbuhan, meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga. Dengan menyesuaikan pengeluaran dan tarif pajak (kebijakan fiskal) atau mengelola pemasukan uang dan mengendalikan penggunaan kredit (kebijakan moneter), dapat diharapkan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat ataupun diperlambat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.

Peran kedua adalah dalam hal peraturan dan pengendalian. Pemerintah pusat Amerika mengatur perusahaan swasta dalam berbagai cara. Peraturan ini dibagi dalam dua kategori umum, yakni peraturan langsung dan tidak langsung yang bertujuan untuk mengendalikan harga. Biasanya, pemerintah mencegah monopoli seperti di sektor listrik dan kenaikan harga terlampaui tinggi melewati tingkat ketentuan yang layak. Kadangkala pemerintah memperluas kontrol ekonominya ke industri-industri lainnya.

Peran ketiga adalah pelayanan langsung. Setiap tingkat pemerintahan selalu menyediakan berbagai pelayanan langsung. Sebagai contoh, pemerintah federal bertanggung jawab atas pertahanan nasional, mendukung penelitian yang seringkali menghasilkan pengembangan produk baru, melakukan eksplorasi ruang angkasa, dan menjalankan berbagai program yang dirancang untuk membantu pekerja mengembangkan keahlian mereka dan mencari pekerjaan. Sementara itu pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas konstruksi dan perawatan sebagian besar jalan-jalan besar. Pemerintah negara bagian

daerah dan kota memainkan peranan penting dalam keuangan dan operasional sekolah umum.

Peran ke empat adalah bantuan langsung. Pemerintah juga menyediakan berbagai macam bantuan kepada badan usaha ataupun individu. Mereka menawarkan pinjaman berbunga rendah dan bantuan teknis kepada usaha kecil, dan mereka juga menyediakan pinjaman untuk membantu para siswa bersekolah. Perusahaan yang didukung pemerintah membeli hipotek tempat tinggal para peminjam atau penyewa dan mengubahnya menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan oleh investor untuk memotivasi pinjaman tempat tinggal. Pemerintah secara aktif juga mendukung ekspor dan berusaha mencegah negara-negara lain untuk mempertahankan kendala-kendala perdagangan yang membatasi impor. Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri seperti lanjut usia, cacat berat, jaminan medis bagi keluarga berpendapatan rendah, dan jaminan sosial lainnya.³²

Aktivitas pemerintah dalam bidang ekonomi di atas menunjukkan arti penting pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian Amerika Serikat. Sebagai regulator dan stabilisator, tindakan pemerintah amat membantu demi kesinambungan dan perkembangan ekonomi. Sehingga, keberhasilan ekonomi Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pemerintah.

Simpulan

Sistem ekonomi kapitalis sangat dikenal dengan semboyan *laissez faire*. Semboyan yang menjadi prinsip dasar ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama Adam Smith. Perekonomian kapitalistik yang dijalankan dengan prinsip *laissez faire* menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi.

Masyarakat Amerika adalah masyarakat yang menjalankan perekonomiannya dengan menggunakan sistem kapitalis. Semula bangsa Amerika memegang teguh prinsip *laissez faire* ini dalam sistem perekonomian mereka. Akan tetapi ditengah perjalanan menuju kesejahteraan ekonomi, masyarakat Amerika mengalami perubahan. Bangsa Amerika mulai merasakan arti pentingnya peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan.

Berbagai tuntutan perkembangan zaman dan interaksi perekonomian yang semakin kompleks memerlukan campur tangan pemerintah. Kelompok pebisnis tidak mampu untuk mengatur sendiri semua perangkat yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Banyaknya

³² *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, hlm.14-18.

persoalan yang timbul dari perkembangan ekonomi dan interaksi bisnis dan perdagangan, menuntut perlunya otoritas lain di luar bisnis untuk mengatur dan mengendalikan sistem agar tidak terjadi benturan. Dari sinilah masyarakat Amerika mulai menyadari akan pentingnya peranan pemerintah dalam turut serta mengatur perekonomian negara.

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian Amerika. Meningkatnya jumlah kekayaan yang beredar dalam lingkungan masyarakat; inovasi teknologi; meningkatnya perdagangan dengan negara lain; dan pragmatisme dan fleksibilitas bangsa Amerika. Kesemua faktor inilah yang menghadirkan pemerintah sebagai unsur penting yang dibutuhkan campur tangannya dalam mengatur sistem perekonomian.

Setelah intervensi pemerintah memiliki ruang tersendiri dalam sistem perekonomian Amerika, ternyata banyak hal yang dapat dilakukannya untuk melaksanakan berbagai perbaikan dan guna mencapai tujuan kesejahteraan bangsa Amerika. Oleh karena itu, adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi memberikan pengaruh dan nilai-nilai penting tersendiri dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi Amerika karena mampu menangani persoalan-persoalan yang muncul akibat perkembangan aktivitas perekonomian dalam masyarakat. Oleh karena itu, prestasi ekonomi Amerika di hadapan internasional serta kesejahteraan domestik yang dicapainya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Jadi, tidaklah salah jika bangsa Amerika mengorbankan semboyan *laissez fair* dan mengubahnya menjadi ekonomi campuran yang mengkombinasikan peran pasar dan pemerintah dalam satu ruang.

Daftar Pustaka

- Alan, Trachtenberg, *The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age*, Canada: Herper Collins Ltd., 1994.
- Birdsall, Stephen, S., *Garis Besar Geografi Amerika*, New York: Wiley and Sons Inc., 1992.
- Fuchs, Lawrence, H., *Kaleidoskop Amerika, Ras, Etnik dan Budaya Warga*, terjemahan R. Soeroso Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Greenspan, Alan, *Abad Prahara, Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, terjemahan Tome Beka Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Jackson, Frederick, Turner, *The Significance of the Frontier in American History*, Wincosin: Silver Buckle Press, 1984.
- Joyner, Charles, *Down by the Riverside*, Chicago: University of Illinois Press, 1984.
- Marbun, B.,N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Minderop, Albertine, *Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Muthalib, Alfian, *Pergerakan Intelektual dan Penulis Amerika Generasi Tandan Keenam*, Jakarta: PT. Panji Grafika, 2006.
- Redaksi, *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, ed. Gordon Manuaian, Washington D.C.: Lembaga Penerangan Amerika Serikat, 1981.
- Riley, Woodbridge, *American Thought*, Peter Smith: Gloucester Mass, 1959.
- Stiglitz, Joseph, *Making Globalization Work*, Great Britain: Penguin Books, 2006.
- Trachtenberg, Alan, *The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age*, Canada: Herper Collins Ltd., 1994.

Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India

Arin Fithriana, SIP, M.Si¹

Abstract

International cooperation is an accomplishment effort pocking a national interest for a country. International cooperation will be more endeavored if the benefits that will be gotten greater than the consequences it self. This research figure process making for and trips national strategic industry independence through Strategic Partnership Agreement between Indonesia and India. Strategic industry at Indonesian as Pindad, PT.PAL, PT.DI, have once produced "defenses system main tool". for need state, but regular is "defenses system main tool" even frequent present aught reputed was obsolescent. Severally case as fall its commercial plane in a general way and military plane on notably constitutes are several prove will that view. "defenses system main tool"'s finance also constitutes one classic problem that often arises deep its bearing with function from state's "defenses system main tool". Fund for fixing "defenses system main tool" that proprietary by Indonesian average more expensive than buying a new one. On the other side forms a state defense policy is a priority divide Indonesia. Since Indonesia is wallow in variety state of nature. Beside it, trade route universalizes a lot of through Indonesia theritory.

Therefore of that, needed a strategic industrial independence national one produce military stuffs based on need state. That independent wish one of it is endeavored by determining with state which Indonesia will make a relationship with. That independence deep have been implementing in defense and security cooperative form with India based on free active foreign policy in UU No.37 tahun 1999. India military facet with budget as big as US\$ 13,6 milliards strictly for 2000 / 2001, pointing out its ability to become one of military which most strength at Asian. Acquisition did by mechanism that adequately complexes and professional. Intensity meets from both army forces and military officer interchange be expected cans be effective technological averting for Indonesia's strategic industry independence.

Keywords: *Peace Strategies, Security, National Interest, and Strategic Partnership Agreement*

Latar Belakang

Indonesia dan India telah memiliki hubungan yang baik dalam ikatan sejarah yang panjang. Sebelum mencapai kemerdekaannya masing-masing, Indonesia dan India telah mendukung satu sama lain dalam upaya untuk mencapai kemandirian dan kemerdekaan hakiki. Setelah mencapai

¹ Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

kemerdekaan sebagai negara berdaulat, Indonesia dan India bekerjasama sebagai *co-sponsorship* Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan menjadi pilar pertama dalam gerakan Non-Blok di tahun 1961 yang memfokuskan diri pada perjuangan mencapai kemerdekaan, pengurangan kemiskinan, peningkatan ekonomi serta gerakan anti kolonialisme, imperialisme, dan neo-kolonialisme.²

Indonesia dan India juga memiliki berbagai macam kemiripan seperti luas geografis, ukuran dan keanekaragaman etnis, nilai sosial dan budaya, serta ikatan sejarah di antara kedua negara. Indonesia dan India telah dikenal sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, anti kolonialisme, dan memiliki keadaan masyarakat yang jamak. Sebagai dua negara demokrasi yang besar, Indonesia dan India sangat berperan aktif dalam mempromosikan kedamaian serta stabilitas di Asia. Terkait dengan kedekatan sejarah, kemiripan luas geografis, ukuran dan keanekaragaman etnis, nilai sosial dan budaya, dan kemiripan-kemiripan lainnya, adalah hal yang penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin dengan baik dan diintegrasikan dalam suatu kemitraan strategis yang bersahabat sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.³

Hubungan antara Indonesia dan India sudah begitu intensif. Kedua negara telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki kedekatan sejarah untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kedua negara juga memiliki kemiripan dalam kemajemukan bangsa sebagai kekuatan nilai sosial dan budaya sekaligus sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia. Beberapa persamaan karakter ini mendorong kedua negara untuk saling bekerjasama guna meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan sangat baik.

Pihak Indonesia, melalui Departemen Hukum dan Pertahanan melihat Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing demi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional, mengurangi *adventurisme* politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Hal ini menyebabkan meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan

² Departemen Luar Negeri, *Prospect of Indonesia-India relations (Mutual Exchange)*, Jakarta, h.88.

daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Termasuk Indonesia. Membangun kekuatan angkatan perang bagi negara sebesar Indonesia, pantas menjadi prioritas. Panjangnya perbatasan negara, baik di darat, laut, dan lebih-lebih kolom udara yang harus diamankan, adalah contoh dari betapa pentingnya kita memiliki kekuatan yang sepadan. Negara kita memang tidak berada pada satu posisi yang banyak ancaman, seperti halnya India atau China. Namun, maraknya *illegal logging* dan segala macam *illegal* lainnya yang lalu lalang di lintas perbatasan negara tentu tidak bisa terus dibiarkan. Kegiatan yang merugikan negara ini diam-diam juga telah berkembang, baik modus maupun peralatan yang menjadi kian canggih. Selain itu, kini hampir seluruh negaranegara kecil di sekeliling kita tanpa tanggung-tanggung sedang mengembangkan kekuatan perangnya. Tidak perlu diamati dari data intelijen karena pengembangan yang mereka lakukan dilaksanakan secara terang-terangan.

Melihat kondisi ini, Indonesia menganggap kerjasama strategis dengan India dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan di atas, khususnya pengembangan kualitas pertahanan dan keamanan nasional, serta memenuhi kebutuhan minimal dari prinsip pertahanan dan keamanan negara yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 mengenai kebijakan umum pertahanan negara. Dimana kebijakan pertahanan nasional disusun agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini disesuaikan dengan anggaran negara yang masih sangat terbatas. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti potensi dari Kemitraan Strategis antara kedua negara demi peningkatan industri strategis domestik terutama peningkatan kualitas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang sekaligus difungsikan sebagai pertanyaan penelitian, yaitu: "Apakah *Strategic Partnership Agreement* antara Indonesia-India efektif bagi kemandirian industri strategis Indonesia?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari *New Strategic Partnership Agreement* Indonesia-India bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia, dan untuk mengintegrasikan beberapa solusi bagi peningkatan kualitas pertahanan dan keamanan Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perspektif neo-realis demi terintegrasinya kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Neorealisme pada dasarnya mengemuka sebagai kritik terhadap realisme yang cenderung menganggap aktor negara sebagai satu-satunya aktor dominan dalam hubungan internasional.⁴ Sementara itu globalisasi yang sangat dicirikan dengan revolusi teknologi informasi, komunikasi diyakini akan mengubah secara signifikan peta hubungan internasional. Realisme dengan kata lain dianggap sudah tidak mampu lagi menyediakan "*usable map of the world*".⁵

Sebaliknya, globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasional menjadi "*post-international politics*" dimana aktor non-negara mulai mengemuka sebagai aktor dominan selain aktor negara dengan kapasitas dan kapabilitas interaksi yang telah melebihi aktor non-negara. Sebagai konsekuensinya, tata interaksi internasional semakin rumit dan kompleks dimana dunia menjadi semakin *multi centric*.⁶

Oleh karena itu, kajian ini kemudian tidak lagi didominasi oleh aspek iliter semata tetapi diwarnai juga oleh studi perdamaian yang memfokuskan pada isu-isu pembangunan (terutama di negarta-negara berkembang) seperti; kolonialisme baru, keterbelakangan ekonomi, kekerasan struktural, demokrasi, dan konflik sosial-budaya.⁷ Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tingkat keamanan domestik dan keamanan internasional dengan isu-isu pembangunan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Perubahan-perubahan mendasar yang melanda dunia sejak akhir dekade 80-an ini kemudian memunculkan suatu kombinasi baru antara kajian perdamaian dan keamanan/strategis yang dikenal sebagai *peace strategies*.⁸ Konsep ini menekankan pembahasannya pada upaya pencapaian keamanan dan perdamaian nasional, regional, serta internasional melalui pendekatan holistik yang menggabungkan penerapan teori perdamaian, konflik, pembangunan dan peradaban umat manusia. Atau dengan kata lain *peace strategies* memfokuskan pencapaian keamnan dan perdamaian tanpa harus berperang (*security and peace without war*). Dengan demikian, kajian keamanan, menurut neo-realisme,

⁴ John Gerard Ruggie, *The False Premise of Realism*. Dalam *International Security*, Vol.20, No.1,1995, h. 62-70.

⁵ Robin Brown dan Mike Bowker, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Cambridge, h. 3.

⁶ James Rosenau, *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*, Hertfordshire, h. 96-98.

⁷ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Aktor, Isu dan Ideologi*, Yogyakarta, h. 34.

⁸ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace, Conflict, Development and Civilization*, London, h. 35.

dapat dikatakan sebagai kajian yang *indispensable* dalam Hubungan Internasional.⁹

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep kerjasama. Bahwa kerjasama dibutuhkan untuk melakukan interaksi dengan negara lain. Frankel berpendapat interaksi yang berlangsung dalam rangka kerjasama tersebut tidak tampak pada konflik dengan begitu kerjasama tidak termasuk dalam sirkuit politik yang titik sasarannya adalah power dan konflik, terutama termasuk dalam bidang pemerintahan. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang akan diperoleh diperkirtakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya, oleh sebab itu keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan besar manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggungnya.¹⁰

Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan melihat hubungan sebab-akibat dari gejala-gejala yang diteliti dalam suatu latar yang bersifat alamiah.¹¹ Penelitian kualitatif terfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki generalisasi dan perbandingan, tetapi memiliki validitasi internal dan pemahaman yang konseptual.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

Kondisi Lingkungan Strategis Internasional.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “*good governance*” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme, dan lain-lain. Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Drs. R. Soeprapto, *HI, Sistem interaksi dan Perilaku* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 143.

¹¹ U. Maman Kh, dalam *Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Kualitatif*, diakses pada http://rudycr.tripod.com/sem1_023/maman_kh.htm

¹² Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hal 143.

dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.¹³

Setelah 20 tahun pasca perang dingin, politik eksklusif Amerika Serikat memang masih terjadi di berbagai kawasan, tetapi sudah mulai melemah secara berangsur-angsur. Dalam gambaran dunia yang kontradiktif, muncul kekuatan-kekuatan baru di luar Amerika. Untuk kawasan Eropa, Uni Eropa masih merupakan benih kekuatan baru kendati di tahun 2005 mereka gagal menyepakati konstitusi bersama. Di Asia Selatan, India muncul sebagai salah satu kekuatan yang sangat berpengaruh dan menjadi penentu stabilitas di kawasan. Sedangkan di kawasan Asia Timur, China dan Jepang memainkan peranan politik yang sangat penting. Pergeseran kekuatan ini disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi, lebih spesifik lagi adalah soal minyak. Di tahun yang akan datang, persoalan energi ini masih akan tetap menjadi motor dinamika politik dunia. Perebutan pengaruh atas sumber minyak dunia tercermin di lapangan geostrategi. Ketika Amerika berhasil mengontrol minyak Timur Tengah, China dan Rusia berhasil menguasai jalur eksplorasi minyak Asia Tengah dan Laut Utara. Medan pengaruh minyak masih akan meluas ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afrika dan lainlain.

Selain itu, Kemajuan teknologi pertahanan dan militer AS sangat signifikan terkait dengan berkembangnya sistem senjata dengan peluru kendali tepat sasaran (*precision guided amunition atau smart weapons*) telah merubah pola peperangan dari jarak dekat ke jarak jauh melalui serangan tepat dari jarak jauh. Konsekuensi teknologi tersebut paling tidak dapat menjadi potensi ancaman bagi setiap negara, khususnya Indonesia yang kebetulan memiliki kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya serta posisi dan letaknya yang strategis.

Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh. Peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari era globalisasi ini, akan tergantung pada kedekatan faktor-faktor internasional dengan faktor-faktor domestik (intermestik). Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tanpa ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

¹³ <http://strahan.dephan.go.id/ditanlingstra/lingstra.pdf>, *Perkembangan Lingkungan Stratsgs dan Prediksi Tahun 2008*, diakses pada 1 Juli 2009, pkl. 17.38 WIB

Sementara itu aspek eksternal ini juga menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil. Secara ekonomi dan politik, perang dan invasi militer adalah pilihan yang mahal baik dilihat dari politik domestik maupun dalam hubungan antar bangsa yang akan makin saling tergantung di mana kepentingan nasional hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Dalam situasi seperti itu negara dan bangsa akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam menentukan kebijakan nasional mereka yang mempersempit kemungkinan lahirnya kebijakan luar negeri dan pertahanan yang agresif.¹⁴

Kondisi Lingkungan Strategis Kawasan

Adanya peran dan dominasi AS di kawasan Asia Pasifik, utamanya di Asia Tenggara dalam dimensi politik, ekonomi dan militer, telah memberi makna betapa besarnya pengaruh AS dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan agenda globalnya. Kepentingan Jepang selaku mitra keamanan strategis AS di kawasan juga dilindungi melalui berbagai kebijakan ekonomi, politik dengan sasaran akhir eksistensi kerjasama keamanan kedua negara mengacu pada kesepakatan WTO dalam memperebutkan keunggulan ekonomi (*economy advantages*). Bangkitnya China sebagai kekuatan baru ekonomi global dan regional, diprediksikan akan mampu mengimbangi kemajuan dan dominasi ekonomi Jepang di kawasan dalam 5 tahun ke depan. Di kawasan Eropa, pengaruh UE juga semakin luas menyusul perluasan keanggotaan UE dan NATO.

Kecenderungan regionalisme dan integrasi ekonomi di kawasan, sesungguhnya erat kaitannya dengan mengemukanya globalisasi ekonomi dunia, menyusul terbentuknya gagasan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) termasuk *Free Trade Zone* yang akan diterapkan di Batam. Terhitung sejak tahun 2001 hingga kini misalnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan mencatat angka kenaikan yang cukup signifikan, dibandingkan sebelum pasca krisis ekonomi 1997-2000. Meskipun demikian kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil seiring semakin meningkatnya isu-isu kejahatan lintas negara seperti, merebaknya isu pencucian uang dan penyelundupan barang di beberapa negara di Asia Pasifik. ASEAN juga telah mengantisipasi perubahan tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina pada awal Januari 2007. Tiga poin penting kesepakatan tersebut yaitu mempercepat terwujudnya Masyarakat ASEAN (*ASEAN Economic Community, Security Community*) dan

¹⁴ <http://www.tandef.net/prediksi-ancaman-terhadap-perkembangan-lingkungan-strategis>, *Prediksi Ancaman Terhadap Perkembangan Lingkungan Strategis*, diakses pada 12 Juli, pk1.07.02 WIB.

menyepakati tahun 2015 diberlakukannya blok perdagangan bebas, dimana akan berlangsung liberalisasi arus barang, jasa, investasi dan modal di kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdagangan paling besar di dunia, yang didukung sekitar 10 % penduduk dunia.

Isu kejahatan lintas negara dan kerjasama keamanan regional. Permasalahan keamanan regional pada dasarnya bertumpu pada isu-isu klasik di kawasan yang secara fenomenal telah berhasil diatasi melalui model kerjasama ASEAN. Isu fundamentalisme agama dan radikalisme agama tertentu di beberapa negara ASEAN, dituduh pihak Barat terkait dengan kegiatan jaringan terorisme internasional dan merupakan isu keamanan sentral sampai lima tahun ke depan. Dalam konteks kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia telah menunjukkan upaya *cooperative security* di kawasan. Hal ini terlepas dari adanya keinginan Singapura dalam mendorong terbentuknya RMSI (*Regional Maritime and Security Initiative*) yang dimotori oleh USPACOM (*US Pasific Command*) guna mengatasi isu kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat Malaka dan sekitarnya.¹⁵

Keadaan Lingkungan Strategis Nasional

Proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses Pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Sesuai amanat Undang-undang, maka posisi Presiden menjadi sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan Parlemen. Di sisi lain, DPR yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, menjadi kekuatan penyeimbang yang perannya sangat penting selaku pengawas dan pengontrol setiap kebijakan Pemerintah. Isu separatisme. Tiga kasus besar gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI yakni, gerakan separatis bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka/GAM (yang telah sepakat untuk mengakui dan bergabung kembali dalam NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan kelompok separatis bersenjata (KSB/TPN) yang berinduk di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan (RMS) melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum Kedaulatan Maluku (FKM).

Terorisme dan gerakan kelompok radikal. Meski ruang gerak kelompok teroris ini sudah semakin sempit karena langkah-langkah yang diambil aparat keamanan, namun realitas bahwa mereka masih eksis

¹⁵ Sadono,SH,<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=18&mnorutisi=5>, *Pengembangan Geopolitik Indonesia*, diakses pada 12 Juli, pkl. 07.04 WIB

menunjukkan bahwa permasalahan terorisme bukan masalah sederhana. Permasalahan terorisme yang dilatarbelakangi belum tuntasnya penyelesaian masalah politik di Timur Tengah, menjadi semakin rumit karena telah berinteraksi dengan isu agama. Aksi kekerasan dan konflik komunal. Meski langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidental. Penanganannya diawali dengan pendekatan pembangunan kebangsaan, tanpa mengabaikan keberagaman budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan. Meskipun upaya peningkatan kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat disejumlah daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan lambat, tetapi perbaikan struktur dan proses politik menuju resolusi konflik secara bertahap dapat berjalan dengan baik. Isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan baik perbatasan darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi. Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya kondisi pulau-pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari NKRI bila tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik.¹⁶

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa masalah ancaman bagi kedaulatan Indonesia sering berasal dari perairan. Perairan pula, yang apabila dapat Indonesia mengelolanya serta dapat memberikan pengamanan yang baik, maka akan memberikan timbal balik positif bagi sektor-sektor formal seperti ekonomi, perdagangan, serta keamanan dan stabilitas kawasan. Negara Indonesia adalah negara besar yang memiliki beragam potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya kelautan, baik hayati maupun non hayati, yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), yang berada di permukaan laut, di bawah permukaan, maupun yang terpendam di dasarnya.

Semua potensi tersebut memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Kenyataan bahwa sepertiga luas wilayah Indonesia adalah laut dan 60% penduduknya hidup di daerah pesisir, bangsa ini memerlukan strategi pembangunan nasional yang berorientasi laut. Selama ini strategi itu tidak berjalan optimal, karena lemahnya koordinasi sektoral lembaga pemerintah. Kendala lainnya adalah belum bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia dalam memahami bentuk negara kepulauan dengan segenap potensinya. Tetapi, penekanan yang

¹⁶ Sadono.SH, *Perkembangan Geopolitik Indonesia 5-10 Ke Depan Guna Mempertahankan Keutuhan NKRI*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=18&mnurutisi=5>, diakses pada 13 Juli, pkl. 11.12 WIB.

sama akan muncul kembali, yaitu sekaya apapun suatu negara akan SDA nya, akan percuma apabila tidak dapat mengelola dan menjaganya dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal. Maka dari itu, Indonesia berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan membentuk kemitraan strategis dengan negara lain yang sesuai dengan arah kebijakan Indonesia dan anggaran dana yang masih sangat terbatas. Sehingga kemitraan strategis ini dapat memenuhi kebutuhan minimal bagi pertahanan dan keamanan Indonesia serta efektif dalam memberikan *transfer of knowledge* yang strategis bagi Indonesia.

Salah satu negara yang memenuhi standar tersebut adalah India. Pemerintah Indonesia menganggap India sebagai partner strategis bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. India telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa, sehingga menjadi calon kekuatan global di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi negara Hindustan ini mencapai 6,8 % pada tahun 2004, GDP meningkat hingga 8 %, peningkatan investasi asing langsung sama baiknya dengan peningkatan investasi lembaga asing, peningkatan nilai hasil perdagangan baik impor maupun ekspor melebihi 130 miliar dollar AS pada tahun 2004, cadangan valuta asing yang mencapai 131 miliar dollar AS, kemajuan teknologi seperti Teknologi Informasi yang dihasilkan dari produk software dan jasa servis mencapai 8 miliar dollar AS, dimana penghasilan tersebut sejalan dengan perkembangan di bidang industri, ilmu dan teknologi, serta sektor pendidikan.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang aktif dan mandiri

Kebijakan luar negeri Indonesia dibentuk dari beberapa faktor seperti sejarah nasional, kondisi geografis, demografi, keamanan dan kepentingan nasional. Faktor-faktor ini mempengaruhi Indonesia untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang mandiri, di mana Indonesia sendiri yang akan menentukan dan memutuskan posisinya sendiri dalam isu-isu dunia tanpa tekanan dan pengaruh dari pihak luar. Filosofi di balik prinsip ini termaktub dalam UU RI 1945. dalam pembukaan terdapat empat paragraf dan termasuk muatan-muatan mengenai anti terhadap kolonialisme di seluruh dunia, perjuangan untuk meraih kemerdekaan, deklarasi kemerdekaan dan pernyataan mengenai cita-cita bangsa dan prinsip-prinsip yang bersifat fundamental. Atas dasar inilah akhirnya Indonesia berinisiatif untuk mengadakan kerjasama strategis dengan beberapa negara guna menembus tantangan arus globalisasi, menjawab tantangan ekonomi global, membentuk kemandirian, dan dapat menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjawab pandangan skeptis bahwa negara-negara di luar major power akan sulit untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya dan membentuk sistem pertahanan yang agresif.

Gambaran Umum Strategic Partnership Agreement Indonesia-India 2005.

Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Republik India, Pratibha Devisingh Patil telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2008 di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Republik India, Pratibha Devisingh Patil tanggal 28 November-3 Desember 2008, yang merupakan kunjungan pertama kali ke Indonesia. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India, tanggal 21-24 November 2005 dan melakukan pembicaraan dengan Presiden India, Dr. A.P.J Abdul Kalam dan PM India, Dr. Manmohan Singh. Kunjungan Presiden India ke Indonesia dilakukan pada saat situasi dan kondisi dalam negeri India yang diwarnai serangan teroris peledakan bom di Mumbai, India. Namun demikian, Presiden India tidak bermaksud untuk membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Hal ini membuktikan keinginan yang kuat dari Pemerintah India untuk melakukan peningkatan kerjasama bilateral dengan Indonesia.¹⁷

Pertemuan ini dapat dicermati sebagai momentum baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan India telah menandatangani Kemitraan Strategis pada saat kunjungan Presiden RI ke India tahun 2005, yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi. Sejak saat itu perkembangan kerjasama bilateral meningkat dengan cepat. Sebagaimana ditegaskan Presiden India bahwa kunjungannya ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam kemitraan strategis yang akan menjadi faktor untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan India.

Dalam pertemuan Presiden RI dan Presiden India tersebut, telah disepakati usaha-usaha untuk meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara melalui peningkatan volume perdagangan hingga menjadi US\$ 10 milyar pada tahun 2010. Selama ini didasarkan data Departemen Perdagangan nilai perdagangan Indonesia-India terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2005 sebesar US\$ 3,93 milyar, tahun 2006 sebesar US\$ 4,79 milyar dan tahun 2007 menjadi US\$ 6,55 milyar. Perdagangan Indonesia dan India pada umumnya menunjukkan surplus bagi Indonesia. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi prospek perdagangan Indonesia ke India.¹⁸

Kedua pemimpin telah sepakat untuk mendorong peningkatan investasi dan kerjasama ekonomi. Hubungan dan kerjasama di bidang investasi Indonesia- India telah menunjukkan peningkatan yang significant, terutama minat investasi pengusaha India di Indonesia, seperti perusahaan India di bidang otomotif/ perusahaan motor TVS. Dalam kesempatan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman

¹⁷ <http://www.setneg.go.id.24>, diakses pada 3 Maret 2009, pukul 13.53 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

(*memorandum of understanding*) dalam bidang Pertanian, Kepemudaan dan Olah Raga serta keinginan kedua negara untuk mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan, farmasi, teknologi dan informasi, serta industri perfilman. Kedua pemimpin juga telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi terorisme. Dalam kesempatan konferensi pers bersama, Presiden RI mengungkapkan belasungkawa atas terjadinya serangan teroris di Mumbai, India, yang merenggut korban jiwa dan material yang tidak sedikit dan mengajak Presiden India serta seluruh dunia untuk bekerja sama memerangi terorisme serta peningkatan kerjasama internasional untuk memerangi terorisme. Presiden India juga berharap dapat melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk memerangi terorisme karena antara Indonesia dan India memiliki kemiripan dalam isu-isu keamanan yang dihadapi oleh kedua negara. Kesepakatan-kesepakatan tersebut merupakan peluang strategis dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-India terutama dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan militer yang dimiliki India yang dapat diterapkan di Indonesia. Kemiripan-kemiripan serta kedekatan sejarah yang dimiliki antara Indonesia dan India akan menjadi potensi dasar dalam peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral antara kedua negara. Pemerintah dan dunia usaha Indonesia perlu untuk mencermati dan menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang kerjasama yang saling menguntungkan

Kemandirian Industri Strategis

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa apabila suatu negara ingin damai, maka negara tersebut harus siap untuk berperang. Proses menuju kemandirian industri strategis tentunya merupakan imbas dari perkembangan lingkungan strategis global, kawasan, serta domestik. Dimana keadaan dunia saat ini penuh akan sikap anarkis. Negara-negara *super power* makin meningkatkan kemampuan militernya ataupun mengembangkan industri-industri pendukung seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Negara-negara kuat baru juga seakan tidak mau kalah dan terus mengembangkan kualitas industri militernya sehingga dapat menjadi pesaing dari negara-negara *super power* di atas seperti China, Iran, Korea Utara, Pakistan, dan tentunya India. Fakta ini tidak membuat negara-negara berkembang atau sedang berkembang diam. Lebih dari pada itu, mereka mulai ikut meningkatkan kualitas militernya yang dibungkus dalam kebijakan pertahanan dan keamanan guna menahan pengaruh negaranegara kuat demi terjaganya kedaulatan negara dan kepentingan nasional masing-masing. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh.

Peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari era globalisasi ini, akan tergantung pada kedekatan faktor-faktor internasional dengan faktor-faktor domestik. Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi

telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tanpa ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa, dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sejalan dengan tugas fungsi dan peran pertahanan negara yang tidak semata-mata hanya ditujukan kepada ancaman dari luar, tetapi juga berfungsi untuk mengatasi ancaman dalam negeri, seperti pemberontakan bersenjata, dan dalam menangani dampak bencana, kemampuan pertahanan yang kuat dan solid, tidak saja akan menempatkan NKRI semakin disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di dalam menangani bencana di dalam negeri, seperti bencana tsunami yang telah terjadi di Aceh. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro akan proses menuju kemandirian industri strategis.

Dalam rangka mendorong timbulnya inovasi teknologi, upaya transfer teknologi, peningkatan produktivitas dalam mendorong berkembangnya industri, paling tidak ada empat tingkat peranan pemerintah yaitu pada tingkat pertama, yaitu pada tingkatan makroekonomi berupa kebijakan yang mampu menciptakan suatu iklim yang mampu merangsang investasi dan pertumbuhan. Banyak studi menunjukkan bahwa tingkat bunga dan nilai tukar yang layak, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan barang-barang andalan untuk produksi dan ekspor sangatlah esensial guna memelihara peningkatan daya saing internasional. Selain dari pada itu, tentu diperlukan kebijakan investasi yang mendorong meningkatnya tabungan nasional. Semakin mampu suatu negara meningkatkan daya saing ini, semakin merangsang industri dan pengusaha melakukan upaya-upaya inovasi, dan semakin pula mendorong mereka lebih melakukan upaya transfer teknologi dengan makin meningkatnya barang modal yang masuk karena meningkatnya investasi.

Pada tingkat kedua, pemerintah perlu menciptakan iklim pengendalian dan insentif yang tepat, sehingga mampu merangsang perusahaan dan industri untuk memperbaiki kinerjanya. Pada tingkat ketiga, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan

berbagai macam infrastruktur. Meliputi infrastruktur fisik dan pelayanan seperti transportasi, telekomunikasi, energi dan sebagainya. Juga menyangkut infrastruktur pendidikan yakni sistem pendidikan formal dan informal guna mendidik dan melatih masyarakat industri dan iptek dalam berbagai aktivitas produktif. Pada tingkat keempat, pemerintah bisa berperan untuk mengarahkan, atau bahkan menargetkan bila dianggap perlu, jenis

teknologi, industri dan perusahaan-perusahaan yang spesifik guna meningkatkan daya saing internasional melalui upaya inovasi dan transfer teknologi. Hal mana bisa dicapai melalui beberapa instrumen kebijakan dan program yang bisa dipadukan secara langsung dengan kegiatan promosi industri atau dengan produk-produk spesifik dan strategis.¹⁹

India dan Kemandirian Industri Strategis Indonesia

Terkait dengan tantangan yang dimiliki oleh Indonesia atas perkembangan kondisi lingkungan strategis dalam beberapa dimensi, Indonesia mengadakan kerjasama strategis guna menjawab tantangan tersebut dengan beberapa negara, salah satunya dengan India. India dinilai memiliki potensi membantu Indonesia menuju kepada kemandirian industri strategis. Bagi Indonesia, India merupakan salah satu negara pengguna teknologi dibidang pertahanan, hal itu terbukti dengan sudah mampunya India menghasilkan sukhoi dan rudal rahmos. Dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh India, diharapkan pengadaan suku cadang sukhoi Indonesia tidak perlu mengandalkan lagi negara Rusia ataupun negara Eropa lainnya, sebab harga dari India relatif lebih murah.

India merupakan negara yang cukup maju dalam segala bidang termasuk dalam bidang pertahanan. Menurut Theo L. Sambuaga, sebagai Ketua Komisi I DPR, bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan India bertujuan juga untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS, dalam hal pengadaan alat-alat pertahanan. Dalam kerjasama pengadaan alat-alat pertahanan Indonesia harus tetap berpatokan pada beberapa hal, antara lain sistem yang ditawarkan, harga dan kualitas yang sesuai dengan lokal *content*, dalam artian semaksimal mungkin setiap peralatan yang dibeli tetap memasukan unsur buatan dalam negeri.²⁰ Dalam kerjasama pengadaan alat-alat pertahanan Indonesia harus tetap berpatokan pada beberapa hal, antara lain sistem yang ditawarkan, harga dan kualitas yang sesuai dengan lokal *content*, dalam artian semaksimal mungkin setiap peralatan yang dibeli tetap memasukan unsur buatan dalam negeri.

¹⁹ *Agenda Menciptakan Indonesai yang Damai dan Aman*, dalam <http://www.leapidea.com/myPres?id=15>, diakses pada 13 Juli 2009, pkl.12.40 WIB

²⁰ buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=20, diakses pada 13 Juli, pkl. 12.48 WIB.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan dalam bab I, terdapat titik cerah atau harapan bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan India ini akan berpengaruh positif bagi terciptanya kemandirian industri strategis nasional. Di satu sisi, sebenarnya industri strategis nasional yang sekarang ada bukanlah tanpa potensi. Pada tahun 2005, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menegaskan penyempurnaan prosedur pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan pemanfaatan keberadaan beberapa industri strategis di Indonesia yang memudahkan negara dalam memperoleh alutsista maupun suku cadangnya. Jauh sebelumnya, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) telah memikirkan bagaimana memenuhi sendiri kebutuhan peralatannya. Dengan susah payah, AD membangun PT Pindad. AL dengan berani menggelar PT Pal. AU dengan pionirnya seperti Nurtanio memelopori industri pesawat terbang. Meski sudah berubah wujud dan nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), industri itu masih berdiri di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Sejak PT Pindad, PT Pal, dan PT DI tidak lagi di bawah pengelolaan langsung AD, AL, dan AU, maka ketiga industri strategis itu telah dan pernah maju lebih pesat, kemudian mundur kembali pada titik yang berada dalam keadaan sulit berkembang. Yang lebih penting, keberadaan ketiga PT itu tak lagi atau amat kurang kontribusinya terhadap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Banyak kendala yang dihadapi. Ujungnya, tidak atau kurang tersedianya dukungan dana serta orientasi produksi yang tidak optimal.²¹

India dikenal sebagai negara yang memiliki teknologi yang tinggi dimana terapannya menyeluruh ke banyak bidang termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Teknologi yang tinggi tersebut diikuti pula oleh kemajuan ekonomi yang pesat. Dengan kekuatan 1 juta prajurit, dilengkapi peralatan moderen dengan industri pendukung, serta anggaran militer yang sangat besar, militer India merupakan salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Di Asia India hanya dapat ditandingi oleh RRC. Adanya gabungan kekuatan militer, ekonomi, sosial, politik, sumber daya, serta teknologi memberi kesempatan bagi India untuk berkembang menjadi salah satu adidaya Asia. Indiapun memiliki senjata nuklir, walaupun semula India tidak setuju dengan penggunaan senjata nuklir, seperti pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri PD-II. Nehru yang terinspirasi oleh gerakan anti kekerasan Mahatma Gandhi, menginginkan agar senjata nuklir dinyatakan terlarang.

Demikian pula banyak proses *upgrade* persenjataan dilakukan dengan bantuan Israel. Mirip seperti di Indonesia, tapi dalam taraf yang jauh lebih rendah, korupsi juga merupakan momok yang menghantui

²¹ Chappy Hakim, *Industri Strategis dan TNI*, www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=1428, diakses pada 13 Juli 2009, pkl. 12.51 WIB.

militer India dalam pengadaan persenjataan, di samping tentu saja kesalahan pengambilan keputusan. Namun berbeda dengan Indonesia, upaya melakukan pengamanan atas kebocoran telah dilakukan dengan meningkatkan audit sejak 1985. Contoh isu yang beredar, bahwa implementasi MiG-29K untuk Gorshkov adalah dipaksakan. SU-30 yang dikirim disebut hanyalah SU-27 yang diupgrade. Demikian pula versi T-90 yang akan diterima India, disebutkan sebagai model eksperimental yang pada prinsipnya hanyalah T-80 yang dilengkapi dengan mesin disel baru. Angkatan Laut akan diperkuat dengan MiG-29K yang satu paket dengan kapal induk Admiral Gorshkov. Banyak kritik tentang hal ini, karena Gorshkov sebenarnya tidak dibuat untuk mengangkut MiG-29K, bahkan lebih merupakan pengangkut helikopter, atau maksimal Yak.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan India ini tidak hanya terbatas dalam perdagangan produk saja, tetapi lebih daripada itu. Terdapat beberapa implementasi transfer teknologi di dalamnya. Misalnya dalam menjajaki kerjasama di bidang industri strategis, ada kemungkinan kedua negara akan memproduksi peralatan militer bagi TNI. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Duta Besar India menyatakan beberapa industri strategisnya siap bekerjasama dengan PT PAL, Pindad dan Dirgantara Indonesia (DI) untuk pengadaan alutsista bagi TNI AD, AL dan AU. Menurut Juwono Sudarsono, kerjasama itu kemungkinan dalam bentuk produksi bersama peralatan militer. Hanya saja tawaran ini masih akan dikaji Ditjen Perencanaan dan Pertahanan Dephan, terutama yang berkaitan dengan untung rugi dan manfaat kerjasama ini. Hubungan bilateral antara Republik India dan Republik Indonesia selama ini berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya kerjasama diberbagai bidang, salah satu diantaranya adalah saling kunjungan pejabat kedua negara. Pendidikan militer di India yang pernah diikuti oleh Perwira Siswa Indonesia antara lain, *National Defence College (Setingkat Lemhannas)*, *Defence Service Staff College (setingkat Sesko)* serta Kursus-kursus kecabangan seperti *Young Infantry Officers Course*, *Military Inteligence Course*, *Advance Gunney Officers Course*, *Marine Engineering Specialization Course*, *Long Gunney Course*, *Aero Engine Fitter* dan *Pilot Module Training*.²²

Simpulan

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga

²² Dephan, *Kerjasama Indonesia dan India Semakin Mantap*, www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file., diakses pada 14 Juli 2009, pkl. 10.48 WIB.

terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “*good governance*” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme, dan lain-lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, antara lain, kerja sama di bidang pertahanan merupakan suatu hal yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan pertahanan negara memerlukan kerja sama bilateral antar negara sahabat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik India di bidang pertahanan melalui persetujuan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 yang pengesahannya dilakukan dengan Undang- Undang.

Maka dari itu, nantinya diharapkan adanya suatu mekanisme yang baik dari industri strategis nasional. Karena pertahanan dan keamanan negara tergantung kepada kualitas personil angkatan bersenjata sekaligus dengan alutsistanya dan juga terkait masalah pendanaan. Diharapkan kerjasama perdagangan akan memberikan kontribusi bagi sektor pendanaan industri strategis nasional. Alih teknologi yang akan terjadi, ditambah informasi-informasi strategis dari perwakilan Indonesia yang belajar di India, serta intensitas kunjungan antara kedua angkatan bersenjata juga sangat berpengaruh terhadap kemandirian industri strategis. Jadi *New Strategic Partnership Agreement* antar Indonesia dan India adalah suatu kerjasama yang memiliki indikasi berkesinambungan yang kuat serta proses menuju kemandirian negara dan bangsa. Mandiri dalam arti dapat menentukan deangan negara mana Indonesia berhubungan dan mandiri dalam arti dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Salah satu negara yang dianggap oleh Indonesia dapat membantu meminimalisasi permasalahan tersebut adalah India. Jadi kemitraan strategis yang dirangkai sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, terutama *New strategic Partnership Agreement Indonesia-India* (2005) merupakan salah satu solusi bagi terciptanya kemandirian industri strategis Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Alatas, Ali, *A Voice for A Just Peace*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Alwasilah, Chaedar, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merrancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002.
- Anwar, Dewi Fortuna, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembnagan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- ASEAN Political Document*, Handbook of Selected Third Edition, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2006.
- ASEAN Regional Forum*, Document Series 1994-2006 Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007.
- ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008.
- Chongkittavorn, Kavi, *Thai-Burma Relations'*, in *International IDEA*, Macmillan Press Ltd, 2000.
- Dam, Sjamsumar, dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Griffiths, Martin dan Terry, O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, Rotledge, New York, 2002.
- Haacke, Jürgen, *Myanmar's Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications*, Abingdon: Routledge, 2006.
- Jackson, Robert, dan George, Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Katzenstein, Peter, J., 'Introduction: Asian regionalism in comparative perspective' in Peter J. Katzenstein and Takashi Shiraishi (ed), *Network Power. Japan and Asia*, New York, Cornell University Press, 1997
- Luhulima, C.P.F., *ASEAN Menuju Postur Baru*, Jakarta: CSIS, 1997.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Soesastro, Hadi, , ed., *ASEAN in a Changed Regional and International Political Economy*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Spence J. E., *Dictionary of International Relation*, London: Penguin Books, 1998.

Jurnal

- Acharya, Amitav, "Culture, Security, Multilateralism: The 'ASEAN Way' and Regional Order" *Contemporary Security Policy*, vol. 19, no. 1, April 1998.
- Almonte, Jose, T., "Ensuring Security the 'ASEAN Way'" *Survival Journal*, vol.39, no.4, Winter 1997.
- Amer, Ramses, "Conflict Management and Constructive Engagement in ASEAN's Expansion", *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 5, *New Regionalisms in the New Millenium Journal*, Oktober, 1999.
- Bandoro, Bantarto, "Myanmar dan Negara-Negara Ekstra Regional", *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.
- Beeson, Mark., "Sovereignty Under Siege: Globalization and the State in Southeast Asia". *Third World Quarterly*. Vol 42. No.2.
- Beeson, Mark. "Sovereignty Under Siege: Globalization and the State in Southeast Asia". *Third World Quarterly*, Vol 42. No.2, 2003.
- Beukel, Erik, "ASEAN and ARF in East Asia's Security Architecture: The Role of Norms and Power", *Danish Institute for International Studies*, Volume 4, 2008,.
- Bowers, Poul, "Burma and Military Regime" *International Affairs And Defence Section Journal*, Edisi Februari 2004.
- Bunyanunda, Mann, "Burma, ASEAN and Human Rights", *Stanford Journal of Asian Affairs*, Spring 2002, Volume 2.
- Busse, Nikolas, "Constructivism and Southeast Asian Security", *The Pacific Review*, Vol.12 No.1, 1999.
- Buszynski, Leszek, "Thailand and Myanmar: The perils of 'constructive engagement'" *The Pacific Review*, vol. 11, no.2, 1998.
- Collins, Cited, "The Security Dilemmas of Southeast Asia, *Singapore Information and Resource Center*, December 2003.
- Firnas, M. Adian, "Prospek Demokrasi di Myanmar", *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 2, Januari 2003.
- Goh, Gillian, "The 'ASEAN Way' Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Manajement" *Stanford Journal of East Asian Affairs* Volume 3, Nomor 1, Sping 2003.
- Kerr, Pauline, "The Security Dialogue in the Asia-Pacific" *The Pacific Review*, vol.7, no.4, 1994.
- Leifer, Michael, "ASEAN as a Model of a Security Community?" in Hadi Soesastro (ed.), *ASEAN in a Changed Regional Order and International Political Economy*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Luhulima, C.P.F., "Perimbangan Kekuatan di Myanmar, Faktor ASEAN dan Kepentingan Indonesia", dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.

- Muhibat, Shafiah, Fifi, "ASEAN dan Masalah Myanmar", *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.
- Noboyuki, Yasuda, "Law and Development in ASEAN Countries". *ASEAN Economic Bulletin*. Vol. 10. No. 2.
- Perwita, Anak Agung Banyu "Kapasitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar", *Analisis CSIS*. Vol.35. No. 2.
- Phan, Hao, Duy, "The ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights and Beyond", *Asia Pacific Bulletin*, Nomor 40 Edisi Juli 2009.
- Ramcharan, Robin, "ASEAN and Non-interference: A principle maintained" *Contemporary Southeast Asia Journal*, vol.22, no.1, 2000.
- Rüland, Jürgen, , "ASEAN and the Asian Crisis: Theoretical Implications and Practical Consequences for Southeast Asian Regionalism," *The Pacific Review*, Vol. 13 No. 3, 2000.
- Sérgio, Paulo, Pinheiro, The Myanmar s Road Map to the Consolidation of Military Authoritarianism, *Asia-Pacific Security Challenges* Edisi September 2008.
- Severino, Rodolfo, C., "Reflections On ASEAN: What We Did Right, Where We Went Wrong- Lessons For The Future" dalam Stephen Leong (ed.), *ASEAN Towards 2020's Strategic Goals And Future Directions*, Kuala Lumpur, ISIS Malaysia, 1998.
- Severino, Rodolfo C., "Reflections on ASEAN: What We Did Right, Where We Went Wrong- Lessons for the Future' in Stephen Leong (ed.), *ASEAN Towards 2020's Strategic Goals and Future Directions*, Kuala Lumpur, ISIS Malaysia, 1998.
- Shusterman, "Understanding the Self's Others," in Gupta and Chattopadhyaya, eds., *Cultural Otherness and Beyond*, Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 1998.
- Tjhin, Christine, Susanna, "Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN", *CSIS Working Paper Series*, edisi November 2005.
- Yursal Aidi, "Penyelesaian Myanmar Menuntut Peran Ganda" *Jurnal Forum Komunikasi Nusantara-Sumatra Utara*, Edisi Oktober 2007.

Surat Kabar

- Abra, Prita, "PBB Harapkan Peran RI dalam Proses Demokratisasi di Myanmar", *Antara*, Rabu, 13 Februari 2008.
- Awaludin, Mahid, "Nasib Demokrasi di Myanmar", *Kompas*, Rabu 19 Agustus 2009.
- Bandoro, Bantarto, "Mahatir's Myanmar Policy Not Just Empty Rhetoric", *The Jakarta Post*, 29 Juli 2003.

- Dahlan, Ahmad, "Jalan Panjang Menuju Demokratisasi di Myanmar", *Harian Seputar Indonesia*, Kamis, 8 Oktober 2009.
- Prasetyo Edi, "Myanmar: Tampan Keras Bagi ASEAN", *Kompas*, 24 Mei 2006.
- Sodikin, Amir dan Khairina, "Demokrasi di ASEAN Kembali Diuji", *Kompas*, 30 September 2006.
- Wanandi Jusuf, "ASEAN's Problem with Myanmar", *The Jakarta Post*, 31 Juli 2005.
- Yursal Aidi, "Penyelesaian Myanmar Menuntut Peran Ganda", *Antara*, Jum'at, 19 Oktober 2007.

Website

- Tan, Kenneth, *Hong Kong and Singapore*, <http://ccdf.ca/pdf/chapter10.pdf>
- Peter Wilson and Gavin Peebles, *Don't Frighten the Horses: The Political Economy of Singapore's Foreign Exchange Rate Regime Since 1981*. National University of Singapore. Department of Economics SCAPE Working paper Series. Paper No.2005/06. <http://nt2.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp-scape/0505.pdf>

Isu Isu Lingkungan Hidup Pasca Perang Dingin

Dra. Ani Khoirunnisa, M.Si¹

Abstract

There are many changes over after The Cold War era. Many factors and issues that affected situation, concentrace and policy all nations. It also happened in environment problems and climate changes, including the variety of domestic and international issues of complexity of effects which rised climate changes regulary. The realist, however, has been a view about this matters. What just as the realist has considered, at least we can learned to combine our different perspective toward 'Green World' and save the earth.

Keywords : Environment-issues, states, changes.

Pendahuluan

Ada beberapa isu baru yang berkembang dalam hubungan internasional antara lain adalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup menjadi perhatian global karena tumbuhnya kekhawatiran atas terbatasnya sumber daya alam untuk pembangunan dan kurangnya kemampuan institusi politik dalam mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Degradasi lingkungan hidup yang semakin tinggi semakin menyadarkan manusia akan adanya masalah ekologi yang serius.

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi masalah global. *Pertama*, sangat jelas bahwa manusia saat ini menghadapi rentangan masalah lingkungan yang bersifat global dan hanya dapat diatasi secara efektif dengan kerjasama seluruh Negara di dunia. *Kedua*, masalah lingkungan yang tadinya bersifat lokal dan regional, kini mengancam batas-batas Negara atau menimbulkan efek bagi Negara lain. *Ketiga*, aspek-aspek globalisasi yang berasal dari hubungan yang erat dan kompleks antara timbulnya masalah lingkungan dengan globalisasi ekonomi.

Dalam tulisan ini akan menggunakan teori politik untuk menerangkan masalah lingkungan hidup. Untuk itu, kita harus menguasai tiga hal yaitu : *pertama* mengetahui bagaimana latar belakang sosial, politik dan ekonomi kehidupan kita sekarang; *kedua*, memahami bagaimana kita

¹ Tenaga pengajar pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

berhak menentukan keadaan dunia; *ketiga*, menentukan *seberapa jauh, dengan tindakan apa dan dengan resiko apa kita membawa dunia ke arah yang kita inginkan?* Setidaknya untuk hal yang ketiga inilah yang akan menjadi permasalahan dalam tulisan ini.

Berbagai Pandangan Mengenai Lingkungan Hidup

Bicara mengenai teori, secara umum terdapat dua cara yang berbeda dalam memandang masalah lingkungan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para penganut Tradisionalis dan para Globalis.

Kelompok tradisionalis memandang negara sebagai aktor utama. Hubungan internasional memperluas ruang lingkup politik Negara, oleh karenanya fokus perhatiannya kelompok ini terletak pada kekuasaan dan kepentingan nasional. Negara bersaing dalam sistem internasional yang anarkis dan pada identifikasi serta penjabaran pola-pola konflik dan kerjasama antar negara. Jika masalah lingkungan dipahami dengan teori ini, maka timbul pertanyaan bagaimana masalah lingkungan mempengaruhi distribusi kekuatan dan menimbulkan pola baru mengenai koalisi dan konflik antar negara? Pada taraf apa masalah lingkungan dapat menjadi ancaman konflik antar negara? Dan mengapa institusi internasional dan mekanisme kerjasama antar negara mempermudah identifikasi dan penanganan masalah lingkungan hidup?

Para penganut aliran yang skeptis (realis dan banyak environmentalis) terus menyoroti berbagai kendala dalam kerjasama antar negara yang diajukan oleh para Globalis tersebut yaitu lemahnya hampir semua institusi internasional dan tidak adanya sanksi kekuatan. Menurutnyanya Negara hampir selalu lebih mementingkan kepentingan jangka pendeknya dan memproteksi otonomi politiknya, para politisi yang lambat dalam menangani masalah ini, serta banyaknya konflik lama antar negara yang sudah ada. Heterogenitas budaya, politik dan ekonomi sistem internasional, juga membantu mempengaruhi kondisi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar bagi lingkungan hidup dalam politik internasional.

Pemikir realis melihat kedaulatan sebagai suatu karakteristik objektif yang member Negara hak untuk terlibat dalam hubungan internasional. Apapun tantangan-tantangan yang harus dihadapi suatu Negara, tetap saja Negara satu-satunya entitas yang mempunyai cukup legitimasi, sumber daya, dan control atas wilayah kekuasaannya untuk menegakkan aturan-aturan lingkungan hidup². Lebih jauh lagi pemikir realis menganggap Negara merupakan pemain kunci dalam kemunculan berbagai institusi baru untuk lingkungan.

² Jill Steans & Llyod Pettiford. *Hubungan Internasional; Perspektif dan tema*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2009, hal. 399

Namun, baik atau buruk, isu-isu lingkungan hidup harus ditangani dalam batasan-batasan sistem politik global di mana negara-negara tetap memainkan peran utama. Hubungan internasional seringkali dipandang sebagai urusan utama teori politik, baik karena teori politik pada pokoknya memperhatikan ide-ide menciptakan kesejahteraan negara, atau karena kehidupan internasional dipandang tidak menginginkan perubahan. Teori politik Negara dianggap tidak lagi cukup, lagi pula teori politik internasional tidak melepaskan atau melupakan peranan Negara-negara tersebut.

Kelompok kedua adalah mereka yang memandang masalah-masalah lingkungan hidup global dari sudut pandang yang lebih luas. Mereka mengidentifikasi perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan pemikiran tradisional mengenai teori politik internasional. Pada intinya politik dunia perlu diperbaiki dan diperluas. Kemampuan Negara dalam mengatasi masalah lingkungan membuat orang berfikir kembali mengenai masalah kedaulatan dan batas Negara yang untuk saat ini makin sempit. Meningkatnya perhatian pada masalah-masalah lingkungan hidup dan saling ketergantungan mengenai masalah lingkungan telah menciptakan kesadaran dunia yang membawa kepada bentuk baru politik non-teritorial serta mekanisme dari tindakan politik dan organisasi politik.

Terdapat 5 (lima) argumentasi mengapa teori politik internasional perlu diperluas, disusun kembali atau ditransformasikan sebagai upaya untuk memahami dan mengatasi masalah lingkungan hidup global.

Pengikisan kedaulatan dari atas. Argumen ini menyatakan bahwa pembentukan struktur institusi dan aturan-aturan yang padat dan luas dalam perjanjian tentang lingkungan hidup menunjukkan suatu tantangan mendasar bagi kedaulatan dan bagi pemahaman kita mengenai dinamika politik dunia. Dalam pandangan liberal, ancaman lingkungan global dan keterlibatan institusi akan menghilangkan anarki dalam hubungan antar Negara dan membawa pada 'denasionalisasi' atau 'internasionalisasi' negara. Kekuasaan bergeser pada institusi di atas tingkatan Negara di mana hal itu didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama dalam dunia yang semakin saling bergantung ini. Akibatnya terlihat pergeseran mendasar dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara kedaulatan nominal Negara di satu pihak, dan otoritas masyarakat internasional di pihak lain. Negara dibatasi oleh prinsip, norma yang kuat sekalipun akan bergantung pada persetujuan-persetujuan kerjasama yang membatasi kekuasaan mereka.

Pandangan di atas masih terus dipertanyakan mengingat masalah kedaulatan masih menjadi masalah mendasar dalam politik lingkungan hidup global, dan penerimaan politis atas pengikisan kedaulatan ini masih kurang dari yang diharapkan. Begitu juga dengan terhapusnya anarki yang

tidak terjadi Karena berbagai hambatan dalam kerjasama internasional. Memang telah banyak perjanjian-perjanjian yang telah dibuat namun sanksi terhadap pelanggaran sangat lemah, disamping tidak adanya ketentuan yang mengikat Negara untuk mematuhi putusan dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun demikian, saat ini jelas terlihat adanya kenyataan bahwa Negara mulai menerima adanya kewajiban-kewajiban bersama dalam masalah-masalah lingkungan hidup global.

Menghapuskan batasan “domestik” dan “internasional”. Realisme mengenal pembatasan Negara secara tegas, namun terdapat juga pandangan yang menjelaskan hubungan internasional dari sudut kerjasama antar negara. Juga ada yang menjelaskan dari sudut masyarakat internasional, suatu bentuk masyarakat yang memiliki cakupan dan karakter yang berbeda dari cakupan dan karakter negara tradisional.

Pembatasan “domestik” dan “internasional” perlu dipertanyakan kembali karena adanya berbagai masalah yang melibatkan berbagai Negara. Misalnya masalah sumber daya alam yang melibatkan berbagai Negara, bahkan seringkali masalah tersebut menimbulkan konflik keamanan. Namun lingkungan hidup juga dapat membahayakan hanya sekedar keamanan intern suatu Negara, artinya lingkungan hidup belum tentu dapat menimbulkan konflik antar Negara. Pemahaman dan pembangunan yang baik atas lingkungan hidup sebagai satu kepentingan Negara mempengaruhi nilai-nilai politik luar negeri dalam masalah luar negeri tersebut. Walaupun demikian kesulitan kerjasama antar Negara di bidang lingkungan hidup bukan terletak pada negosiasi pembuatan persetujuan formalnya, namun terletak pada pelaksanaannya. Terlihat bahwa ada korelasi sulitnya pelaksanaan perjanjian dengan kelemahan yang terdapat dalam suatu Negara. Melihat kondisi saling ketergantungan di dunia, pandangan tradisional yang menegaskan pembatasan “domestik” dan “internasional” sekarang ini mengaburkan pandangan di berbagai belahan dunia. Teori politik internasional perlu memfokuskan diri pada interaksi antara domestik dan politik internasional yang lebih intensif lagi. Sejak awal 1970-an masalah lingkungan telah menjadi dimensi internasional dan dianggap sebagai manifestasi lain dari interdependensi (saling ketergantungan) dalam hubungan internasional dan merupakan penyebab perlunya Negara-negara terlibat dalam kerja sama untuk menyelesaikan masalah termasuk mengenai lingkungan³.

Lingkungan Hidup dan Ekonomi Global. Lingkungan hidup dan ekonomi adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya berhubungan erat dan terus menerus dengan manusia. Hubungan yang kontinyu ini sering diterjemahkan dengan istilah

³ *Ibid*, hal 405

“pembangunan yang berkelanjutan”. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki konsep multi-dimensi, yaitu pola pembangunan yang mengatur integritas dan kelangsungan kehidupan lingkungan, dan juga berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan politik. Bahkan dapat pula berkaitan langsung dengan masalah keamanan, bukan dalam perspektif persenjataan melainkan lebih kepada keamanan manusia (human security). Lebih jauh lagi dengan pola yang mengaitkan pembangunan biologi, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu tidak lagi mungkin memperlakukan ekologi dan politik ekonomi internasional sebagai bidang yang berdiri sendiri-sendiri.

Regulasi di bidang lingkungan hidup internasional selama ini mengatur isu-isu spesifik dalam bidangnya. Maka untuk memberikan arti bagi pembangunan yang berkelanjutan perlu diatur mengenai implikasi lingkungan hidup terhadap bidang-bidang lain, seperti hubungan lingkungan hidup dengan perdagangan, hutang luar negeri dengan lingkungan hidup dan belanja militer dengan lingkungan hidup.

Kekuatan ekonomi global memang dipengaruhi oleh non-state aktor, khususnya perusahaan multi-nasional yang semakin banyak, sedangkan hubungan Negara dengan ekologi internasional terbatas. Banyak kebijakan lingkungan yang tidak diputuskan oleh kemauan Negara, tetapi timbul oleh karena strategi-strategi produksi, teknologi dan perdagangan perusahaan-perusahaan multi-nasional. Banyak lagi masalah lingkungan hidup lokal yang sangat dipengaruhi oleh tekanan dan pembatasan akibat globalisasi ekonomi dunia. Akibat tekanan ekonomi terhadap lingkungan, timbul kritik-kritik terhadap pertumbuhan ekonomi. Para reformis mencetuskan gagasan revitalisasi pertumbuhan global yang merupakan bagian esensial untuk mencegah bencana lingkungan di masa depan. Kritik kedua menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam ekonomi global menyebabkan degradasi lingkungan hidup secara intensif, meruntuhkan efektifitas otoritas Negara, dan menghalangi efektifitas aturan-aturan lingkungan hidup.

Dilihat dari sudut ini, pilihan yang diberikan adalah melakukan kontrol atas ekonomi dunia dan mensentralisir koordinasi politik, mengurangi tekanan terhadap integrasi dan globalisasi, serta melakukan desentralisasi kekuatan ekonomi dan politik.

Munculnya masyarakat sipil internasional. Argumentasi dalam masalah ini membantah peranan utama Negara dalam politik internasional. Fokus utamanya adalah peningkatan peranan aktor-aktor internasional (selain Negara) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Karena LSM ini mengkhususkan diri pada satu masalah, mereka mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidangnya. Globalisasi ekonomi menyediakan teknologi komunikasi yang membuat LSM dapat saling berhubungan dengan

sesamanya melewati batas Negara. Bahkan lembaga ini lebih banyak beroperasi pada tataran operasional teknis (langsung terjun ke lapangan) dibanding hanya berdebat dalam tataran structural dan kebijakan. Secara mengagumkan mereka berhasil menyusun sumber daya financial, teknik, hukum dan ilmiah serta meningkatkan tekanan terhadap Negara, dunia usaha dan organisasi internasional serta mempublikasikan pentingnya masalah lingkungan hidup. LSM berhasil meningkatkan perhatian publik dan sikap politik terhadap lingkungan hidup dan menempatkan isu lingkungan hidup dalam agenda politik tingkat tinggi. LSM kini menciptakan bentuk baru organisasi politik yang non-teritorial. Namun demikian sampai saat ini belum terbukti secara empiris adanya pengaruh LSM dalam membentuk politik global yang baru.

Namun terdapat pula kelemahan untuk ini. Perhatian yang terlalu khusus pada lingkungan hidup membatasi LSM dari masalah-masalah lain di dunia. Mereka belum menjelaskan dengan rinci mengapa atau bagaimana konflik-konflik di sekitar isu lingkungan hidup diselesaikan. Bukannya tidak mungkin, seruan gerakan lingkungan hidup untuk mengadakan "demokratisasi global" akan menciptakan konflik antara Negara industri dan Negara berkembang di dunia. Desentralisasi yang diusulkan LSM dapat saja menyebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak seimbang diantara Negara kuat dan Negara lemah yang akan merugikan masyarakat di Negara lemah.

Sistem Negara sebagai hambatan dalam mengatur lingkungan hidup global. Isu lingkungan hidup global meruntuhkan anggapan yang mengandalkan pada prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Negara terlalu besar sekaligus terlalu kecil untuk mengatasi tekanan dari masalah-masalah lingkungan hidup. Terlalu besar bagi tugas untuk memikirkan strategi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dibangun dari bawah ke atas (bottom-up), dan terlalu kecil bagi manajemen yang efektif bagi masalah-masalah global yang menuntut kerjasama internasional.

Pandangan saling ketergantungan lingkungan hidup global terbentur pada kedaulatan/batas Negara. Masalah kurangnya sumber daya lingkungan menyebabkan masalah besar mengenai pemerataan hasil lingkungan hidup yang juga terbentur pada masalah batas Negara (kedaulatan). Akibatnya timbul dua pendapat mengenai pembatasan kedaulatan Negara dalam masalah lingkungan hidup. Di satu pihak, bangkitnya kekuatan moral masyarakat dunia yang menuntut Negara untuk melindungi hak individual dan kelompok Negara dan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih adil di dunia sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan antar Negara. Di pihak lain, keterbatasan sumber daya lingkungan satu Negara meningkatkan legitimasi

atas seruan untuk membatasi kedaulatan Negara sebagai bagian dari manajemen bersama ekosistem global. Terdapat dilemma antara mensentralisir kekuasaan melalui masyarakat internasional untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan dari “atas” atau dari “luar” dan pengakuan yang semakin berkembang bahwa pembangunan yang berkelanjutan juga harus dibangun dari “bawah” berdasarkan pengetahuan lokal, nilai-nilai lokal serta keterlibatan dan kemampuan komunitas lokal.

Tidak mungkin didapat definisi universal mengenai pembangunan yang berkelanjutan yang dapat diaplikasikan di seluruh bagian dunia. Politik lingkungan hidup dan prioritas dan kepentingan yang berbeda antara Negara yang satu dengan Negara lainnya, karena pembangunan yang berkelanjutan berkaitan erat dengan masalah berupa yang harus dikeluarkan oleh suatu Negara dan berupa yang akan didapat.

Pendapat para universalis yang menyatakan bahwa kedaulatan sudah ketinggalan zaman dan menjadi halangan masih lemah. Komunitas moral yang global masih merupakan retorika. Namun membatasi kedaulatan Negara secara tegas akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara Negara kaya dan Negara miskin. Negara kaya akan mendapat kesempatan untuk menekan Negara miskin dengan alasan lingkungan hidup, yang akhirnya membatasi pembangunan dan otoritas Negara miskin. Hal ini akan merusak kepentingan-kepentingan bersama seperti penghematan sumber daya alam, penanggulangan polusi, iklim dan masalah lapisan ozon.

Perubahan lingkungan global dan penanggulangan masalah lingkungan hidup mengancam akan sangat mempengaruhi organisasi-organisasi ekonomi dan politik dunia sehingga menarik orang untuk memikirkan skema baru bagaimana seharusnya dunia ini diatur. Bagaimanapun menariknya prinsip-prinsip abstrak yang dikemukakan, penggunaannya tetap hanya dapat diimplementasikan pada proses aktual sosial politik tertentu saja, dan hanya pada institusi internasional tertentu saja. Tidak ada teori yang universal dan abadi dalam hubungan internasional.

Perbedaan Kepentingan Terhadap Lingkungan Hidup

Belum terdapat kesepahaman mengenai lingkungan hidup atau pandangan global tentang lingkungan, namun hal tersebut seringkali bertabrakan dengan kepentingan sempit lokal yang juga merupakan unsur globalisasi (A. Giddens, 1999). Kepentingan sempit lokal (juga nasional) seolah dapat menjadi kultur baru dalam batasan suatu Negara bangsa (nation state) yang karena tuntutan globalisasi bukannya semakin menyempit, melainkan semakin meluas. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya perbedaan kepentingan antara Negara maju dan Negara

berkembang khususnya dalam hal lingkungan hidup⁴. Hal tersebut antara lain sebagai berikut ;

Pertama, negara-negara sepakat bahwa lingkungan hidup global terancam atau dalam keadaan bahaya, seperti bahaya pemanasan global (global warming), robeknya lapisan ozon, hancurnya hutan hujan tropis, ledakan jumlah penduduk, meningkatnya kemiskinan, polusi dan sebagainya.

Kedua, Ketegangan yang terjadi antara Negara maju dan Negara berkembang serta organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO). Negara-negara maju lebih banyak bermain dengan konsep pelestarian lingkungan global yang menurut mereka merupakan tanggung jawab negara-negara berkembang yang merupakan penyebab rusaknya lingkungan global. Sementara negara-negara maju sendiri memperluas imperium ekonomi dan bisnisnya dan meninggalkan dampak buruk bagi lingkungan.

Ketiga, Di satu pihak Negara-negara berkembang menginginkan kebebasan atau otonomi dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimilikinya. Justru Negara-negara maju harus lebih banyak memikul tanggung jawab keselamatan lingkungan global dan harus lebih komit terhadap janji mereka untuk membantu pembangunan di Negara-negara berkembang, karena mereka juga menikmati sumber daya alam dari Negara berkembang seperti udara bersih yang mereka hirup itu disebabkan oleh terpeliharanya hutan di Negara berkembang.

Keempat, Negara-negara maju dikritik sebagai mempunyai standar ganda dalam hal hukum internasional. Mereka slalu ngotot bahwa hukum itu bertujuan umum melindungi kualitas lingkungan global, tetapi dijadikan pula hal tersebut sebagai instrument akomodasi kepentingan bisnis mereka. Hukum tersebut juga bisa dijadikan sebagai sarana intervensi dan pendiktean Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang. Seperti pemberian dana gratis untuk proses peralihan teknologi CFC ke non-CFC (ketentuan Protokol montreal 1997), ketentuan itu bisa saja merupakan "ambisi bisnis global" mengenai gas rumah kaca. Juga dalam pemberian pinjaman, IMF tidak memperhitungkan dampak lingkungan sebagai akibat dari pemulihan ekonomi negara-negara berkembang. sambil merusak lingkungan⁵. Perlindungan lingkungan global adalah perlindungan lingkungan hidup di Negara-negara maju, sementara lingkungan hidup di Negara-negara berkembang dibiarkan hancur oleh kapitalisme Negara maju yang didukung oleh kapitalis lokal dan pemerintah Negara-negara berkembang, contohnya perusahaan multinasional.

⁴ Jurnal Ozon, vol 2 No. 1 September 2000.

⁵ Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 15

Dari beberapa hal diatas sepertinya mencari kesesuaian agaknya masih sangat sulit sepanjang kepentingan diantara kedua belah pihak belum dapat dipertemukan dan hanya mencari celah untuk pembenaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.

Kesalahan Sikap

Kiranya masalah lingkungan hidup bukan hanya sesuatu yang harus diperdebatkan bahkan saling menyalahkan (kalau tidak menyudutkan) guna mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas masalah tersebut. Negara yang tergolong apapun bahkan kita semua yang hidup membaur dan memanfaatkan lingkungan hidup disekeliling kita, bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Persoalan ini tidak lepas dari perilaku manusia terhadap lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dan semua sumber daya alam yang terdapat di dalamnya yang semestinya merupakan barang milik umum yang dapat dinikmati bersama, berubah menjadi sumber bencana, konflik dan kekerasan. Jika ditelusuri, maka diketahui bahwa penyebabnya adalah manusia itu sendiri.

Mekanisme politik, ekonomi, hukum internasional bahkan teknologi hanya sebagai perangkat "keras" yang tidak dapat sepenuhnya berhasil menyelesaikan semua persoalan lingkungan hidup. Tetapi perilaku manusia dan moralitas perilaku manusialah meskipun sebagai perangkat "lunak", dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan kontribusi bagi berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Artinya, manusia sendiri yang harus mulai mengubah perilaku jahat dan kejamnya terhadap lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam lainnya⁶.

Keharusan membangun kesadaran manusia (dimanapun mereka berada) akan pengalaman pahit mengenai bahaya dan malapetaka lingkungan hidup, agar segera meninggalkan sikap-sikap irasional dan menciptakan konsistensi sikap moral. Berbagai gerakan lingkungan hidup yang kini tengah marak mungkin merupakan pertanda kea rah itu dan tidak hanya merupakan slogan-slogan yang membawa bendera kepentingan tertentu. Pembangunan berwawasan lingkungan artinya betul-betul merupakan langkah dan sasaran yang akan dituju, bukan "melegitimasikan" kerusakan lingkungan yang menyertai proses pembangunan itu sendiri.

⁶ *Ibid.*

Pendekatan Tradisionalis Dan Globalis

Pendekatan tradisionalis dan globalis dalam memandang masalah lingkungan hidup, seperti yang telah dikemukakan oleh **Ziegler** dalam upaya mencari solusi dan menghadapi masalah sumber daya dan lingkungan hidup sebelum masalah tersebut semakin besar probabilitasnya dalam menghasilkan konflik, bahwa persoalan lingkungan hidup adalah bukan masalah Negara berkembang saja ataupun Negara maju saja, tetapi harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak bahwa masalah ini adalah masalah global. Oleh karena itu solusinya adalah menciptakan kerjasama yang bersifat global untuk memecahkan masalah sumber daya dan lingkungan hidup, karena sifatnya yang juga global. Namun berbagai hambatan bagi terciptanya kerjasama global, secara umum hambatan tersebut berupa keberadaan Negara sebagai suatu unit politik yang berdaulat dengan segala pemikiran dan kepentingannya.

Andrew Hurrel juga dalam tulisannya berusaha membahas pendekatan tradisionalis dan globalis teori politik internasional dalam memandang masalah lingkungan hidup. Kelompok tradisionalis memandang Negara sebagai aktor utama, di mana hubungan internasional memperluas ruang lingkup politik Negara karena fokus perhatiannya adalah pada kekuasaan dan kepentingan nasional negara yang bersaing dalam sistem internasional yang anarkis. Selain itu juga fokus pada identifikasi dan penjabaran pola-pola konflik dan kerjasama antar Negara.

Di sisi lain penganut aliran skeptis (realis dan environmentalis) terus menyoroti kendala dalam kerjasama antar negara, yaitu lemahnya hampir semua institusi internasional dan tidak adanya sanksi kekuatan. Bahwa karena keterbatasan kemampuan suatu Negara, negara lebih mementingkan kepentingan jangka pendeknya dan memproteksi otonomi politiknya, serta konflik lama antar Negara yang sudah ada dan heterogenitas budaya, politik dan ekonomi sistem internasional menyulitkan terciptanya persatuan diantara negara-negara berkembang misalnya⁷.

Pengelolaan lingkungan harus berdasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan hidup dan manusia yang ada di dalamnya adalah satu kesatuan yang seimbang. Artinya, pengelolaan lingkungan jangan sampai mementingkan manusia dan mengorbankan lingkungan atau sebaliknya. Dengan kata lain perlu adanya keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, menciptakan kesadaran akan pentingnya keutuhan manfaat dari lingkungan hidup dan menitikberatkan prioritas secara adil dan arif dalam penentuan kebijaksanaan mengenai lingkungan hidup.

⁷ Asrudin dan Mirza jaka Suryana, *Refleksi Teori Hubungan Internasional*, Yogyakarta, 2009, hal. 265

Apapun kondisinya, isu lingkungan hidup menjadi sedemikian global dikarenakan menjadi karakter global yang khusus saat ini. *Pertama*, jelas bahwa kemanusiaan saat ini dihadapkan pada masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi secara global dan dapat secara efektif dikelola dengan dasar kerjasama antara negara-negara. *Kedua*, bertambahnya skala masalah lingkungan hidup regional seperti memburuknya tata kota, deforestasi, pengurangan, penggundulan hutan atau kelangkaan air dan kayu. *Ketiga*, yang merupakan hal utama, globalisasi menambah kompleks hubungan antara masalah lingkungan hidup dan ekonomi secara global⁸.

Keamanan lingkungan pasca Perang Dingin ditandai dengan beberapa karakteristik yang antara lain :

1. Globalisasi memperlihatkan semakin terbukanya batas-batas Negara, meningkatnya arus perdagangan bebas dan investasi, serta kemajuan teknologi, telah memberikan kesempatan bagi munculnya aktor-aktor non-pemerintah yang memainkan peranan dalam masalah-masalah internasional, peningkatan kebebasan dan kesejahteraan penduduk dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga telah menjadikan masalah-masalah yang ada semakin rumit dan mendatangkan sejumlah bahaya baru.
2. Degradasi lingkungan dan persaingan untuk memperebutkan sumberdaya alam yang sekaligus dapat menciptakan ketidakstabilan baru dan membawa konsekuensi jangka panjang yang tidak diharapkan pada keamanan regional.
3. Konflik-konflik regional yang semakin meningkatkan ketidakstabilan kawasan-kawasan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kepentingan-kepentingan negara.

Tak heran jika keamanan dapat didefinisikan pula sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”, itu sama artinya membenarkan konsepsi yang mengatakan bahwa kekuatan militer selalu dianggap sebagai unsur yang paling penting. Seperti yang ditegaskan pula oleh *Arnold Wolfers* bahwa jawaban atas masalah keamanan adalah “membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) serangan tersebut”.

Hal ini dapat dipahami berimbang dan berbeda oleh mereka yang melihat keamanan dengan kajian yang baru, yang memperluas dimensi dan lingkup keamanan seperti **Caroline Thomas dan Jessica Mathews** yang berpandangan bahwa keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi militer tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi Negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan internal

⁸ *Ibid*

melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir⁹. Untuk yang disebutkan terakhir, lebih kepada tujuan bargaining dan pertahanan semata.

Apa yang dikatakan **Arnold Wolfer** ada benarnya mengingat adanya ancaman-ancaman baru yang kita hadapi dewasa ini seperti terorisme internasional dan proliferasi senjata pemusnah massal. Terorisme internasional merupakan satu ancaman strategis dan sifatnya berbeda dengan bentuk teror biasanya (tradisional). Kelompok teroris saat ini mempunyai agenda besar, yaitu menggunakan kekerasan tanpa batas dan menimbulkan korban manusia sebanyak mungkin. Untuk kepentingan ini, mereka berupaya memperoleh senjata pemusnah massal. Proliferasi senjata ini merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa di dunia. Perlombaaan dalam memperoleh senjata jenis ini disertai dengan penyebaran teknologi rudal, khususnya di Timur Tengah, yang jelas semakin membahayakan lingkungan¹⁰.

Kembali pada pemikiran realis, yang mengakui bagaimanapun juga peranan dari institusi-institusi internasional melalui kerjasama internasional merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal, begitupun dalam memandang masalah lingkungan hidup. Sekalipun perspektif ini tidak menyangkal pula bahwa bergabungnya negara-negara ke dalam institusi-institusi internasional dan terlibat ke dalam kesepakatan-kesepakatan kerjasama ketika hal tersebut cocok bagi negara-negara tersebut, sehingga kesepakatan ataupun kerjasama tersebut dengan mudah dapat dilanggar atau diingkari apabila kesepakatan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Karena pada hakekatnya, bagi perspektif realis bahwa kesepakatan dan keberadaan institusi-institusi internasional menjadi penting hanya pada tahapan institusi-institusi tersebut mengarahkan negara-negara untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka¹¹.

Penutup

Lingkungan hidup kini bukan hanya milik mereka para pencinta alam atau lingkungan saja melainkan milik kita semua, umat manusia dari belahan dunia dan level apapun. Karena bukan hanya penanganan masalah-masalah lingkungan hidup saja yang perlu menjadi perhatian dan penanganan di tingkatan kebijakan dan operasional strategis saja namun

⁹ Caroline Thomas, *The Environment in International Relations*, London: The Royal Institute Of International Affairs, hal. 173

¹⁰ Teuku May Rudi, *Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah global*, Refika Aditama, Bandung, hal. 73

¹¹ Jill Steans & Llyod Pettiford. *Hubungan Internasional; Perspektif dan tema*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2009, hal. 232

perlu juga ditangani dengan suatu pemahaman yang dibangun berdasarkan pertimbangan moral dan kesadaran memiliki (sense of belonging) terhadap bumi ini yang menjadi milik kita semua umat manusia. Dengan atau tanpa perdebatan, dengan sedikit kreativitas melihat akar masalah serta melepaskan kepentingan (kalau tidak boleh dikatakan keegoisan), duduk bersama mencari solusi tanpa harus dibebankan persentase kesalahan dan punishment diantara Negara-negara, teori apapun dan bagaimanapun penerapannya, hendaknya slalu dengan suatu pengharapan akan kelangsungan lingkungan hidup kita, sekaligus menjadi kunci dan amanat bagi kita semua, to make a safer world.

Daftar Pustaka

- Aron, R. (1996), *Peace and War : A Theory of International Relation*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Pramudianto, Andreas. (2008), *Diplomasi Lingkungan Teori Dan Praktek*, UI Press.
- Rhiti, Hyronimus.(2005) *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*.Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rudy, T.May. (2003), *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-masalah Global*, Refika Aditama, Bandung.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. (2009), *International Relations: Perspective and Themes*, England.
- Thomas, Caroline. (1992), *The Environment in International Relations*. London : The Royal Institute of Interantional Affairs.
- Jurnal OZON, Vol.2, No.1, September 2000.

Strategi Singapura Menyaingi Hong Kong Untuk Mencapai Posisi Finansial Center di Asia Dalam Perspektif Ekonomi Politik

Drs. Edhimurti Sunoko, MH¹

Abstract

The aim of this research is to give light and to explain about Singapore's strategy to counter Hong Kong's strategy in competing for being the centre of finance in Asia. This research based on the international political economy perspective. The time period of this research between 1997 until 2008, which track the rise of Singapore's economic recovery post the Asia financial crisis. This research uses qualitative method. Theory of International Political Economy, financial centre, competition, strategy, and game theory, are used to analyzed this research. This research has discovered that to get to the next pre-eminent financial centre position in Asia, Singapore implemented effective strategies. Reform of financial system, implementation of financial system reform, strategic approach and developed proactive, strategic thrust implementation, human resources development, and promotion are used by Singapore to get to the next pre-eminent financial centre in Asia.

Keywords: International political economy, financial centre, strategy, and competition.

Latar Belakang

Persaingan antar aktor baik *state* maupun *non-state* adalah hal yang lazim terjadi dalam hubungan internasional.² Untuk dapat tampil maksimal di arena persaingan dalam berinteraksi dengan dunia internasional itu, setiap negara memerlukan strategi untuk mencapai maksud dan tujuannya. Strategi yang tepat dan efektif akan memberikan pencapaian hasil sesuai dengan keinginan negara tersebut dalam melakukan hubungan internasional.

Hubungan internasional dari masa ke masa senantiasa mengalami dinamika. Dalam hubungan internasional dewasa ini, fenomena ekonomi politik semakin menjadi topik perbincangan. Munculnya globalisasi sebagai arus global yang tak dapat dielakkan oleh negara manapun, kian membuat ekonomi politik menjadi sebuah perspektif penting.³ Ekonomi politik memberikan pengaruh yang semakin luas terhadap sendi-sendi penyelenggaraan negara baik di tingkat domestik maupun internasional.

¹ Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

² Martin Jones, dkk., *An Introduction to Political Geography, Space, Place and Politics* (New York: Routledge, 2004) hal 2.

³ David Held, *A Globalizing World? Culture, Economics, Politics*, (New York: Routledge, 2004) hal. 206.

Pengaruh ekonomi politik tidak hanya di sektor ekonomi dan politik saja, namun meluas ke sektor-sektor lainnya. Selain berpengaruh, ekonomi politik juga menjadi pandangan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penulis menganalisa bahwa ekonomi politik dapat dikatakan sebagai salah satu perspektif penting dalam menjalankan hubungan internasional.

Perspektif ekonomi politik menempatkan globalisasi sebagai 'aktor' yang berperan membawa pergeseran yang menempatkan aspek-aspek ekonomi pada posisi penting dan berimplikasi terhadap politik dalam hubungan lintas negara. *Money* dan *finance* dianggap sebagai *the 'real' economy*. Perdagangan barang, jasa, dan sektor finansial menjadi wahana untuk mencapai dan mengukur tingkat kemajuan dan kestabilan ekonomi.⁴ Hal inilah yang menempatkan sektor finansial pada posisi penting dan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik baik di tingkat domestik, terlebih lagi di tingkat internasional. Pasar finansial dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses dan kebijakan politik suatu negara, demikian juga sebaliknya. Pasar finansial kian memiliki arti penting dalam kenyataan ekonomi sekarang ini.⁵ Oleh karena itu, pasar finansial sangat penting bagi negara karena memiliki nilai prestasi dan prestise. Sehingga, memperoleh posisi sebagai pusat dari pasar finansial (*financial centre*) merupakan keinginan bagi negara-negara yang telah berkonsentrasi terhadap pasar finansial.

Untuk kawasan Asia Pasifik, saat ini posisi *financial centre* utama dipegang oleh Tokyo. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada negara-negara di Asia Pasifik yang mampu menyaingi keunggulan *financial centre* Tokyo. Kendati demikian, beberapa negara dengan posisi ekonomi kuat seperti China yang diwakili oleh Hong Kong dan Singapura tetap berusaha untuk menjadi "*The Next Pre-eminent Financial Centre*".⁶ Kedua *city-economy* ini pun bersaing untuk dapat mencapai posisi "*The Next Pre-eminent Financial Centre*" setelah Tokyo tersebut.

Menentukan strategi untuk mencapai posisi finansial center tidaklah mudah. Singapura harus benar-benar memiliki berbagai pilihan langkah yang tepat agar dapat mengungguli Hong Kong. Dalam menentukan strateginya, Singapura hendaknya benar-benar memahami situasi dan kondisi yang berlangsung dalam dunia finansial internasional,

⁴ Eric A. Schutz, *Markets and Powers, the 21st Century Command Economy*, (New York, M.E. Sharpe, Inc., 2001) hal. 4

⁵ George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, (New York: Perseus Books Group, 2008) hal 51-52.

⁶Financial Services Working Group (FWSG), *Positioning Singapore as a Pre-eminent Financial Centre in Asia* (executive summary ini disampaikan di Singapore, September 2002).

dan yang penting adalah bahwa dalam merumuskan strategi, Singapura seyogyanya memahami benar situasi persaingan yang berlangsung antara Singapura dan Hong Kong, agar strategi yang diterapkan dalam upaya mengungguli Hong Kong dapat berjalan dengan efektif dan efisien.⁷

Persaingan antara kedua *city-economy* ini untuk mencapai posisi finansial center dapat dikatakan "tajam". Fenomena inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Penulis lebih tertarik untuk meneliti strategi-strategi yang diterapkan Singapura dalam menyaingi Hong Kong. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Singapura dengan ukuran wilayah geografis dan tingkat populasi penduduknya yang relatif kecil, mampu menyaingi Hong Kong sebagai daerah otonomi khusus China yang luas wilayahnya. Usaha-usaha Singapura itu tentunya dirangkum dalam sebuah strategi besar yang akan penulis telaah dari sudut pandang ekonomi politik. Penelitian ini merupakan sebuah studi ekonomi politik internasional mengenai persaingan (kompetisi) antara Singapura dan Hong Kong dalam memposisikan diri sebagai "*The Next Pre-eminent Financial Centre*" setelah Tokyo di kawasan Asia. Penelitian ini lebih ditekankan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Singapura dalam menyaingi Hong Kong (berusaha untuk lebih unggul dari Hong Kong). Oleh karena itu yang akan dieksplorasi adalah mengenai kebijakan dan strategi Singapura untuk menjadi lebih kompetitif sebagai *International Financial Centre* di Asia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang sekaligus berfungsi sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: *Bagaimana strategi Singapura menyaingi Hong Kong untuk mencapai posisi finansial center dalam perspektif ekonomi politik?*

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menggambarkan mengenai persaingan antara Singapura dan Hong Kong dalam mencapai posisi finansial center dalam perspektif ekonomi politik; (b) Menjelaskan mengenai kerangka kebijakan ekonomi politik Singapura; (c) Menjelaskan strategi Singapura untuk menjadi lebih unggul dari negara lain yang menjadi saingan utamanya yakni Hong Kong dalam perspektif ekonomi politik.

Kerangka Pemikiran

Ekonomi politik tidak selalu menempatkan negara pada posisi tertinggi dalam penentuan strategi maupun pengambilan kebijakan.

⁷ N. Ganesan, *Realism and Interdependence in Singapore's Foreign Policy*, (New York: Routledge, 2005) hal 7.

Kendati demikian, tujuan utamanya adalah tetap untuk mengedepankan kepentingan nasional suatu negara.⁸ Kelompok atau komunitas penting – seperti komunitas ekonomi dan keuangan misalnya – juga dapat memainkan peranan penting dalam ekonomi politik internasional.

Dalam perspektif ekonomi politik, terjadi sebuah transformasi besar pada power negara. Kekuatan pengambilan kebijakan tidak hanya tertumpu pada negara sebagai aktor rasional dalam melaksanakan hubungan internasional saja, namun juga pada aktor-aktor lain seperti individu dan kelompok yang memiliki pengaruh dan mekanisme kerja transnasional.⁴ Selain itu pergeseran paradigma terkini dalam hubungan internasional yang tidak lagi mengedepankan realisme melainkan neoliberalisme, membuat indikator ukuran power yang semula pada kekuatan militer dan pertahanan, menjadi kekuatan ekonomi. Power yang dimiliki dalam aspek ekonomi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap politik, dan aspek-aspek lainnya.

Perspektif ekonomi politik menempatkan globalisasi sebagai 'aktor' yang berperan membawa pergeseran yang menempatkan aspek-aspek ekonomi pada posisi penting dan berimplikasi terhadap politik dalam hubungan lintas negara. *Money* dan *finance* dianggap sebagai *the 'real' economy*. Perdagangan barang, jasa, dan sektor finansial menjadi wahana untuk mencapai dan mengukur tingkat kemajuan dan kestabilan ekonomi.⁵ Hal inilah yang menempatkan sektor finansial pada posisi penting dan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik baik di tingkat domestik, terlebih lagi di tingkat internasional.

Dalam konteks globalisasi, permasalahan finansial mengakibatkan konsekuensi yang signifikan terhadap keberlangsungan suatu negara.⁹ Oleh karena itu mencapai posisi sebagai finansial center adalah salah satu bentuk keuntungan sendiri bagi negara. Secara sederhana *financial centre* dapat diartikan sebagai suatu kota yang menjadi pusat aktivitas institusi finansial dan aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan finansial seperti transaksi produk-produk finansial (*futures contract, exchange rates, derivatives market* dan lain-lain) sesuai dengan yang didefinisikan dalam *the free dictionary* berikut, "*the part of the city where financial institution are centred*".¹⁰

⁸ Louise Amoore, *Globalization Contested, An International Political Economy of Work*, (Machaster: Manchester university Press, 2002) hal 251.

⁹ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton University Press, New Jersey, 2003), hal. 306-307.

¹⁰ <http://www.thefreedictionary.com/center> diakses tanggal 12 Mei 2009.

Pengertian senada juga dikemukakan dalam kamus ekonomi yaitu, “A place in which an above-average amount of financial business take place”.¹¹

Mengikuti *trend* ekonomi global, pasar finansial mengalami perubahan-perubahan yang konsisten menuju liberalisasi finansial. Sehingga kedua negara (Singapura dan Hongkong) berlomba untuk memberikan pelayanan finansial yang efektif dan efisien memenuhi kebutuhan aktor-aktor pasar. Keadaan ini mendorong munculnya kompetisi satu sama lain, meskipun Singapura dan Hong Kong pada mulanya melayani region yang berbeda, namun percepatan bisnis dan globalisasi keuangan tidak lagi memperhatikan batas-batas geografis dan otoritas *city-economy*, melainkan lebih tertuju pada daya kompetitif masing-masing *financial centres*.

Dalam mencapai posisi sebagai financial center, antara Singapura dan Hongkong saling berkompetisi. Pengertian kompetisi dalam hal ini merujuk pada pendapat Samuel Johnson, “...competition is act of endeavoring to gain what another endeavor to gain at the same time”.¹²

Dalam kompetisi negara memerlukan strategi agar dapat menjadi pemenang. John Lovel mendefinisikan strategi sebagai serangkaian langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.¹³ Interaksi antar kelompok yang bertujuan untuk kepentingan negara dalam bisnis internasional, menerapkan model strategi rasionalitas dengan asumsi bahwa perilaku para pembuat kebijakan yang berkenaan dengan bisnis internasional bersifat rasional. Pengertiannya adalah bahwa pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas.¹⁴ Perencanaan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan dan bukan tindakan untung-untungan.

Dalam bisnis persaingan terjadi dalam bentuk sebuah permainan (*games*), sehingga penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran *game theory*. *Game theory* merupakan sebuah metafora yang digunakan oleh ilmuwan hubungan internasional untuk menggambarkan hubungan antar aktor hubungan internasional yang bersifat kompetitif dan konfliktual.¹⁵

¹¹ <http://www.economist.com/research/economics/alphabetic.cfm?LETTER=H> diakses tanggal 12 Mei 2009.

¹² Jack High, “Competition”, diperoleh dari <http://mayet.som.yale.edu/coopetition/webHistory.html> diakses tanggal 12 Mei 2009.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mohtar Mas’oed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisis*, (Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989), hal. 90.

¹⁵ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES,1994), hal. 246-250.

Interaksi antar negara diibaratkan seolah seperti orang-orang yang sedang melakukan permainan catur, *poker*, *bridge* atau yang semacam itu, yang kemudian dikaitkan dengan proses penalaran dalam pembuatan keputusan.

Dari permainan dua kali dua (2x2) pada *game theory*, diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kategori pertama disebut "permainan trivial", kategori kedua, disebut "*zero sum game*", dan kategori ketiga disebut "*non zero sum game*".¹⁶ Dalam penelitian ini, permainan strategi yang diperankan oleh Singapura dan Hong Kong adalah jenis *non zero sum game*. Hal itu berdasarkan pada kenyataan yang menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi antara Singapura dan Hong Kong adalah persaingan yang berjalan dalam koridor positif. Meskipun dalam aspek finansial mereka bersaing secara inovatif, namun dalam aspek pembangunan negara dan pergaulan secara internasional lainnya mereka tetap menunjukkan adanya kerjasama.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *qualitative research*. Studi kualitatif ini konsisten dengan *qualitative paradigm*.¹⁷ Sedangkan teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan merujuk pada buku-buku, artikel, jurnal, dan berita-berita media yang relevan.

Perkembangan *Financial Centres* dalam Perspektif Ekonomi Politik

Financial Centres muncul mengikuti perkembangan globalisasi keuangan yang pada masa sekarang ini telah memiliki kehidupannya sendiri. Tidak lagi hanya bersifat komplementer dalam perdagangan dan investasi internasional. Globalisasi keuangan ditandai dengan perdagangan valuta asing harian pada center-center utama seperti New York, London dan Tokyo yang terjadi telah mencapai triliunan dollar. Pada tahun 1995 tercatat \$1,2 trilyun.¹⁸

Kuatnya pengaruh ekonomi politik dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari munculnya fenomena globalisasi. Menurut George C. Lodge Globalisasi adalah, "...is the process whereby the world's people are becoming increasingly interconnected in all facets of their lives – cultural, economic, political, technological, and environmental."¹⁹ Kemajuan

¹⁶ *Ibid.*, hal. 248.

¹⁷ John W. Craswell, *Research design Qualitative & Quantitative Approaches* (India : Sage Publications, 1994), hal. 4.

¹⁸ Kavaljit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan, Panduan untuk Memperkuat Rakyat, Terj.* Fredrick Ruma (Jakarta : Yakoma-PGI, 1998), hal. 7

¹⁹ George C. Lodge, *Managing Globalization in The Age of Interdependence* (Johannesburg : Pfeiffer Company), hal. 1

teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan hubungan antara sesama manusia, sehingga tidak lagi dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu antar wilayah yang berbeda. Batas-batas wilayah suatu negara mulai mengabur dalam saling hubungan tersebut. Dalam periode sekarang (era globalisasi) hampir tidak ada kendala-kendala artifisial dalam pertukaran ekonomis antar negara, akibatnya arus barang, modal dan penduduk lintas negara mengalami intensitas yang sangat tinggi.

Globalisasi keuangan yang terus bergulir diikuti dengan revolusi industri jasa finansial dan perluasan jaringan aktivitas finansial di seluruh dunia. *Financial service* (jasa-jasa finansial) dikenal sebagai *footloose industries*, yakni industri yang bebas bergerak kemana saja, karena tidak bergantung pada sumber daya alam. Pada dasarnya, industri ini tidak dibatasi oleh pemilihan lokasi. Meskipun demikian tidak menyebar di seluruh dunia, melainkan cenderung untuk berkonsentrasi secara asimetris dalam area-area tertentu. Perkembangan inilah yang menjelaskan bagaimana munculnya tempat-tempat sebagai "*International Financial Centres*"²⁰.

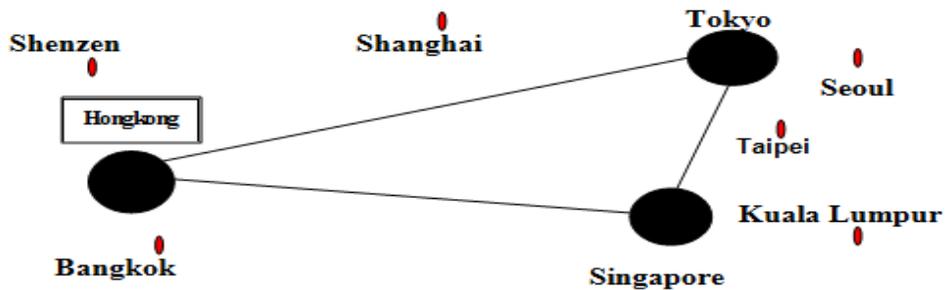
Tokyo, London dan New York adalah kota-kota finansial center utama di dunia, yang berada di Asia, Eropa dan Amerika. Di Asia bagian timur *landscape financial centres* mulai mengikuti pola yang terjadi di Eropa, yakni dicirikan dengan *centres* dan *peripheries*. Jepang mengambil tempat sebagai *centre* utama, (baca : pemimpin). Pasar uang, pasar modal dan pasar *foreign exchange* Jepang termasuk yang terbesar di seluruh dunia, menempatkan Tokyo sebagai tempat yang memiliki kesamaan langkah dengan New York dan London. Posisi berikutnya, ditempati oleh Hong Kong dan Singapura, sementara itu kota-kota seperti Kuala Lumpur, Seoul, Shanghai, Shenzhen dan Taipei dan lainnya sedang berjuang dalam mengembangkan *financial centres* masing-masing.²¹

Pola hirarkis *centres-peripheries* pada *landscape financial centres* Asia tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁰ Dr Beate Reszat, *Emerging Financial Centres* (Kuala Lumpur, 2002), hal 34.

²¹ Dr Beate Reszat, *Developing Financial Market in East Asia; Oportunities and Challenges in the 21st Century* (Kuala Lumpur, 2002), hal 37.

Gambar 2.1
*Rising Stars in East Asia's Financial Landscape*²²



Sumber : Dr Beate Reszat, *Developing Financial Market in East Asia; Opportunities and Challenges in the 21st Century* (paper ini disampaikan pada *The Conference on Assets Securitisation* yang diorganisir oleh Asia B Forum, Kuala Lumpur, 2002).

Pada gambar di atas terlihat bahwa untuk Asia, Jepang, Hong Kong dan Singapura menduduki posisi sebagai center. Jepang memiliki kapasitas yang paling utama dan lebih besar, dan Singapura serta Hong Kong terlihat seimbang. Sedangkan Shanghai, Shenzhen, Kualalumpur, Bangkok, Seoul dan Taipe menduduki sebagai *peripheries*. Kompetisi antara pasar-pasar finansial di dunia luas secara umum telah meningkat. Pasar-pasar yang lebih kecil berusaha untuk memenangkan pasar (*market share*) dengan melengkapi fungsi-fungsi pasar yang lebih besar, atau secara langsung menunjukkan persaingan. Misalnya dengan menawarkan fasilitas jasa finansial yang lebih baik.

Dari beberapa data dan fakta yang dikemukakan di atas, terlihat bahwasanya ekonomi politik merupakan perspektif yang tidak dapat dipisahkan dari adanya pasar finansial skala kerjanya semakin mengglobal dewasa ini. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pasar finansial pun tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek ekonomi politik. Untuk tingkat Asia financial center utama dipegang oleh Tokyo. Dua negara lainnya, yakni Singapura dan Hong Kong sedang berebut posisi menjadi the next financial center setelah Tokyo.

Finansial Center Hong Kong

Hong Kong merupakan salah satu dari empat macan Asia (*asian tigers*) selain Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Daerah teritorial Cina ini menggantungkan kemakmurannya pada ekspor barang-barang manufaktur, *enterpot* perdagangan dan posisi sebagai pusat transaksi

²² *ibid*

perbankan dan keuangan.²³ Sejak Juli 1997, *city-economy* yang telah lama menjadi koloni Inggris ini, kembali ke dalam kedaulatan Cina dengan status sebagai *Self Administrative Regions* (SARs).

Hong Kong termasuk dalam wilayah negara China yang menjalankan *One Country Two System*. Artinya, dalam kapasitas penyelenggaraan negara pada segi politik, Hong Kong tetap berpedoman pada sistem ideologi yang dianut oleh China sebagai negara induknya. Akan tetapi dalam segi ekonomi, Hong Kong menerapkan prinsip-prinsip liberal dan kapitalis. Inilah yang dimaksud dengan *One Country Two System* yang dianut Hong Kong - dimana Hong Kong merupakan wilayah administratif dari China.

Hong Kong memiliki banyak keunggulan sebagai suatu *financial centre* internasional. Posisi strategis menempatkan Hong Kong sebagai jembatan waktu antara Amerika Utara dan Eropa. Hong Kong merupakan pintu gerbang utama terhadap Cina. Tidak hanya itu Hong Kong memiliki keunggulan baik dari sisi internal maupun eksternal. Prof. YC Jao mengidentifikasi beberapa elemen penting yang menjadi daya saing Hong Kong sebagai *financial centre* utama abad 21 sebagai berikut;

*"Internal Factors; Political And Social Stability, Economic Freedom, Sound Legal System And The Rules Of Law, Good And Responsive Government, Unrivalled Record Of National Treatment, Favourable Tax Regime, Low Regulary Costs, Efficiency And Modern Infrastructure. Freedom Of Information, A Skilled Population And Use Of English. External Factors; Location And Time Zone Advantages, The China Factors, Robust Economic Growth In Asia Pacific Region, And Globalization Of Banking And Finance."*²⁴

Dari sisi internal, Hong Kong memiliki reputasi sebagai entitas ekonomi yang paling bebas di kawasan Asia. Otoritas pemerintahan di Hong Kong cukup responsif dan telah mengembangkan budaya *good governance* terutama dalam sektor finansial. Sistem regulasi dan pengawasan serta pajak di Hong Kong relatif minim disempurnakan dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur modern dan menunjang pada efisiensi. Kebebasan tidak hanya pada aliran modal tetapi juga pada aliran informasi dan tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk menunjang kapasitasnya sebagai *financial centre* internasional.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa kelemahan sisten finansial Hong Kong yang terdiri dari: (a) Ketergantungan pada sektor properti;

²³ *Hong Kong : Back to China*, http://www.tv.cbc.ca/newsinreview?sep97?hongkong?asia_pac.htm diakses tanggal 20 November 2009.

²⁴ Y. C. Jao, *Hong Kong As an International Financial Centre: Evolution, Prospect and Policies* (Hong Kong : City University of Hong Kong Press, 1997),

<http://www.info.gov.hk/hkma/eng/public/gb9805/gbsp04e.htm> diakses tanggal 20 November 2009.

(b) Pertumbuhan ketergantungan pada faktor Cina; (c) Sistem Pengaturan yang Ketinggalan; (d) Kemungkinan Intervensi Politik dari Barat.²⁵ Dari penjelasan-penjelasan di atas, tentunya dapat dianalisa bahwa tidak tertutup kemungkinan Hong Kong akan mengalami kemunduran di sektor finansial. Atau bahkan sebaliknya semakin mengalami peningkatan.

Finansial Center Singapura

Singapura telah menjadi salah satu *financial centre* regional yang sukses di kawasan Asia Pasifik. Dalam kurun waktu tiga dekade, *city-economy* ini telah mengalami perkembangan pesat menjadi *international financial centre* terkemuka di dunia. Pemerintah Singapura secara aktif menjalankan *up grading* sektor finansial sejak tahun 1960-an. Hasil dari kerja keras tersebut mengantarkan Singapura menjadi suatu *financial centre* terkemuka yang melayani ekonomi domestik dan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Sebagai suatu *financial centre*, Singapura berperan sebagai fasilitator intermediasi finansial yang berkontribusi pada perkembangan pasar modal dan investasi bisnis dan perdagangan lintas batas.

Upaya untuk menjadi *international financial centre* yang terkemuka terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam masa krisis finansial Asia 1997, pemerintah Singapura melakukan reformasi sektor finansialnya dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit. Bank-bank lokal dikapitalisasi dengan baik dan telah didorong untuk memperluas operasi-operasinya secara regional dan global serta mampu memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah krisis. Singapura merupakan ekonomi Asia yang paling sedikit dipengaruhi oleh krisis. Dibanding Hong Kong, Singapura lebih stabil dalam masa-masa sulit tersebut. Namun demikian, Singapura sebagai ekonomi terbuka tetap mudah diserang oleh guncangan eksternal dan *contaign effect* krisis finansial Asia.

Pada tahun 1960-an Singapura memilih suatu rute yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara tetangganya di kawasan Asia tenggara yaitu dengan mengadopsi strategi perkembangan finansial yang *outward looking*.²⁶ Tujuan utamanya adalah untuk menjadi suatu *financial centre* regional. Lebih dari tiga puluh tahun pemerintah Singapura mengimplementasikan reformasi sektor finansial, membuka pasar-pasar finansial baru dan menjalankan insentif fiskal dan pengaturan untuk menarik institusi-institusi finansial asing ke Singapura.

²⁵ *Battle to Sustain Economic Eminence*, <http://special.scmp.com/hkfuture/index.asp7.html> diakses tanggal 20 November 2009.

²⁶ Dennis Hew, *Singapore as a Regional Financial Centre*. (Singapore : Institute for Southeast Asian Studies, Maret 2002), Hal : 2

Blueprint ekonomi yang diimplementasikan pada awal 1960-an tersebut telah mendorong MNCs yang berasal dari Inggris, Amerika Serikat dan Jepang untuk menanamkan *Foreign Direct Investment*-nya di Singapura.²⁷ Hal ini menjadi daya dorong yang kuat bagi permulaan perkembangan sektor finansial, sehingga mulai tahun 1980-an banyak dari institusi finansial asing yang menjalankan operasinya di Singapura. Strategi tersebut telah terbukti berhasil. Sejumlah institusi finansial asing termasuk institusi finansial *offshore banking* dan non perbankan meningkat secara signifikan selama periode ini. Peningkatan jumlah institusi finansial asing tersebut memicu institusi finansial lokal khususnya bank-bank lokal untuk meng-*upgrade* jasa-jasa dan produk finansial mereka begitu juga keahlian manajemennya. Perkembangan ini adalah awal dari munculnya ADM (*Asean Dollar Market*) dan *Asian Bond Market* di Singapura yang kemudian menjadi pusat aktivitas *financial centre city-state* ini.²⁸ Dari penjelasan tentang finansial center Singapura di atas, penulis dapat menganalisa bahwasanya bisa saja suatu saat Singapura menjadi finansial center. Posisi itu tentunya diperoleh dengan berbagai langkah dan strategi yang tepat.

Kompetisi Singapura–Hong Kong dalam Finansial Center

Sebenarnya, persaingan Singapura dan Hong Kong telah berlangsung sejak lama. Arena kompetisi yang tajam adalah pada sektor finansial. ²⁹ Kompetisi ini telah dimulai sejak akhir tahun 1970-an. Pada masa itu bank-bank internasional mulai mencari kota-kota Asia yang akan menjadi tuan rumah *Asian Dollar Market*. Pasar meluas dengan pesatnya pertumbuhan pasar *Eurodollar* dalam suatu *time zone* yang berbeda. Singapura memanfaatkan kesempatan ini, dengan memperkenalkan pasar *Asian-Dollar* yang pertama. Sementara Hong Kong masih tertinggal dibelakang karena belum berkeinginan melepaskan potongan pajak sebesar 15 persen pada *interest income* dari *foreign currency deposits*.³⁰

Namun pada tahun-tahun berikutnya Hong Kong mampu mengejar ketinggalan, bahkan melebihi posisi Singapura. Hong Kong lebih berperan

²⁷ FSWG, *Positioning Singapore as Pre-eminent Financial Centre Asiapacifik*. (Singapore : Executive Summary Economic Review, September 2002)

²⁸ Dennis Hew, *Singapore as a Regional Financial Centre*. (Singapore : Institute for Southeast Asian Studies, Maret 2002), hal. 6

²⁹ Alejandro Reyes, "Singapore versus Hong Kong, Asia Weeks", diperoleh dari <http://www.asiaweek.com?asiaweek?98/1113/nat5.html> diakses 12 Mei 2009.

³⁰ Ng Beoy Kui, *Hong Kong and Singapore as Financial Centres : A Comparative Functional Perspective I*, (Singapore : Economic Division School of Accountancy & Business Nanyang University, 1998), hal.1.

sebagai *Asia Pasific Centre*, sementara Singapura sebagai *South-Asia Centre*.³¹ Hong Kong memiliki beberapa kelebihan *comparative advantages* dibanding Singapura. Singapura memperlihatkan kekuatannya pada *foreign exchange* dan pasar derivatif, sedangkan Hong Kong lebih unggul pada *Fund Management Industry* dan *Offshore Lending*. Sehingga Hong Kong menjadi pusat pengelola dana (*funding centre*) terpenting untuk Asia-Pasifik. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara-negara Asia Tenggara, Singapura secara bertahap juga telah berkembang dari suatu *collection centre* menjadi *funding centre*.³²

Kompetisi *financial centres* antara kedua *city-economy* ini memasuki fase baru sejak akhir tahun 1997-an. Pertama, disebabkan oleh perubahan dramatis dalam sistem finansial Asia akibat krisis yang melumpuhkan hampir seluruh sekonomi Asia. Kedua, reunifikasi Hong Kong dengan China 1 Juli 1997, sehingga sekarang Hong Kong berstatus sebagai *Self Administratif Region(SAR's)* yakni semacam bentuk otonomi khusus terhadap Hong Kong. Pengembalian Hong Kong pada China menimbulkan resiko politik dan peningkatan biaya yang lebih tinggi, sehingga mendorong sejumlah MNCs (*Multinational Corporations*) untuk merelokasikan pusat operasi bisnisnya, terutama non-Cina dari Hong Kong ke Singapura, seperti SCITL (*Standard Chartered International Trustee Ltd*) dan *Union Carbide*. Namun relokasi (*operational headquarters*) OHqs MNC dari kawasan lain ke Hong Kong juga terjadi seperti *Bank of America* dari San Fransisco dan Yaohan dari Tokyo, serta *British Air Ways* dari Singapura.³³

Persaingan antara Singapura dan Hong Kong dalam merebut posisi sebagai finansial center dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Comparative Competitiveness Between Hong Kong and Singapore³⁴

Hong Kong	Singapore
<i>Strengths</i>	<i>Strengths</i>
1. <i>Strategic position</i>	1. <i>Strategic position</i>
2. <i>Prudential regulation</i>	2. <i>Prudential regulation</i>
3. <i>Technological infrastucture</i>	3. <i>Technological infrastucture</i>

³¹ Beate Reszat, "Developing Financial Market in East Asia: Opportunities and Challenges in the 21st Century", (Paper ini disampaikan pada The comference on "asset securitisation" organized by Asia B forum, Kula Lumpur, 2002).

³² Beoy Kui, *Loc Cit.*, hal.28

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* hal. 7

<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Low tax regime</i> 5. <i>Economic freedom</i> 6. <i>Skilled labour</i> 7. <i>Ancillary and support services</i> 8. <i>Political stability</i> 9. <i>Strong investor's confidence</i> 10. <i>English speaking</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Low tax regime</i> 5. <i>Economic freedom</i> 6. <i>Skilled labour</i> 7. <i>Ancillary and support services</i> 8. <i>Political stability</i> 9. <i>Strong investor's confidence</i> 10. <i>English speaking</i> 11. <i>Good government</i>
<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>High cost of doing business</i> 2. <i>Political stability depends on China</i> 	<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>High cost of business</i> 2. <i>Small nation among Malay archipelago</i>
<p><i>Opportunities</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rapid economic development prospect in China</i> 2. <i>Financial liberalization in Japan</i> 3. <i>Financial globalization</i> 	<p><i>Opportunities</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rapid economic development prospect in Southeast Asia</i> 2. <i>Financial Liberalization in Japan</i> 3. <i>Financial globalization</i>
<p><i>Threats</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergence of Shanghai and Taipei as financial centres</i> 2. <i>Systemic risks arising from globalization</i> 	<p><i>Threats</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergences of Bangkok and Labuan as regional financial centres</i> 2. <i>Systemic risks arising from globalization</i>

Sumber : Cheong, et al , *Dynamic Comparison of Hong Kong and Singapore as International Financial Centres*, (Suatu proyek penelitian untuk Nanyang Business School, Nanyang Technological University, 1997)

Persamaan dan perbedaan tersebut telah memicu keduanya untuk saling bersaing menjadi yang terdepan, khususnya dalam merebut peranan ekonomi regional sebagai *financial centre*. Kedua *city-economy* ini dalam perkembangannya mengalami evolusi politik yang bertolak belakang dan menjadi dasar perbedaan perkembangannya. Singapura lahir sebagai negara demokratis namun tetap mempertahankan otoritas yang besar dari pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebaliknya otoritas pemerintah Hong Kong, lebih memilih pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi.³⁵ Persaingan Hong Kong dengan Singapura makin lama semakin tajam sebagai dua aktor bisnis internasional. Masing-masing pemerintahan akan menjaga dan mengawasi gerak langkah lawannya. Singapura, dengan ERC dan EDB-nya akan mengawasi pasar, serta senantiasa mencari strategi yang proaktif terhadap perkembangan. Demikian juga Hong Kong dengan

³⁵ *Ibid.*

segenap strateginya mencoba untuk terus mengawasi perkembangan agresif sektor finansial Singapura.

Strategi Singapura

Terdapat beberapa strategi yang ditempuh Singapura untuk menyaingi Hong Kong mencapai posisi finansial center yang terdiri dari reformasi sistem finansial, implementasi reformasi sistem finansial, kebijakan strategik dan proaktif terhadap perkembangan, *strategic thrust*, pembangunan sumber daya manusia dan promosi.

Reformasi Sistem Finansial

Blueprint ekonomi Singapura untuk perkembangan *financial centre* Singapura adalah program reformasi sistem finansial yang termasuk di dalamnya liberalisasi dan deregulasi. Singapura perlu menyesuaikan pembangunan sektor finansialnya dengan kecenderungan globalisasi keuangan. Oleh karena itu sistem pengaturan dan pengelolaan sektor finansial yang tidak relevan lagi dengan perkembangan perlu diperbaharui. Proses liberalisasi sektor finansial ini secara lebih konkrit telah dijalankan sejak 1997. Singapura bergerak lebih cepat dan dinilai lebih proaktif dibanding Hong Kong dalam merespon krisis. Singapura mereformasi sistem finansialnya pada saat Hong Kong mengalami kemunduran yang cukup hebat pada tahun 1997 dan 1998.

Reformasi finansial bisanya menjadi sesuatu yang mengerikan mengingat apa yang terjadi selama krisis finansial Asia tahun 1997-1998. Liberalisasi finansial yang dilakukan oleh negara-negara Asia pada era 1980-an dan 1990-an bisa dibilang prematur, karena tidak dilengkapi dengan institusi pengaturan dan pengawasan yang memadai.³⁶ Liberalisasi finansial adalah bagian dari reformasi finansial yang dilakukan oleh negara-negara dalam rangka penyesuaian terhadap kecenderungan globalisasi keuangan. Akan tetapi, Singapura tidak menganggap kebijakan itu sebagai hal yang berat karena kekuatan sistem pemerintahan dan bisnis yang dimiliki. Dalam regulasi sistem finansial terdapat beberapa upaya seperti yang dijelaskan berikut.

Penciptaan lingkungan pengaturan yang lebih kondusif

Untuk menarik komunitas bisnis internasional beroperasi di Singapura, diperlukan suatu lingkungan ekonomi yang kondusif dan mendukung efisiensi aktivitas mereka. Transformasi Singapura untuk menjadi *internasional financial centre* kelas dunia berpijak pada reformasi *framework* kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi *guidelines*

³⁶ *Financial Liberalisation in Asia – The New Landscape*, <http://www.afj.com/cover%20story9.htm> diakses tanggal 20 November 2009.

pengaturan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut. Pada tabel berikut akan digambarkan mengenai resume reformasi kunci pengaturan dan legislasi sektor finansial Singapura.

Tabel 4.1
Resume Reformasi kunci pengaturan dan legislasi sektor financial Singapura

Tahun	<i>Legislative and Regulatory Reform</i> (Reformasi pengaturan dan legislasi)
1998 dan 1999	☞ Dikeluarkan undang-undang yang membebaskan sektor <i>banking and financial, fund management, offshore banking, domestic banking, domestic bond market dan equity listing insurance</i>
2000	☞ Dikeluarkan sejumlah peraturan baru mengenai peluncuran <i>securitization, credit derivatives, dan internet finance</i> .
2001	<ul style="list-style-type: none"> ☞ <i>Companies act</i> diamandemen untuk memperkuat prospektus <i>disclosure requirements</i> ☞ Amandemen undang-undang perbankan (<i>Banking Act</i>). Kebijakan baru yang dikeluarkan adalah memisahkan aktivitas bisnis finansial dengan non finansial dari bank-bank lokal. Dan revisi terhadap sejumlah peraturan <i>loans</i> untuk sektor properti, untuk lebih mengefektifkan monitor <i>bank's exposure</i> dalam sektor properti. ☞ <i>Liquidity supervision framework</i> baru dikeluarkan untuk mengikatkan <i>liquid asset requirements</i> terhadap <i>bank's liquidity profile</i> dan kapabilitas <i>risk management</i>³⁷

³⁷ IMF-Monetary Financial System and Asia Pacific Department, *Singapore Financial System Stability Assesment* (Singapura : 25 Februari 2004) hal. 33.

2002	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pendirian FAA (<i>the Financial Advisor Act</i>) untuk mengintegrasikan tindakan-tindakan yang berbeda dalam menjalankan <i>financial advisory services</i> dan untuk merampingkan persyaratan-persyaratan lisensi. Dikeluarkan juga SFA (<i>Securities and Future Act</i>) untuk mengkonsolidasikan legislasi aktivitas-aktivitas pasar modal dan memperkenalkan pengawan pasar yang <i>disclosure-based</i> ☞ Mulai diberlakukannya <i>framework risk-based capital</i> untuk pasar modal yang melayani lisensi para pemegang saham³⁸ ☞ Dikeluarkannya <i>The Payment and Settlement System Act</i> untuk menyediakan perlindungan sistem <i>settlement</i> dan <i>payment</i> dari gangguan-gangguan ☞ Didirikannya <i>The Consumer Credit Bureau</i>
2003	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Diberlakukannya <i>The Code of Corporate Governance</i>, semua perusahaan yang telah terdaftar diwajibkan untuk membuka praktek-praktek pengelolaan perusahaan mereka dalam laporan tahunan. ☞ <i>Listed Companies</i> dengan kapitalisasi pasar lebih kurang S\$ 75 Milyar diwajibkan untuk membuat laporan per empat bulan.³⁹

Sumber : IMF-Monetary Financial System and Asia Pacific Department, Singapore Financial System Stability Assesment. 25 Februari 2004

Pada tabel di atas, dirangkum perubahan-perubahan pengaturan dan legislasi sektor finansial Singapura. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat evolusi pasar modal dan sektor keuangan Singapura sebagai suatu *work in progress* bukan sebagai kontruksi dari arsitektur finansial yang langsung selesai. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif ini adalah dengan mengembangkan *risk-focused supervision*, meningkatkan *corporate governance* dan mempromosikan *disclosure* dan kedisiplinan pasar.

Kebijakan finansial pendukung

Beberapa kebijakan finansial pendukung juga harus direformasi guna meningkatkan efektifitas pasar finansial Singapura. Beberapa kebijakan pemerintah yang menunjang proses pembangunan sektor finansial Singapura antara lain:

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

a. Kebijakan moneter

Dalam ekonomi terbuka dan kecil seperti Singapura, bank sentral memilih untuk memusatkan kebijakan moneternya pada *exchange rate*. Pilihan instrumen kebijakan ini bergantung pada keadaan di sekitar yang dihadapi oleh masing-masing ekonomi. Instrumen kebijakan moneter pada umumnya terdiri dari tiga yaitu *exchange rate*, *monetary base* dan *interest rate*. Sasaran utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga yang berperan sebagai basis untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga secara umum diterima sebagai pondasi dasar dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Banyak dari para ekonom dan para pembuat kebijakan menyadari lingkungan ekonomi dengan harga yang stabil dipercaya mendorong tabungan dan investasi serta mencegah aset-aset dierosi oleh inflasi yang tidak terantisipasi.

b. Kebijakan non-internasionalisasi dollar Singapura⁴⁰

Singapura memelihara suatu kebijakan eksplisit untuk tidak mendorong internasionalisasi dari SGD. Kekuatan dan stabilitas dari SGD telah menambah kepercayaan dan menjaga inflasi tetap rendah. Selanjutnya ini menyediakan pondasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi seiring dengan penguatan dari SGD. Kebijakan SGD yang diterapkan Singapura telah menjadi suatu pertahanan yang efektif dan berharga melawan serangan spekulatif pada SGD. Pertahanan dalam melawan serangan spekulatif seperti ini telah menjadi fundamental ekonomi yang kuat bagi Singapura dan suatu kebijakan *exchange rate* yang *credible*. IMF menyorot bahwa kemampuan Singapura untuk memelihara keseimbangan eksternal dan internal dalam ekonomi ini disebabkan oleh keteguhan pemerintahnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati dan kuat.

c. Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter tidak berjalan sendiri, akan tetapi diperkuat implementasinya oleh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam masalah pengaturan keuangan domestik. Kebijakan fiskal di Singapura terutama bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁴¹

⁴⁰ Pemaparan mengenai kebijakan non internasionalisasi SGD ini selanjutnya mengacu pada tulisan Ong Chong Tee, *Singapore's Policy of Internationalisation of the Singapore Dollar and the Asian Dollar Market*. Dalam BIS Paper no. 15

⁴¹ http://info.sgx.com/SGXWeb_RMR.nsf/DOCNAMR/Regulation?OpenDocument diakses tanggal 20 November 2009.

Implementasi Reformasi Sistem Finansial

Beberapa implementasi strategi reformasi sistem finansial yang dilakukan Singapura untuk menyaingi Hong Kong mencapai posisi sebagai finansial center adalah sebagai berikut:

a. Liberalisasi sektor perbankan

Perbankan adalah bagian paling penting dan kompleks dalam rangkaian reformasi finansial yang dijalankan oleh MAS. Perbankan Singapura mulai dari suatu posisi yang kuat dengan sistem pengawasan dan proteksi yang ketat. Meskipun dalam lingkungan kontrol dan proteksi demikian, sektor perbankan merupakan modal utama Singapura sehingga mencapai posisi sebagai salah satu *financial centre* terkemuka di dunia. Namun demikian kondisi ini tidak dapat terus dipertahankan, karena sektor perbankan juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap keinginan pasar dan kecenderungan global.

Globalisasi keuangan telah menantang sistem perbankan Singapura yang terbiasa merasa nyaman dengan proteksi. Otoritas Singapura harus mencari cara yang tepat untuk meliberalisasi industri perbankan ini sehingga menjadi lebih kompetitif tanpa membahayakan stabilitas dan mengerosi kekuatan yang telah dimiliki. Di samping sentuhan pengaturan, MAS telah berinisiatif untuk bekerjasama dengan bank-bank dalam merancang garis pedoman (*guidelines*) bagi praktek-praktek terbaik sesuai standar internasional dan memberikan peluang yang lebih besar dalam berinovasi. Liberalisasi perbankan ini dibagi dalam dua fase. Fase pertama dimulai pada 17 Mei 1999, dan fase kedua diumumkan pada 29 Juni 2001. Rangkaian kebijakan tersebut ditujukan untuk memperdalam dan memperluas pasar modal dan mempercepat rencana pemerintah untuk mentransformasi Singapura menjadi *international financial centre*.

b. Pasar modal

Beberapa aktivitas pasar modal kunci yang menjadi fokus pengembangan sektor finansial Singapura antara lain:

1. Singapore exchange

Singapura memiliki beberapa *securities exchanges* yang terspesialisasi. *Securities exchanges* ini harus bersaing dengan *exchanges* lain di kawasan dalam menarik perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan *listing* pada masing-masing *exchange* tersebut. Langkah-langkah terbaru yang dilakukan Singapura untuk membuat *exchange*-nya lebih menarik adalah dengan melonggarkan persyaratan-persyaratan dan *fee listing*. Selain itu juga melakukan deregulasi komisi

brokerage untuk mempromosikan *foreign currency debt* dan *securities trading*.⁴²

2. *Bond market*

Perkembangan *bond market* telah menjadi prioritas kunci dalam negara-negara yang dipengaruhi oleh krisis. *Debt securities* terlihat mengalami peningkatan sebagai suatu alternatif sumber modal yang membantu bisnis-bisnis mengurangi ketergantungan pada intermediasi keuangan bank komersial. Selain itu juga untuk menghindari usaha penggunaan modal jangka pendek untuk mendanai proyek-proyek perkembangan jangka panjang.⁴³

Pendekatan Strategik dan Proaktif Terhadap Perkembangan

Menurut Tan dan Chen (1990) kesuksesan *financial centre* dipengaruhi oleh lingkungan politik yang stabil dengan suatu pemerintahan yang efektif, fundamental ekonomi yang kuat, infrastruktur finansial dan fisik, geografi dan lokasi *time zone* yang strategis, serta memenuhi standar internasional dalam masalah hukum pengaturan dan kekuatan tenaga kerja yang terlatih dengan kemampuan bahasa Inggris yang tinggi.⁴⁴

Singapura memiliki lingkungan politik yang relatif stabil dengan tingkat korupsi yang kecil. Singapura juga telah merintis kerjasama ekonomi yang baik dengan patner-patnernya di Asia. Sejalan dengan pemulihan dan pertumbuhan kawasan setelah krisis Singapura memiliki harapan besar untuk makmur bersama dengan pemulihan daerah *hinterland*-nya. Oleh karena itu sejak tahun 1997, pada saat krisis finansial Asia melanda ekonomi Asia, Singapura segera mengambil langkah-langkah pendekatan yang tepat, untuk itu telah dilakukan *review* yang komprehensif terhadap sektor finansial. Singapura memutuskan untuk melakukan pembaharuan sektor finansialnya yang mengarah pada penyesuaian-penyesuaian terhadap kecendrungan globalisasi keuangan dengan strategi-strategi rasional yang proaktif. Untuk memformulasikan langkah-langkah strategis yang tepat, Singapura telah membentuk beberapa komite yang dikepalai oleh para profesional untuk mencari bagaimana Singapura diatur dan bisa memiliki posisi yang lebih baik dalam persaingan.

⁴² Dennis Hew, *Singapore as a Regional Financial Centre*. (Singapore : Institute for Southeast Asian Studies, Maret 2002),

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dennis Hew, *Singapore as a Regional Financial Centre*. (Singapore : Institute for Southeast Asian Studies, Maret 2002),

Strategic Thrust

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik berdasarkan rekomendasi FWSG pemerintah Singapura telah mengidentifikasi tiga *strategic thrust* yakni: (a) *Develop Singapore as a Regional Leader in Wealth Management* (mengembangkan Singapura sebagai pemimpin regional dalam *wealth management*); (b) *Develop Singapore as a Regional/Global Processing Centre* (mengembangkan Singapura sebagai pusat *processing regional/ global*); (c) *Develop Singapore as the Asia Pacific Risk Management Centre* (mengembangkan Singapura sebagai pusat *Risk Management Asia Pasifik*).⁴⁵

Strategic Thrusts ini merupakan pengembangan sektor-sektor kunci - *wealth management, processing dan risk management* - menjadi industri jasa pendukung Singapura sebagai *financial centre* kunci di kawasan. Pengembangan ketiga industri ini diarahkan dengan kebijakan-kebijakan yang proaktif terhadap perkembangan global.

Pembangunan Sumberdaya Manusia

Kemajuan ekonomi Singapura yang sangat mengesankan sangat didukung oleh kemampuan Sumberdaya manusianya. Dalam tata ekonomi baru manusia bukan lagi hanya sebagai faktor produksi melainkan sebagai sumber utama dari kreasi dan inovasi. Untuk bisa *survive* sebagai *international financial centre* Singapura membutuhkan para profesional di bidang keuangan dan tenaga kerja yang terdidik dengan kemampuan bahasa Inggris yang tinggi. Untuk keseluruhan institusi yang berperan dalam pembangunan *financial centre* Singapura memerlukan talenta yang mampu merumuskan dan merealisasikan strategi-strategi yang proaktif terhadap perkembangan. Reformasi yang dijalankan Singapura juga melibatkan reformasi *mindset* dari para pelaksana otoritas dan institusi di Singapura.

Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh Singapura untuk membangun sumberdaya manusia melalui dua cara yaitu: (a) Peningkatan mutu pendidikan dan training yang diperuntukkan bagi orang-orang Singapura; (b) Mengeluarkan kebijakan imigrasi yang fleksibel untuk menarik talenta dan para profesional agar bekerja di Singapura.

Pendidikan di Singapura berbasis pada kemajuan teknologi dan lebih terfokus pada pengembangan sains dan teknologi. Secara *progressif* Singapura telah membangun profil pendidikannya sesuai dengan perkembangan globalisasi. Namun keberadaan kaum profesional asli Singapura masih belum memadai sehingga Singapura mengambil

⁴⁵ Financial Services Working Group, *Positioning Singapore as a Pre-eminent Financial Centre in Asia* (Executive Summary ini disampaikan di Singapore, September 2002).

kebijakan untuk menarik tenaga kerja migrant yang profesional dan terdidik dari seluruh dunia.

Promosi

Rangkaian terakhir dari keseluruhan strategi Singapura untuk menjadi *financial centre* primer di kawasan adalah promosi. Promosi ini meliputi dua area yaitu promosi ke dalam dan promosi keluar. Keduanya saling terkait dan dilakukan oleh aktor-aktor yang sama. MAS selain sebagai pembuat kebijakan dan pengaturan juga berperan sebagai *agency public* yang mempromosikan *financial centre* Singapura dalam forum-forum Internasional. Selain itu untuk lebih efektifnya realisasi reformasi sistem finansial yang dilakukan MAS juga harus bekerja sama dengan elemen-elemen penting lainnya yang mendukung secara proaktif.

Sektor swasta juga memainkan peranan penting dalam kegiatan promosi jasa-jasa finansial, tetapi memiliki insentif yang berbeda dengan sektor publik. Sektor swasta di Singapura adalah pemain pasar domestik yang bertindak sebagai penyedia jasa-jasa finansial. Tentu saja sebagai aktor bisnis mereka akan melakukan promosi dan terjadinya peningkatan kompetisi. Kebijakan pintu terbuka terhadap institusi finansial asing dan bank-bank asing memicu sektor finansial domestik untuk terus melakukan inovasi dan kreasi agar tidak tertinggal dalam persaingan dengan pihak asing. Suasana yang kompetitif tercipta merupakan bagian dari promosi yang dilakukan oleh sektor swasta ke dalam. Sektor swasta juga aktif melakukan promosi di beberapa negara lain dengan melakukan kerjasama bisnis dengan institusi-institusi di negara-negara tersebut. EDB Singapura yang memiliki perwakilan di beberapa negara terkemuka dunia, selain untuk melihat pasar dari dekat juga berperan untuk mempromosikan *financial centre* Singapura. Dengan promosi yang giat dan aktif oleh segenap elemen pendukung *financial centre* Singapura, komunitas bisnis internasional melirik Singapura. Selanjutnya untuk mempertahankan minat para komunitas bisnis tersebut Singapura berupaya untuk membangun *financial centre*-nya yang sesuai dengan permintaan pasar dan kecenderungan globalisasi keuangan.⁴⁶

Dengan strategi-strategi yang ditetapkan dan digunakan Singapura untuk mencapai posisi finansial center di atas, dapat dikatakan telah membuahkan hasil. Meskipun pada tataran finansial center Asia, Singapura belum sepenuhnya merebut posisi sebagai *The Next Pre-Eminent Financial Centre*, tetapi segenap kebijakan ekonomi politik yang ditempuh Singapura telah "mengancam" bahkan menggeser kedudukan finansial center Hong Kong yang sebelumnya berada pada posisi aman. Paling tidak keberhasilan

⁴⁶ *Ibid.*

signifikan yang perlu dicatat dari keberhasilan kebijakan ekonomi politik yang ditempuh Singapura itu, telah menempatkan Singapura pada "posisi aman" sebagai finansial center utama di Asia Tenggara.

Penutup

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian setelah pembahasan bab-bab sebelumnya di dasarkan pada tiga asumsi. Pertama, Singapura dan Hong Kong sebagai entitas ekonomi yang rasional memiliki ambisi yang sama untuk menduduki posisi sebagai *financial centre* utama (*pre-eminent financial centre*) dalam pola hirarkies *landscape* finansial di kawasan Asia.

Kedua, Posisi sebagai *financial centre* memiliki nilai-nilai strategis dari segi ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, kedudukan *financial centre* puncak (utama) memiliki peluang untuk memonopoli aktivitas transaksi keuangan global dan regional di kawasan, yang akan berkontribusi pada kemakmuran kedua *city-economy* dengan kondisi minim sumberdaya. Kemakmuran dan prestise yang di dapat sebagai *financial centre* akan memberi peluang kepada kedua aktor untuk lebih didengar dan diperhatikan di forum-forum internasional.

Ketiga, persaingan antara kedua *city-economy* bersifat seperti permainan (*games*). Dalam persaingan ini Singapura dan Hong Kong telah mengimplementasikan diri sebagai suatu perusahaan atau aktor bisnis yang bertindak rasional. Persaingan dalam bisnis tidak seperti dalam medan pertempuran yang menghasilkan yang kalah dan yang mati. Melainkan suatu proses permainan yang berkesinambungan atau dengan kata lain tidak berhenti hanya pada satu permainan. Dengan demikian persaingan ini berkemungkinan besar terjadi dalam bentuk saling membalas atau reciprocal. Keempat, untuk memenangkan persaingan kedua *financial centres* harus mendapatkan kepercayaan pasar dengan menampilkan suatu *financial centre* yang efektif, efisien, inovatif dan memiliki *low cost of business* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif).

Selain daripada asumsi-asumsi di atas ada beberapa realitas mengenai kedua *financial centre* yang mesti diperhatikan diantaranya; pertama, Singapura dan Hong Kong memiliki perbedaan filosofi yang sangat mendasar dalam ekonomi politik pemerintahannya yang mempengaruhi perkembangan kedua *financial centre*, meskipun kedua *City-states* ini memiliki banyak persamaan dalam perkembangan *financial centre*. Singapura dengan rezim *semi authoritarian* menganut prinsip *Positive intervensionist*, sedangkan Hong Kong menganut prinsip *positive non-intervensionist*.

Kedua, dari segi otoritas, Singapura lebih bisa menentukan nasib sendiri karena berstatus sebagai negara berdaulat, sementara Hong Kong merupakan otoritas di bawah Cina dengan status SARs (*self administrative regions*). Ketiga, kenyataan bahwa sejak kemunculan *financial centre* dalam era globalisasi di kawasan Asia, Hong Kong sudah memiliki reputasi sebagai *international financial centre* untuk jangkauan Asia Pasifik, sedangkan Singapura lebih dikenal sebagai *financial centre* yang melayani region Asia Tenggara. Hal ini juga didukung oleh kelebihan posisi strategis Hong Kong di antara negara-negara maju Asia Timur dibanding Singapura yang berada pada posisi jantung Asia Tenggara yang mengalami pukulan berat akibat krisis dan memiliki ketidakpastian ekonomi dan politik yang lebih besar. Meskipun ekonomi Hong Kong mengalami kemunduran setelah krisis yang lebih parah dari Singapura, namun dengan cepat Hong Kong bisa memacu kembali pertumbuhan ekonominya.

Berpijak pada asumsi-asumsi dan realitas di atas kedua, maka pada penelitian ini penulis merumuskan simpulan utama dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yakni mengenai strategi Singapura dalam menyaingi *financial centre* Hong Kong. Singapura mengimplementasikan strategi dan pendekatan yang proaktif terhadap perkembangan. Strategi dan pendekatan yang proaktif tersebut diwujudkan dalam pembaharuan (reformasi) sistem finansial yang komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Alatas, Ali, *A Voice for A Just Peace*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Alwasilah, Chaedar, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merrancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002.
- Anwar, Dewi Fortuna, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembnagan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- ASEAN Political Document*, Handbook of Selected Third Edition, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2006.
- ASEAN Regional Forum*, Document Series 1994-2006 Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007.
- ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008.
- Chongkittavorn, Kavi, *Thai-Burma Relations'*, in *International IDEA*, Macmillan Press Ltd, 2000.
- Dam, Sjamsumar, dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

- Griffiths, Martin dan Terry, O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, Rotledge, New York, 2002.
- Haacke, Jürgen, *Myanmar's Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications*, Abingdon: Routledge, 2006.
- Jackson, Robert, dan George, Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Katzenstein, Peter, J., 'Introduction: Asian regionalism in comparative perspective' in Peter J. Katzenstein and Takashi Shiraishi (ed), *Network Power. Japan and Asia*, New York, Cornell University Press, 1997
- Luhulima, C.P.F., *ASEAN Menuju Postur Baru*, Jakarta: CSIS, 1997.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mas'ood, Mochtar, *Ilmu Hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Soesastro, Hadi, , ed., *ASEAN in a Changed Regional and International Political Economy*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Spence J. E., *Dictionary of International Relation*, London: Penguin Books, 1998.

Jurnal

- Acharya, Amitav, "Culture, Security, Multilateralism: The 'ASEAN Way' and Regional Order" *Contemporary Security Policy*, vol. 19, no. 1, April 1998.
- Almonte, Jose, T., "Ensuring Security the 'ASEAN Way" *Survival Journal*, vol.39, no.4, Winter 1997.
- Amer, Ramses, "Conflict Management and Constructive Engagement in ASEAN's Expansion", *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 5, *New Regionalisms in the New Millenium Journal*, Oktober, 1999.
- Bandoro, Bantarto, "Myanmar dan Negara-Negara Ekstra Regional", *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.
- Beeson, Mark., "Sovereignty Under Siege: Globalization and the State in Southeast Asia". *Third World Quarterly*. Vol 42. No.2.
- Beeson, Mark. "Sovereignty Under Siege: Globalization and the State in Southeast Asia". *Third World Quarterly*, Vol 42. No.2, 2003.
- Beukel, Erik, "ASEAN and ARF in East Asia's Security Architecture: The Role of Norms and Power", *Danish Institute for International Studies*, Volume 4, 2008,.
- Bowers, Poul, "Burma and Military Regime" *International Affairs And Defence Section Journal*, Edisi Februari 2004.

- Bunyanunda, Mann, "Burma, ASEAN and Human Rights", *Stanford Journal of Asian Affairs*, Spring 2002, Volume 2.
- Busse, Nikolas, "Constructivism and Southeast Asian Security", *The Pacific Review*, Vol.12 No.1, 1999.
- Buszynski, Leszek, "Thailand and Myanmar: The perils of 'constructive engagement'" *The Pacific Review*, vol. 11, no.2, 1998.
- Collins, Cited, "The Security Dilemmas of Southeast Asia, *Singapore Information and Resource Center*, December 2003.
- Firnas, M. Adian, "Prospek Demokrasi di Myanmar", *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 2, Januari 2003.
- Goh, Gillian, "The 'ASEAN Way' Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Manajement" *Stanford Journal of East Asian Affairs* Volume 3, Nomor 1, Sping 2003.
- Kerr, Pauline, "The Security Dialogue in the Asia-Pacific" *The Pacific Review*, vol.7, no.4, 1994.
- Leifer, Michael, "ASEAN as a Model of a Security Community?" in Hadi Soesastro (ed.), *ASEAN in a Changed Regional Order and International Political Economy*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Luhulima, C.P.F., "Perimbangan Kekuatan di Myanmar, Faktor ASEAN dan Kepentingan Indonesia", dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.
- Muhibat, Shafiah, Fifi, "ASEAN dan Masalah Myanmar", *Jurnal Analisis CSIS*, Volume 35, No. 2, 2006.
- Noboyuki, Yasuda, "Law and Development in ASEAN Countries". *ASEAN Economic Bulletin*. Vol. 10. No. 2.
- Perwita, Anak Agung Banyu "Kapasitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar", *Analisis CSIS*. Vol.35. No. 2.
- Phan, Hao, Duy, "The ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights and Beyond", *Asia Pacific Bulletin*, Nomor 40 Edisi Juli 2009.
- Ramcharan, Robin, "ASEAN and Non-interference: A principle maintained" *Contemporary Southeast Asia Journal*, vol.22, no.1, 2000.
- Rüland, Jürgen, , "ASEAN and the Asian Crisis: Theoretical Implications and Practical Consequences for Southeast Asian Regionalism," *The Pacific Review*, Vol. 13 No. 3, 2000.
- Sérgio, Paulo, Pinheiro, The Myanmar s Road Map to the Consolidation of Military Authoritarianism, *Asia-Pacific Security Challenges* Edisi September 2008.
- Severino, Rodolfo, C., "Reflections On ASEAN: What We Did Right, Where We Went Wrong- Lessons For The Future" dalam Stephen Leong (ed.), *ASEAN Towards 2020's Strategic Goals And Future Directions*, Kuala Lumpur, ISIS Malaysia, 1998.

- Severino, Rodolfo C., "Reflections on ASEAN: What We Did Right, Where We Went Wrong- Lessons for the Future" in Stephen Leong (ed.), *ASEAN Towards 2020's Strategic Goals and Future Directions*, Kuala Lumpur, ISIS Malaysia, 1998.
- Shusterman, "Understanding the Self's Others," in Gupta and Chattopadhyaya, eds., *Cultural Otherness and Beyond*, Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 1998.
- Tjhin, Christine, Susanna, "Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN", *CSIS Working Paper Series*, edisi November 2005.
- Yursal Aidi, "Penyelesaian Myanmar Menuntut Peran Ganda" *Jurnal Forum Komunikasi Nusantara-Sumatra Utara*, Edisi Oktober 2007.

Surat Kabar

- Abra, Prita, "PBB Harapkan Peran RI dalam Proses Demokratisasi di Myanmar", *Antara*, Rabu, 13 Februari 2008.
- Awaludin, Mahid, "Nasib Demokrasi di Myanmar", *Kompas*, Rabu 19 Agustus 2009.
- Bandoro, Bantarto, "Mahatir's Myanmar Policy Not Just Empty Rhetoric", *The Jakarta Post*, 29 Juli 2003.
- Dahlan, Ahmad, "Jalan Panjang Menuju Demokratisasi di Myanmar", *Harian Seputar Indonesia*, Kamis, 8 Oktober 2009.
- Prasetyo Edi, "Myanmar: Tampanan Keras Bagi ASEAN", *Kompas*, 24 Mei 2006.
- Sodikin, Amir dan Khairina, "Demokrasi di ASEAN Kembali Diuji", *Kompas*, 30 September 2006.
- Wanandi Jusuf, "ASEAN's Problem with Myanmar", *The Jakarta Post*, 31 Juli 2005.
- Yursal Aidi, "Penyelesaian Myanmar Menuntut Peran Ganda", *Antara*, Jum'at, 19 Oktober 2007.

Website

- Tan, Kenneth, *Hong Kong and Singapore*, <http://ccdf.ca/pdf/chapter10.pdf>
- Peter Wilson and Gavin Peebles, *Don't Frighten the Horses The Political Economy of Singapore's Foreign Exchange Rate Regime Since 1981*. National University of Singapore. Department of Economics SCAPE Working paper Series. Paper No.2005/06 <http://nt2.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp-scape/0505.pdf>

Regionalisme di Korea Selatan : Antara Pembentukan Sejarah dan Proses Berdemokrasi

Jeanie Annissa, S.IP, M.Si¹

Abstraksi

The Paper discusses about developmentalism approach of regionalism in South Korea which mean is a freedom of appreciation of democratic life. Regionalism in South Korea is a new steps reaction of anti- otoritarian in managerial territorial aspect in social, economic and political change since early 1990. Regionalism development is a impact of a gap in historical approach between economic capital and non- capital to contribute for reconstructional regional area. Regionalism has been used to create a political vote through a remake a political cleavages. Elites had used patronclient effect to influence public society. So thus, the condition of economic gap gave a contribution to create a regional conflict issues and pursue the democracy.

Keyword : regionalism; Political cleavages; demoacracy

Regionalisme dan Kaitan sejarah Politik Korea Selatan

Di Korea, perdebatan regionalisme telah berkembang sudah lebih dari 30 tahun. Topik mengenai isu politik sosial dan teritorial masih menjadi sebuah perdebatan yang selalu dikaitkan dengan persoalan regional atau lebih tepatnya dikaitkan dengan persoalan konflik regional dan diskriminasi sosial. Isu-isu penting yang selalu dikaitkan dengan persoalan regionalisme adalah persoalan konflik sosial kedaerahan, unifikasi dan yang lebih difokuskan adalah pemanfaatan situasi dan kondisi regionalisme untuk menciptakan kantong-kantong politik yang dikelola sedemikian rupa untuk meraih suara dalam proses *election*.

Bagaimanapun kegagalan rezim otoritarian militer di tahun 1990, telah memberikan kontribusi yang berarti untuk perkembangan sosial dan pemerintahan di Korea Selatan. Kejatuhan militer telah mengarahkan pola pikir politik masyarakat Korea dan juga pemerintahannya untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi regional di Korea Selatan.

¹ Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

Struktur material, hubungan kekuasaan dan pembentukan institusional mengalami perubahan dan tantangan di masa pemerintahan Kim Young Sam.

Tantangan mengenai proses formasi regionalisme yang harus dihadapi Korea Selatan terbagi menjadi dua persoalan, yaitu *pertama*, monopolisasi kelompok politik konservatif Korea Selatan dan beberapa media masa. Tantangan ini menjadi persoalan serius karena media berperan menjadi sebuah wadah yang digunakan pemerintah untuk memberikan informasi penting yang berkenaan dengan regionalisme. *Kedua*, pertumbuhan dan pengaruh kelompok kepentingan dan organisasi sipil, yang mengubah proses institusionalisasi electoral dalam praktek konsolidasi demokrasi sebagai dampak globalisasi dan pembentukan isu lokal dalam upaya melawan regionalisme.²

Interpretasi perkembangan regionalisme Korea Selatan terbentuk akibat efek dari karakteristik rezim otoritarian militer di tahun 1970 dan 1980-an. Setelah tahun 1990, dominasi regionalisme di Korea Selatan memiliki 2 interpretasi. Interpretasi *pertama*, adalah premis mengenai adanya manipulasi ideologi dari kelompok *the rulling class*. *Kedua*, regionalisme dipakai sebagai pengelolaan wilayah teritorial.³

Aspek teritorial di Korea Selatan selalu berdampak dengan pertumbuhan ekonomi selama kurang dari 4 dekade. Dibawah rezim militer, pengembangan regionalisme di wilayah Honam dan Yeongnam berdampak sebagai sumber terjadinya konflik.⁴ Interpretasi ini juga menegaskan bahwa dampak dari regionalisme dibawah kekuasaan otoritarian militer lebih memfokuskan solusi kebijakan perkembangan daerah dan dikelola untuk pembentukan kantong-kantong politik di masing-masing wilayah.

Beberapa peneliti juga menilai bahwa regionalisme di Korea Selatan sebagai langkah awal *developmental state* di masa otoritarian militer, sehingga peneliti tidak hanya memfokuskan persoalan dalam kajian regionalisme semata tetapi juga mengkaitkan dengan kajian konsolidasi demokrasi Korea Selatan.

² Kang Myung-goo, *Decentralization and the Restructuring of Regionalism in Korea: Conditions and Possibilities*, Korea Journal Summer 2003, hal. 82.

³ *Ibid*

⁴ Kim Yong Hak, "Eliteu chungwon-e isseoseoui jiyek gyeokcha" (엘리트 층원에 있어서의 지역 격차 /Regional Disparities in Elite Recruitment) :In *Hanguk-eui jiyek-i-wajiyek galdeung* (한국의 지역이 와 지역 갈등/Regionalism and Regional Conflicts in Korea), edited by Korean Sociological Association. Seoul: Seongwonsa. 1990.

Sehubungan dengan itu, pengertian regionalisme di Korea Selatan juga secara umum diakibatkan dari ketidakadilan pengembangan wilayah baik secara ekonomi ataupun non-ekonomi dari beberapa wilayah yang

ada di Korea Selatan. Selama 4 tahun terakhir, aspek teritorial menjadi sebuah masalah penting, karena berkaitan dengan persoalan ekonomi dan juga pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Dibawah kekuasaan rezim otoritarian militer, pertumbuhan daerah mengalami kesenjangan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan wilayah yang mengalami *gap* antara wilayah Yeongnam yang memiliki tingkat kemakmuran yang sangat besar, dan menjadi wilayah industri yang sangat besar dan memberikan dampak besar terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi wilayah Korea Selatan. Sedangkan wilayah Honam, merupakan sebuah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Karakteristik wilayah yang dipenuhi oleh pertanian dan perkebunan sehingga pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja masih sangat kecil. Persoalan kesenjangan ekonomi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya persoalan konflik regional di wilayah Korea Selatan.⁵

Dalam penjelasan munculnya regionalisme,⁶ para analis memfokuskan diri pada tiga faktor utama, yakni: sejarah kesenjangan pembangunan yang kontras antara Cholla dan Kyongsang, ketidakjelasan rekrutmen elite, dan manipulasi sentimen daerah oleh elite politik yang disebabkan oleh banyak kasus termasuk insiden Kwangju tahun 1980 di Kwangju yang juga menyudutkan salah satu elite yakni Kim Dae Jung.

Masalah regional ini juga sebelumnya, memiliki akar masalah yang panjang jika dirunut berdasarkan budaya negara Korea. Di masa lalu sebelum terbentuknya sebuah negara Korea yang dikenal saat ini terdapat 3 periode kerajaan yang menguasai wilayah Korea, yakni Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Silla (Sekarang Propinsi Kyongsang atau Yongnam), Kerajaan Baekche (Sekarang Propinsi Cholla atau Honam) yang secara konsisten berperang satu sama lain.

Di abad ketujuh Kerajaan Silla bergabung dengan China untuk menyerang Kerajaan Baekche dan bersatu untuk memasuki Korea. Di abad selanjutnya, poros ekonomi sumber daya alam berpindah tempat dari Seoul ke Pusan sebagai pusat ekonomi. Pusan (Propinsi Kyongsang) yang sangat dekat dengan pelabuhan Jepang yang memiliki fasilitas perdagangan internasional begitupun dengan Seoul yang merupakan ibukota negara Korea yang juga dekat dengan China. Setelah merdeka dari Jepang, pemerintah militer menempatkan tempat industri di wilayah selatan untuk melindungi invasi Korea Utara sedangkan Propinsi Cholla

⁵ Persoalan pengelolaan ekonomi daerah ini juga secara nyata menunjukkan adanya persoalan *self-formation* dan proses rekrutmen (sebagai bentuk cikal bakal kekuasaan *cleavage politic*) yang dilakukan oleh elite dalam upaya meningkatkan jumlah suara dalam proses pemilu..

⁶ Jeong-Ho Roh, *Crafting And Consolidating Constitutional Democracy In Korea* dalam buku David, C. Kang, *Korea's Democracy* Chapter 7, hal. 165.

dalam kurun 50 tahun terakhir tetap memperluas pembangunan ekonominya dalam pengelolaan di bidang agraria khususnya setelah wilayahnya terbagi dua.⁷

Dalam catatan kajian tentang regionalisme Korea ini, juga tercatat bahwa proporsi politik dan bisnis elite cenderung lebih tinggi di Propinsi Kyongsang sedangkan proporsi terendah ada di wilayah Cholla. Selama pemerintahan Syngman Rhee, populasi Korea selatan banyak bertempat tinggal di wilayah Propinsi Cholla (Honam) dan kurang dari 6 persen para elite berasal dari sana. Trend regional ini kembali dimunculkan ketika pemerintahan berada di bawah era Park Chung Hee tahun 1961-1979. Park yang berasal dari wilayah Tenggara Kyongsang (Yongnam), membawanya menjadi seorang lelaki yang memiliki posisi kekuasaan dan mengarahkan pembangunan ekonomi yang lebih condong dan terpusat hanya di Pusan-Seoul. Dimulai dari rejim Park Chung Hee hingga rejim Kim Young Sam, para elite tidak pernah melakukan banyak kompromi kebijakan dengan Propinsi Cholla kecuali hanya 15 persen atau seperempat bagian dari keseluruhan kebijakan yang dilakukan.⁸

Berdasarkan sejarahnya, wilayah Cholla memang telah difokuskan dibidang agrikultur dan Kyongsang di bidang perindustrian tetapi memang sudah seharusnya pemimpin bisa berasal dari wilayah mana saja tetapi kita juga tidak bisa mengelakan kenyataan bahwa ekonomi dan politik rasional yang hanya menekankan pembangunan terpusat di Seoul dan Pusan. Sebagaimana Seoul merupakan Ibukota negara Korea Selatan dan Pusan sebagai pelabuhan utama yang menaruh akses penting dalam jalur perdagangan dengan Jepang.⁹

Bagaimanapun juga, konfrontasi regional berkaitan erat dengan persoalan pertumbuhan ekonomi dan politik di daerah. Persoalan ini juga menumbuhkan perbedaan struktur kantong-kantong politik setelah kekuasaan mengalami transformasi dari militer otoritarian menuju pemerintahan sipil di tahun 1990an. Situasi ini juga menumbuhkan ungkapan-ungkapan ataupun slogan yang menunjukkan adanya kesenjangan social antara Yeongnam dan Honam atau lebih tegasnya Honam versus anti-Honam. Sikap ini diekspresikan sebagai bentuk kekecewaan antara masyarakat wilayah non capital terhadap masyarakat capital, yang lebih banyak mendominasi sumber daya manusia dan penguasaan ekonomi.

⁷ *Ibid*, hal. 166.

⁸ *Ibid*, hal. 166

⁹ *Ibid*.

Regionalisme Di Masa Rezim Militer

Peranan regionalisme di Korea Selatan sebenarnya mulai jelas terlihat di masa pemerintahan militer Park Chung Hee. Setelah Park Chung Hee mengambil alih kekuasaan dari kepemimpinan Chang Myon pada tahun 1961, Park Chung Hee memimpin Dewan Militer. Hal ini sebagai upaya perubahan struktural di Korea Selatan. Tetapi, perubahan-perubahan struktural ini menunjukkan semakin tajamnya kondisi sentimen kedaerahan dan pertentangan daerah.

Park Chung Hee memperkenalkan dirinya sebagai putera daerah Kyongsang dan mengajak masyarakat Kyongsang untuk menduduki posisi-posisi kunci dalam pemerintahannya. Kyongsang pun menikmati hasil Pemilihan Presiden. Anggota Majelis Nasional lebih dari 65 persen berasal dari wilayah Kyongsang. Dalam hal ini, dominasi daerah Kyongsang di dalam arena politik menciptakan kesenjangan antara daerah Kyongsang dan daerah lainnya khususnya wilayah Cholla. Dominasi ini tidak menguntungkan dan mengasingkan rakyat di wilayah Cholla.

Kebijakan politik Park Chung Hee diperlihatkan dalam pola perekrutan pejabat birokrat tingkat tinggi, yang kemudian menghasilkan faktor paling penting dalam memperkuat ketegangan-ketegangan antar daerah. Elite pemerintahan yang baru itu mengenalkan pola yang berbeda yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi dengan memusatkan sumber-sumber bagi pembangunan, terutama infrastruktur industri, di propinsi-propinsi bagian tenggara (Yea, 1994:9).¹⁰ Terlihat juga bahwa, disamping pemberian imbalan-imbalan politik, penduduk Kyongsang pun menikmati imbalan ekonomi yang diperkenalkan kedalam daerah ini. Kebijakan-kebijakan yang ada menguntungkan daerah tersebut, dan akhirnya mendorong tumbuhnya basis industri pabrik dan industri pokok (Chul, 1994:8).¹¹

Sebaliknya, konsentrasi perkembangan ekonomi di daerah Kyongsang jauh lebih berkembang daripada daerah Cholla yang merupakan daerah dengan karakteristik agraria. Kemudian faktor selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan sosial antara dua daerah tersebut yang memperlihatkan bahwa penduduk Kyongsang memperoleh lebih

¹⁰ Menurut Yea, SW, struktur elite politik dan ekonomi memainkan peranan penting dalam menciptakan dan memelihara jaringan-jaringan yang berbasis daerah. khususnya selama proses akumulasi yang cepat pada tahun 1960-an dan 1970-an, golongan-olongan politik dari wilayah tenggara (wilayah kyongsang) merebut dan mengontrol pemerintahan pusat dan memanipulasi hasil-hasil pembangunan. Dalam tulisan Widyonugrahanto, *Demokratisasi Di Korea Selatan Tahun 1987-1998: Sentimen Kedaerahan Dalam Jalan Menuju Konsolidasi Demokrasi Korea Selatan*, Tesis Master Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1999, Hal. 52-53.

¹¹ Chul mencatat bahwa terdapat keputusan-keputusan kebijakan umum yang disengaja untuk membngun daerah kyongsang, dengan lokasi-lokasi seperti Kumi, Ulsan, Masan-Ch'angwon dan pohang sebagai basis-basis pabrik dan industri pokok.

banyak penghasilan dan memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada penduduk di daerah Cholla karena berkembangnya industri yang dengan sendirinya membutuhkan banyak tenaga kerja.

Di Korea Selatan, isu kedaerahan merupakan hal yang unik dalam kehidupan berbangsa yang ditimbulkan dari latar belakang masalah rasial, historis, bahasa dan budaya homogen (Chul, 1994:6-7). Munculnya isu kedaerahan digunakan para elite untuk meningkatkan dukungan di basis-basis daerah tertentu atau sebagai alat untuk membuat diskriminasi politik dan pemisahan sosial. Park Chung Hee kemudian dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas berkembangnya sentimen-sentimen kedaerahan. Alasan Park Chung Hee membuat kebijakan tersebut adalah sebagai bentuk ambisi pribadinya untuk menduduki jabatan sebagai Presiden.

Park Chung Hee mengakui bahwa, melaksanakan ambisinya bukanlah suatu hal yang mudah karena tidak berkembangnya isu-isu ideologis yang dia andalkan untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat Korea Selatan. Suasana politik Korea Selatan setelah militer berkuasa melalui kudetanya sangat berbeda dengan situasi pada dua rezim sebelumnya.

Identifikasi Park Chung Hee dengan daerah asalnya, tampak menjanjikan untuk meningkatkan pengumpulan suara pada Pemilihan Presiden, karena itu dia memperkuat isu mengenai sentimen kedaerahan di kalangan penduduk Kyongsang untuk lebih menarik simpati sehingga mereka mendukungnya melalui pemberian suara.

Sentimen kedaerahan tersebut merupakan pilihan yang tersisa karena tidak adanya isu-isu strategis yang penting. Untuk mempertahankan dukungan penduduk Kyongsang pada tahun berikutnya, maka Park Chung Hee perlu mengadakan perbaikan riil dalam kehidupan masyarakat Kyongsang.

Penduduk Kyongsang banyak diuntungkan dalam masa pemerintahan Park Chung Hee. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian kesempatan untuk terpilihnya Anggota Majelis dan pemegang jabatan pokok. Harapan ini sebagai imbalan mereka jika mendukung Park Chung Hee dan partainya. Kenyataannya, keberlangsungan pemerintahan Park Chung Hee selama hampir dua dekade disebabkan oleh kuatnya dukungan penduduk Kyongsang. Selanjutnya Park Chung Hee mendirikan jaringan-jaringan yang berbasis daerah di Kyongsang dalam bentuk golongan-golongan elite pemerintah, serta memelihara struktur kekuasaan yang ada dengan kondisi Park Chung Hee tetap berada di atasnya.

Penduduk Cholla terasing ketika mereka tidak diuntungkan dengan imbalan-imbalan politik, sementara posisi-posisi di Kyongsang berkembang pesat menjadi pusat-pusat industri, propinsi-propinsi di

daerah Cholla tetap agraris. Perubahan-perubahan struktural sejak tahun 1961 itu memperkuat ketegangan-ketegangan antar daerah. Sentimen kedaerahan yang kuat tampak berurat akar di dalam iklim politik Korea sejak itu. Menyusul runtuhnya pemerintahan Park Chung Hee, rakyat di Kwangju pada tanggal 18 Mei 1980 memperlihatkan indikasi yang kuat terhadap tingkat sentimen kedaerahan di kalangan rakyat Cholla mengenai oposisi mereka atas berkembangnya pemerintahan militer baru yang menunjukkan elite tingkat atas dari daerah Kyongsang.

Persekutuan-persekutuan kedaerahan yang diciptakan rezim Park Chung Hee dan Chun Doo Hwan sangat kuat, mendorong sentimen kedaerahan dalam pemungutan suara pada pemilu-pemilu yang diadakan dibawah pemerintahan demokrasi yang baru sejak 1987.

Regionalisme di Masa Pemerintahan Sipil

Isu regionalisme masih digunakan sebagai isu penting yang dimanfaatkan untuk meraih dukungan suara dalam pemilihan umum di Korea Selatan. Di tahun 1990, ketika pertama kali konsolidasi demokrasi terjadi yang ditunjukkan dengan pasifnya peranan militer dan berkuasanya posisi sipil dalam menempati percaturan politik di Korea Selatan, menumbuhkan kesadaran berpolitik masyarakat. Semua elite sipil mencuatkan slogan dan pandangan politik yang mengarah kepada persoalan ekonomi. Salah satu kandidat sipil, Kim Young Sam mencuatkan persoalan ekonomi yang dikaitkan dengan isu regionalisme untuk menarik simpati masyarakat demi memperebutkan jumlah suara ketika pemilihan umum berlangsung di tahun 1992.

Ketika di Pemilu 1992, Kim Young sam melakukan pertemuan rahasia dengan Pemimpin Daerah di wilayah Kyongsang yang kemudian diketahui oleh lawan politiknya Kim Dae Jung dalam upaya melakukan perjanjian kemajuan bagi Kyongsang. Dengan kata lain, isu kedaerahan akan mempengaruhi isu ekonomi dan situasi ini dimanfaatkan untuk menjadi strategi Kim Young Sam mendapatkan dukungan para konglomerat dan juga mengelola pemanfaatan serikat buruh dan pekerja dalam meningkatkan jumlah suara ketika Pemilihan Presiden berlangsung.

Kondisi ini disebabkan karena Kyongsang merupakan wilayah dengan karakteristik industri. Dengan demikian, para *Chaebol* akan memanfaatkan dukungan mereka bagi kepentingan bisnis, sedangkan para buruh bisa menekan pemerintah yang terpilih untuk memberikan jaminan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan melalui pembentukan Undang-Undang.

Pemanfaatan isu regional yang dikaitkan persoalan ekonomi ini tidaklah menjadi sebuah analisis *premature*. Situasi ini terbukti ketika dalam proses pemilihan umum Kim Young Sam mengungguli perolehan suara

dari beberapa wilayah Yeongnam. Dari 3 elite sipil yang bertanding, Kim Young Sam menempati urutan pertama.

Hubungan Jenis Daerah Pemilihan Dengan Pilihan Pemilih

Jenis Daerah	Kim Young Sam	Kim Dae Jung	Chung Ju Yung	Lainnya	Tidak Menjawab	Total
Metropolitan	48,6%	25,5%	11,1%	11,3%	3,5%	100%
Cities	45,4%	34,1%	10,6%	8,3%	1,7%	100%
Rural Urban	51,9%	31,1%	8,1%	6,7%	2,2%	100%

Sumber : Lee NamYoung, *The Voter's Choice: The 14th Presidential Election Of Korea*, Korean Journal, Vol.33, No.1,1993, hal.31.

Setelah pemerintahan sipil Kim Young Sam, pemerintahan Roh Moooh Hyun juga menggunakan persoalan isu *gap* ekonomi regional dalam proses pemilihan umum berlangsung di tahun 2004. Kondisi ini terlihat ketika Roh Moooh Hyun memulai kampanyenya dengan mencuatkan persoalan keseimbangan pembangunan ekonomi regional di masing-masing wilayah di Korea Selatan. Roh Moooh Hyun juga berkeinginan untuk memindahkan kursi pemerintahan ke daerah Chung Chong. Kedua masalah ini mengindikasikan, bahwa pemerintahan dibawah kekuasaan sipil Roh Moooh Hyun juga diharapkan bisa menjadi pemecahan masalah mengenai pengaturan pengelolaan teritori yang berdampak terhadap persoalan ekonomi dan politik melalui pengelolaan teritori baru sebagai bentuk upaya kebijakan desentralisasi.

Patronklien, Voters dan Pemilu

Dalam periode sipil, demokratisasi Korea Selatan di dominasi oleh 3 elite politik yang memiliki peranan besar dalam pembangunan, yaitu Kim Young Sam, Kim Dae Jung dan Kim Jong Pil. Masing-masing tokoh ini memiliki sumber-sumber potensial yang membentuk mereka menjadi patron politik bagi para pengikutnya. Ketiga aktor politik ini merupakan pejuang politik sipil yang namanya telah dikenal dalam 10 tahun periode pertama demokratisasi berlangsung di Korea Selatan.¹²

Ketiga tokoh ini menunjukkan motivasi yang sangat besar untuk pembangunan demokrasi di Korea Selatan, namun masing-masing dari mereka memiliki ambisi individual yang sangat besar untuk menduduki

¹² Yulius Purwadi Hermawan, *Klientisme dan Konsolidasi Demokrasi di Korea Selatan*, 2nd INAKOS Forum dalam Jurnal Internasional *Korean Studies in Indonesia: The State of The Arts*, Jakarta, 13 Oktober 2009, hal. 47.

jabatan sebagai seorang presiden. Lebih spesifik, Kim Young Sam dan Kim Dae Jung memiliki motivasi dan keinginan yang sama untuk menjadi seorang presiden di Korea Selatan yang akhirnya mengantarkan keduanya dalam hubungan rivalitas politik di pemilihan umum tahun 1992.

Ketiga tokoh Kim ini mempunyai ciri dan karakteristik personal yang menjadikan mereka diperhitungkan dalam kehidupan politik Korea Selatan. Kim Dae Jung memiliki asset penting sebagai seorang patron.¹³ Kim Dae Jung adalah seorang tokoh karismatik yang terhubung secara afeksi dengan masyarakat di wilayah Kwangju, sebuah wilayah yang mengalami konflik besar dalam uaya berjalannya demokratisasi di Korea. Kim Dae Jung juga memiliki nilai identifikasi terhadap wilayah Cholla yang tergambar dari kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya yang berpihak. Oleh karena itu Kim dianggap sebagai symbol pengharapan dan penyelamat. Kim Dae Jung juga dianggap sebagai seorang orator yang ulung dan memiliki sikap politik yang berani bahkan cenderung radikal. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa Kim Dae Jung memiliki basis massa di propinsi Honam atau lebih tepatnya di wilayah Cholla yang memiliki pembangunan ekonomi lebih rendah.

Sehubungan dengan itu, Kim Young Sam merupakan seorang kawan lama Kim Dae Jung. Keduanya merintis dan berjuang demi Korea untuk menuju nilai demokratis. Berbanding terbalik dengan Kim Dae Jung yang memiliki jalur politik oposisi radikal, maka Kim Young Sam merupakan tipe elite politik yang jauh lebih moderat. Sikapnya inilah yang menjadi daya tarik kekuatan politiknya untuk mendapatkan klien politik. Kim Young Sam memiliki nilai identifikasi terhadap propinsi Yeongnam atau lebih tepatnya di wilayah Pusan-Masan.

Dalam catatan kajian tentang regionalisme Korea ini, juga tercatat bahwa proporsi politik dan bisnis elite cenderung lebih tinggi di Propinsi Kyongsang sedangkan yang terendah ada di Cholla. Selama pemerintahan Syngman Rhee, populasi Korea selatan banyak bertempat tinggal di wilayah Propinsi Cholla (Honam) dan kurang dari 6 persen para elite berasal dari sana. Trend regional ini kembali dimunculkan ketika pemerintahan berada di bawah era Park Chung Hee tahun 1961-1979. Park yang berasal dari wilayah Tenggara Kyongsang (Yongnam), membawanya menjadi seorang lelaki yang memiliki posisi kekuasaan dan mengarahkan pembangunan ekonomi yang lebih condong dan terpusat hanya di Pusan-Seoul. Dimulai dari rejim Park Chung Hee hingga rejim Kim Young Sam, para elite tidak pernah melakukan banyak kompromi kebijakan dengan

¹³ Lee, M. *The Odyssey of Korean Democracy, Korean Politics, 1987-1990*, New York: Praeger Publisher, 1990, hal. 55-56.

Propinsi Cholla kecuali hanya 15 persen atau seperempat bagian dari keseluruhan kebijakan yang dilakukan.¹⁴

Berdasarkan sejarahnya, wilayah Cholla memang telah difokuskan dibidang agrikultur dan Kyongsang di bidang perindustrian tetapi memang sudah seharusnya pemimpin bisa berasal dari wilayah mana saja tetapi kita juga tidak bisa mengelakan kenyataan bahwa ekonomi dan politik rasional yang menekankan pembangunan terpusat di Seoul dan Pusan. Sebagaimana Seoul merupakan Ibukota negara Korea Selatan dan Pusan sebagai pelabuhan utama yang menaruh akses penting dalam jalur perdagangan dengan Jepang.¹⁵

Kebanyakan insiden dramatik juga menyulut semangat kedaerahan, seperti insiden Kwangju di tahun 1980 ketika militer melakukan penyerangan terhadap demonstran pergerakan di Ibukota Propinsi Cholla. Chun Doo Hwan seorang militer yang berasal dari wilayah Kyongsang mengambil alih barisan terdepan dalam DMZ (*Demilitarized zone*) di perbatasan Korea Utara, Ibukota Propinsi Cholla, Kwangju. Dalam insiden Kwangju tersebut tidak kurang dari 200 orang terbunuh. Disanalah dimunculkan opini bahwa Chun sengaja memilih wilayah Kwangju untuk menunjukkan kekuatannya dan saat itu pula aksinya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Amerika Serikat dan akibatnya wilayah Cholla mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang berjalan dengan lambat daripada di wilayah Kyongsang.¹⁶

Sebenarnya ada beberapa alasan teoritis yang digunakan di tahun 1987 yang sangat berguna untuk menganalisa hasil data pemilihan. *Pertama*, jika hasil Pemilu telah selesai sepenuhnya lalu di random, maka kita sama sekali tidak memiliki informasi mengenai apa saja yang lebih disukai para pemilih, sehingga pemilih dianggap hanya sebagai masyarakat parochial semata. Tapi, selama data pemilih tidak sepenuhnya dirandom, kita dapat mengetahui informasi tentang data jumlah semua pemilih sehingga partai *incumbent* dapat mengambil keuntungan untuk mengatur arah strategi mereka. *Kedua*, usaha untuk mewujudkan Pemilu yang adil bagi politisi pemerintah ataupun oposisi dalam putaran akhir Pemilihan yang nantinya akan membuktikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara serius dan terkonsentrasi.

Namun, kurangnya pemahaman substantif masyarakat Korea terhadap nilai demokrasi tampak menonjol ketika masyarakat Korea harus memilih dalam Pemilu. Masyarakat Korea masih melihat identifikasi personalitas sebagai alasan utama untuk menentukan pilihan mereka. Pola-pola tersebut khususnya terlihat di daerah-daerah tertentu dimana mereka

¹⁴ *Ibid.*, hal. 166

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bruce Cumings, *Korea Place in The Sun*, New York:W.W Norton;1997, hal. 377-390.

mendukung kandidat lokal ataupun putra daerah yang mencalonkan diri. Konsistensi pola regionalisme dalam Pemilu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bertahannya pola pengelompokan lama.¹⁷ Sikap kedaerahan hanya ditolak oleh para pemilih terdidik (subjektif), namun kenyataannya faktor ini tetap menjadi penentu penting dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan dari tahun 1960an hingga 2000an.

Y.P. Hermawan juga menegaskan dalam tulisannya tentang Klientisme Di Korea Selatan¹⁸ bahwa peran elite sangat besar dalam mempengaruhi pilihan politiknya ketika proses Pemilihan berlangsung. Para pendukung (*client*) akan tetap setia mengikuti arah politik dan kebijakan para elite (Baca: Putera Daerah) yang didukungnya. Dengan demikian, elite mampu memanfaatkan sifat kedaerahan itu untuk meningkatkan jumlah suara. Kondisi ini semakin memperdalam karakter regionalistik dalam voting di pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan pada periode tersebut. Berikut ini akan diuraikan gambaran yang menunjukkan kuatnya faktor kedaerahan dan personalitas elite pada periode 1987-1992. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan pengaruh korelasi antara mayoritas jumlah suara legislatif dari suatu partai terhadap kemenangan Kandidat Presiden dalam Pemilihan selanjutnya.

Regionalisme Dalam Pemilihan Presiden Tahun 1987 dan 1992 Serta Pemilihan Legislatif Tahun 1988 dan 1992

Partai	Pemimpin	Basis Regional	Pemilihan Presiden Jumlah Suara		Pemilihan Legislatif Jumlah Suara Dan Cursi	
			1987	1992	1988	1992
					Suara/ cursi	Suara/ cursi
DJP/DLP	Roh Tae Woo	Taegu	800.36 3 70,7%	690.245 59,6% ★	8 kursi 477.453	8 kursi 454.359
		Kyongsang Utara	1.108.0 35 66,39 %	991.424 64,73% ★	17 kursi 787.732	14 kursi 727.204

¹⁷ *Op.Cit*, Yulius Purwadi Hermawan.

¹⁸ *Ibid.*

RDP/DLP/NKP	Kim Young Sam	Busan	1.117.011 56%	1.551.473	14 kursi 973.902	15 kursi 902.811
		Kyongsang Selatan	987.042 51,3%	1.514.043 73,34%	9 kursi 648.483	16 kursi 856.400
NDRP/DLP/ULD	Kim Jong Pil	Taejon	-----	202.137 35,19%	-----	134.598
		Chungchong Selatan	402,491 45%	351.789 36,94%	13 kursi 652.613	1 kursi 399.352
PPD/DP/NCNP	Kim Dae Jung	Kwangju	449,554 94,41%	652.337 95,85%	5 kursi 417.467	6 kursi 394.872
		Cholla Utara	948,955 83,5%	991.483 89,13%	14 kursi 631.545	12 kursi 530.108
		Cholla Selatan	1.317.990 90,3%	1.170.398 92,16%	17 kursi 846.711	19 kursi 693.543

Keterangan : ★ = dukungan termanifestasi kepada Kim Young Sam (Partner Koalisi)

Sumber : YP. Hermanan, *Democratization In South Korea (1987-1996): The Persistence Of personalism-Centered Party Politics*, Thesis Master, Monash University, 1997.

Penutup

Pembahasan isu regional di Korea Selatan menjadi sebuah kajian politik yang sangat menarik untuk ditelusuri. Konteks sosio-historis dan pertumbuhan pembangunan teritorial menciptakan adanya unsur pembentuk konflik yang diakibatkan persoalan *gap* ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masing-masing wilayah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan politik dan pembangunan berdemokrasi di Korea Selatan.

Pertumbuhan politik Korea Selatan semakin meluas seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Persoalan *gap* ekonomi dapat membentuk budaya politik masyarakat yang parochial menjadi masyarakat yang subjektif bahkan cenderung partisipan. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya kantong-kantong politik yang tersebar di berbagai wilayah atau teritorial yang telah terbentuk berdasarkan kuatnya nilai-nilai patronklien yang di identifikasikan

berdasarkan wilayah dan dikorelasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Kajian isu regional menjadi menarik ketika tokoh elite memanfaatkan kondisi sejarah ini untuk mengendalikan masyarakat dalam pembentukan konsolidasi demokrasi khususnya di tahun 1990an. Melalui pemanfaatan nilai-nilai patronklien dan isu domestic yang berkembang, maka situasi politik telah membentuk kantong-kantong politik untuk memperjuangkan hak ekonomi dan politiknya melalui pemilihan umum. Para elite memanfaatkan kantong-kantong politik ini untuk meningkatkan jumlah hasil pemungutan suara khususnya ketika pemilihan umum maupun pemilihan Majelis Dewan Nasional di Korea Selatan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Bruce Cumings, *Korea Place in The Sun*, New York:W.W Norton;1997.
- Jeong-Ho Roh, *Crafting And Consolidating Constitutional Democracy In Korea* dalam buku David, C. Kang , *Korea's Democracy* Chapter 7.
- Kang Myung-goo, *Decentralization and the Restructuring of Regionalism in Korea: Conditions and Possibilities*, Korea Journal Summer 2003.
- Kim Yong Hak, "Eliteu chungwon-e isseoseoui jiyek gyeokcha"(엘리트 증원에 있어서의 지역 격차 /Regional Disparities in Elite Recruitment) :In *Hanguk-eui jiyek-i-wajiyek galdeung (한국의 지역이 와지역 갈등/Regionalism and Regional Conflicts in Korea)*, edited by Korean Sociological Association. Seoul: Seongwonsa. 1990.
- Lee, M. *The Odyssey of Korean Democracy, Korean Politics, 1987-1990*, New York: Praeger Publisher, 1990.
- Lee NamYoung, *The Voter's Choice: The 14th Presidential Election Of Korea*, Korean Journal, Vol.33, No.1,1993.
- Widyonugrahanto, *Demokratisasi Di Korea Selatan Tahun 1987-1998: Sentimen Kedaerahan Dalam Jalan Menuju Konsolidasi Demokrasi Korea Selatan*, Tesis Master Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1999.
- Yulius Purwadi Hermawan, *Democratization In South Korea (1987-1996): The Persistence Of personalism-Centered Party Politics*, Thesis Master, Monash University, 1997.
- Yulius Purwadi Hermawan, *Klientisme dan Konsolidasi Demokrasi di Korea Selatan*, 2nd INAKOS Forum dalam Jurnal Internasional *Korean Studies in Indonesia: The State of The Arts*, Jakarta, 13 Oktober 2009.

Strategi Kebudayaan Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia

Rusdiyanta, S.IP, M.Si¹

Abstrak

This article explained about the strategy of bureaucracy reform especially use cultural strategy. The pathology and negative image of bureaucracy in Indonesia push the importance of bureaucracy reform to service public new the. There are three things which need to be innovated namely the problem of institute, system and behavior of SDM of aparatur. Institute of bureaucracy consist of structure and culture. Theoretically, cultural orientation of organization differentiated to become four namely oriented clan or of human model relations, oriented hierarchically or is internal of model process, oriented adhocracy or of open model system, and oriented market or of rational model field goal. In bureaucracy reform, election of the model or orientation is not have the character of exclusive but depend on or area of sector to reform. Its implementation, bureaucracy reform in Indonesia still in structure level whereas culturally still patrimonial.

Keyword: the cultural strategy, the bureaucracy reform, the new public service

Latar Belakang

Berawal dari asumsi bahwa birokrasi merupakan institusi modern yang harus ada dalam dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu mendapatkan perhatian khusus baik secara teoritik maupun empiric. Birokrasi ideal yang dikemukakan Weber dan birokrasi netral yang diusung Hegel ternyata masih menjadi obsesi dalam implementasinya. Birokrasi telah menjelma menjadi *new ruling class*, potensial mengeksploitasi masyarakat, birokratisme, tidak netralitasnya birokrasi dalam politik, berperilaku sebagai "tuan" daripada "pelayan", membuat banyak kegiatan daripada memikirkan resiko, memiliki tradisi organisasi berskala besar (penyakit Parkinson), tidak punya komitmen menegakkan *human dignity*, serta menghambat pembangunan. Hal-hal itu kemudian dikenal dengan patologi birokrasi.

Citra birokrasi di Indonesia cenderung dipandang negative oleh masyarakat. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sepanjang Orde Baru seringkali mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, mahal, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Bahkan pandangan Karl D

¹ Dosen FISIP Universitas Budi Luhur

Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model *bureaucratic polity* di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia sebagai *bureaucratic capitalism*. Sedang Hans Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran structural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan Pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila perlu melalui paksaan. Berdasarkan penelitian Smith (dalam Utomo,2006) terdapat beberapa factor penyebab buruknya pelayanan birokrasi, antara lain: gaji yang rendah, sikap mental aparat pemerintah; kondisi ekonomi yang buruk; admnistrasi yang lemah, dan kurangnya pengawasan.² Factor-faktor tersebut dianggap sebagai factor yang menyebabkan lambannya reformasi birokrasi. Maka tidak heran jika ada tuntutan adanya perubahan dan pembenahan dalam birokrasi kita.

Dengan demikian birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya efisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Cap birokrasi Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana strategi budaya untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia menuju *the new public service*?

Birokrasi dan Reformasi Birokrasi

Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsure, yang terdiri dari pakar yang terlatih. Biasanya organisasi yang memiliki pemusatan kewibawaan yang menekankan unsure tata susila, pengetahuan teknis, dan tata cara impersonal. Birokrasi juga alat control yang memiliki hierarki yang berbeda dengan organisasi. Wujudnya berupa organisasi formal yang besar

² Warsito Utomo, *Administrasi Public Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006, hal.205

merupakan cirri masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai ketrerampilan dalam bidang kehidupan. Menurut Peter M. Blau (1956), birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Konsep birokrasi, pertama kali dikemukakan oleh Vincent de Gournay (1712-1759), John S. Mill, Gaetano Mosca, dan kemudian Max Weber yang menyatakan ciri birokrasi:³

1. Pembagian tugas menurut aturan dan tata cara formal
2. System peraturan, ditetapkan lebih dahulu untuk segala tugas yang dijalankan pegawai, untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugas dan menyesuaikan berbagai tugas.
3. Kewibawaan tersusun berdasarkan hierarki, seperti bawahan diawasi atasan, hubungan sub sordinat ditentukan aturan tertentu.
4. Tata cara impersonal, seorang pegawai melaksanakan tugasnya secara formal dan impersonal, artinya berdasarkan atauran tertentu tanpa diikuti emosi, kemarahan/kegairahan.
5. Penentuan pegawai didasarkan kelayakan seseorang, dan tidak boleh dihentikan sewenang-wenang, penghasilan dan kenaikan pangkat ditetapkan organisasi kinerjanya.

Birokrasi yang dikemukakan Max Weber adalah tipe ideal, karena itu dalam prakteknya memang tidak terwujud dalam masyarakat, karena organisasi formal yang terwujud dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat yang berlainan satu sama lain.

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti : (1) perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); (2) perubahan penguasa menjadi pelayan; (3) mendahulukan peranan daripada wewenang; (tidak berpikir hasil produksi, tetapi hasil akhir); (5) perubahan manajemen kinerja; (6) Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan professional, bebas korupsi, kolusi melalui:

- a. penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat;
- b. penataan ketatalaksanaan, mekanisme, system dan prosedur yang sederhana;
- c. penataan sumber daya manusia aparatur, agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas;

³ Sedarmiyati, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik)*. Refika Aditama, Bandung. 2009, hal.68

- d. akuntabilitas, kinerja berkualitas, efektif, efisien, dan kondusif;
- e. pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima, memuaskan pelanggan dan mewujudkan *Good Governance*.

Pentingnya Reformasi Birokrasi

Setidaknya ada lima (5) alasan (Islamy, 2001), mengapa kita perlu menyusun agenda kebijaksanaan reformasi administrasi public agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat:⁴

1. Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya *good governance* yaitu suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional. Rekrutment penyelenggara pemerintahan di semua jenjang harus benar-benar didasarkan pada persyaratan *merit system* dan menolak favoritisme dan nepotisme.
2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik. Masyarakat telah merasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi seringkali hak-haknya terpasung oleh aparat pelayanan.
3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai *sense of crisis* sehingga mereka benar - benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu *to do more withless* artinya dalam situasi yang penuh dengan krisis ini aparat pelayanan harus bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan serta kelangkaan sumber-sumber.
4. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional dengan mengedepankan terpenuhinya *public accountability and responsibility* yaitu dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber - sumber negara dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundangan yang berlaku (*the body of rules*) sebagai fondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Masyarakat, sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya (*public interest*), menuntut agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi mereka dan sejauh bisa memenuhinya.

Menurut Miftah Thoha (2008), ada beberapa factor yang dapat mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah. Factor-faktor tersebut adalah:

1. Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan
2. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional
3. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan global

⁴ M. Irfan Islamy, "Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara", *Jurnal Admistrasi Negara* Vol. II, No, 1, September 2001.

4. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigm manajemen pemerintahan yang menuju ke otonomi dan desentralisasi daerah.

Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan aparatur Negara dan pemerintah sangat tergantung kepada kebutuhan pimpinan nasional. Selain itu dukungan kebijakan politik yang strategis dan dijadikan suatu program nasional dengan dukungan seluruh komponen masyarakat akan mendorong perubahan. Seperti dilakukan Presiden AS Bill Clinton ketika melakukan *Reinventing Government* didorong oleh kebutuhan pemerintah melakukan pembaharuan dan perbaikan birokrasi pemerintahnya. Begitu pula dengan PM Inggris Margareth Thatcher.

Faktor pembaharuan lingkungan strategis nasional sangat penting karena akan menimbulkan rencana dan tindakan pembaharuan aparatur Negara. Krisis ekonomi dan perubahan system politik tahun 1998 ternyata menjadi pendorong kebijakan pembaharuan aparatur yang efektif dan efisien serta demokratis.

Factor perubahan lingkungan global mendorong perubahan aparatur pemerintah tidak berdiri sendiri, tetapi interdependen. Perubahan global antara lain system desentralisasi dan demokrasi, keinginan pelaksanaan *good governance*, perkembangan teknologi yang menuntut penerapan *e-government*.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berkaitan erat dengan factor lingkungan global. Karakteristik *good governance* dari UNDP meliputi:⁵ *participatory, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang sinerjik dan setara. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai

⁵ Jeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta. 2008, hal.38-39

peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjamahnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Menurut Sofyan Effendi (2005), yang diperlukan dalam reformasi sector public adalah, *pertama*, reformasi sector public harus lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan profesionalisme dan netralitas birokrasi public guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrasi dan politisi. Proses politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam kehidupan politik perlu dikurangi agar birokrasi publik yang profesional dapat tumbuh lebih subur. *Kedua*, intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan dan menyebabkan inefisiensi besar. Karena itu system pemerintahan Praetorian yang sudah berjalan sejak awal orde baru perlu ditinjau kembali, dan dinilai keampuhannya secara lebih kritis sebagai penyelenggara pembangunan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu sector public, terutama birokrasi public, harus mengalami pergeseran nilai, dari otoritarianisme birokratis ke otonomi demokratis, atau perubahan dari *Negara pejabat* menjadi *Negara pelayan*.

Menurut Denhardt dan Denhardt (2003), *the New Public Service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warganegara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis. Jatidiri warganegara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warganegara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan

mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif ini menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Prinsip-prinsip *the New Public Service* adalah sebagai berikut:⁶

1. Melayani warga masyarakat bukan peggan,
2. Mengutamakan kepentingan public,
3. Lebih menghargai kewarnanegaraan daripada kewirausahaan,
4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis,
5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah
6. Melayani daripada mengendalikan,
7. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata.

Strategi Kebudayaan dan Reformasi Birokrasi

Menurut Miftah Thoha (2008), ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian untuk dilakukan reformasi birokrasi. Hal utama yang perlu diperbaharui adalah (1) masalah kelembagaan. Jika kelembagaan diperbaharui, maka diperlukan (2) system yang tepat, kemudian pembaharuan (3) perilaku SDM dari aparatur bisa dilakukan.

Menurut Grindle (1997), "Capacity building" merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada dimensi (1) pengembangan SDM, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan.⁷ Sementara menurut Yeremias T. Keban (2008) ada tiga aspek strategis dari system birokrasi yang harus dibenahi, yakni pembenahan struktur, menerapkan strategi yang tepat, dan pembenahan budaya organisasi.⁸

Kelembagaan birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung *kultur* dan *struktur*. Kultur mengandung perpaduan tata nilai (*values*), kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku sumber daya manusianya. Kultur ini akan membedakan suatu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya. Sedangkan struktur mengetengahkan suatu susunan dari suatu tatanan atau kerangka yang dipergunakan sebagai tata aliran proses bagaimana kultur itu dapat diterapkan dan diwujudkan dalam suatu pemerintahan. Kultur yang biasa

⁶ Janet V. Denhardt, and Robert B. Denhardt.. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe, New York. 200, hal.42-43

⁷ Keban, *Enam Dimensi Strategis...* hal, 201

⁸ Ibid, , hal.253-255

muncul dalam pemerintahan adalah kultur yang menjamin asal bapak senang (abs) atau kultur partisipasi rakyat yang menjamin kebiasaan demokrasi dan responsive. Kultur untuk dilayani atau kultur melayani, mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan public, dan sebagainya. Jika kultur sudah ditetapkan, maka struktur tinggal mewadahi dengan kerangka yang sesuai.

Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan mati hidup sebuah organisasi. Karena itulah perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang amat besar untuk mengubah budaya perusahaan (*corporate culture*) agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Sebaliknya, birokrasi pemerintahan negara kurang punya perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alasan. *Pertama*, secara konseptual ketika Max Weber, sarjana sosiologi Jerman merumuskan konsep birokrasi, organisasi birokratis diasumsikan sebagai bentuk organisasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi *redundant*. Dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.

Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi: keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi adalah tradisi yang sangat sukar diubah. Dalam bukunya "Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi", Djokosantoso Mulyono mendefinisikan budaya organisasi sebagai "sistim nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, yang dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda suatu organisasi dengan organisasi lainnya, *a sense of identity*, sebagai komitmen yang harus disepakati, dan mempertinggi stabilitas anggotanya. Budaya organisasi, menurut Marcoulides & Heck, terbukti menentukan kinerja birokrasi karena berpengaruh pada perilaku birokrat.⁹ Secara teoritis, orientasi budaya organisasi dibedakan menjadi empat yakni *clan oriented* atau *human relations model*, *hierarchically oriented* atau *internal process model*, *adhocracy oriented* atau *open system model*, dan *market oriented* atau *rational goal model*.

Budaya yang berorientasi pada *clan* atau *human relations* yang mengutamakan hubungan personal, keakraban dan keperdulian, kesetiaan dan kohesi serta semangat kebersamaan dan pemerataan sangat baik untuk membentuk kepercayaan, keterbukaan dan partisipasi.

⁹ Keban, hal.255

Tetapi sangat potensial bagi tumbuhnya budaya kolusi, korupsi dan nepotisme. Budaya organisasi yang berorientasi hierarki yang mengutamakan hubungan hierarki dan formal dalam rangka stabilitas dan efisiensi bagus, tetapi menimbulkan kekakuan, *red-tape* dan inefisiensi kalau berlebihan. Budaya organisasi yang berorientasi pasar atau *rational-goal model* yang lebih mengandalkan pencapaian tujuan atau hasil, menekankan kemampuan mengerjakan tugas pekerjaan, kompetisi dan prestasi, serta insentif berdasarkan capaian. Budaya organisasi yang berorientasi *adhocracy* atau *open system* lebih menekankan aspek kewirausahaan seperti mengambil resiko, mengutamakan inovasi, inisiatif dan insentif berdasarkan kinerja.

Setiap budaya organisasi tersebut penting untuk bidang atau sector tertentu. Untuk mengejar ketertinggalan sector ekonomi diperlukan budaya organisasi yang berorientasi *adhocracy* dan *market*. Di sini dibutuhkan birokrat yang memiliki budaya *kewirausahaan*, inovatif dan selalu berupaya mewujudkan tujuan program. Dalam bidang politik dan hukum, dibutuhkan birokrat yang mempunyai budaya organisasi yang berorientasi *hierarki* dimana perlu sikap tegas dan impersonalitas. Berkaitan dengan bidang social (pendidikan, kesehatan) butuh birokrat model *human relations*, yang memiliki kepedulian dan perhatian pada masyarakat.

Menurut Peter Bijur (2001) seperti dikutip Sofian Effendi (2005) menganggap bahwa syarat yang paling utama untuk menjamin keberhasilan upaya perubahan budaya organisasi adalah kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) baik dalam kemampuan memimpin maupun dalam ketajaman visinya. Dalam pandangan Efendi, secara nasional ini yang menjadi kendala utama kita. Selanjutnya, ada 5 faktor yang penting untuk mensukseskan perubahan budaya organisasi yaitu:

- a. Nilai-nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan;
- b. Motivasi yang mampu memobilisasi dukungan untuk perubahan;
- c. Ide dan Strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide-ide dan strategi untuk mendorong perubahan;
- d. Tujuan yang jelas serta selalu dikomunikasikan kepada para anggota organisasi;
- e. Etik kinerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerasi dan penghargaan yang tepat.

System penataan birokrasi pemerintah sangat tergantung pada visi dan keinginan politik yang ada. Visi dan keinginan itu diharapkan dapat menunjang tercapainya system yang menciptakan aparatur yang menghargai ditegakkannya prinsip demokrasi dalam pemerintahan dan hokum, professional, kompeten dan akuntabel. Merit system lebih dekat dengan cita-cita, jangan memilih system yang toleran terhadap

ketidakjujuran, korupsi dan tidak menghargai hukum.

Berkaitan dengan sumber daya aparatur pemerintah, persoalan yang muncul adalah profesionalitas aparatur dan kurangnya kesejahteraan. Di Negara-negara maju, nilai etika diarahkan pada integritas profesional para aparatnya. Strategi pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Jika aparatur tidak memenuhi profesionalitas, maka strategi *out-sourcing* dapat dilakukan. Rekrutmen dan promosi jabatan harus objektif berdasarkan standar yang jelas, tidak beraroma kolusi, korupsi dan nepotisme serta beraroma politis. Sementara berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, maka remunerasi adalah salah satu strategi. Selain itu dapat juga diterapkan *reward* bagi yang berprestasi dan *punishment* bagi yang melanggar akan mendorong motivasi kerja pegawai. Perlu strategi pemutusan hubungan kerja bagi aparat yang tidak profesional dan disiplin atau strategi pemangkasan (*retrenchment*) dalam anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai etika. Ketika masyarakat luas kecewa atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah mereka lalu menggugat nilai standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Kegiatan pemerintahan memang tidak pernah lepas dari pilihan-pilihan moral seperti itu. Seperti dikatakan oleh Stillman II (1998) *leading thinkers in public administration recognized that the critical issues of government ultimately involved moral choices*". Hal ini disebabkan karena isu-isu di bidang pemerintahan itu sangat banyak dan beragam yang seringkali mengandung nilai nilai moral/etis yang saling bertentangan satu sama lain (*conflicting ethical values*)

Etzioni (dalam Islamy, 2001) menyatakan perlunya melihat *administrative accountability* sebagai sarana untuk menarik perhatian kita terhadap *real politics of administrative life* dan ia menekankan perlunya dua macam pendekatan terhadap akuntabilitas yaitu pertama: pendekatan moral yang melihat akuntabilitas sebagai seruan dan pendidikan bagi orang-orang agar memiliki kesadaran akan tanggung jawab moralnya dan kedua: pendekatan hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada mekanisme *check and balances* dan persyaratan - persyaratan pelaporan formal baik di dalam maupun diluar organisasi administrasi.

Sebagai suatu kebijaksanaan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan (1) Akuntabilitas Administrasi Organisasi. Untuk itu diperlukan adanya hubungan hierarkhi yang tegas di antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. Hubungan-hubungan hierarkhi ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam bentuk aturan - aturan organisasi yang telah disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk

jaringan hubungan informal. Prioritas pertanggung jawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawah dan pengawasan dilakukan secara efektif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan. Pelanggaran terhadap perintah akan diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan sampai ke pemecatan. (2) Akuntabilitas Legal. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administrasi dari aparat pemerintah di badan legislatif dan atau di depan mahkamah. Dalam hal pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun ketidak mampuannya memenuhi keinginan badan legislatif maka pertanggungjawaban aparat atas tindakan - tindakan dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang -undang (*judicial review*) (3) Akuntabilitas Politik. Para administrator yang terikat dengan kewajiban menjalankan tugas-tugasnya harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan dan pelaksanaan perintah -perintahnya. Para pejabat politik itu juga harus menerima tanggung jawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. (4) Akuntabilitas Profesional. Sehubungan dengan semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat profesional (seperti dokter, insinyur, pengacara, ekonomi, akuntan, pekerja sosial dan sebagainya) mengharapkan tugas - tugasnya dalam menetapkan kepentingan publik. Dan walaupun mereka tidak dapat menjalankan tugasnya mereka mengharapkan memperoleh masukan untuk perbaikan. Mereka harus dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. (5) Akuntabilitas Moral. Telah banyak diterima bahwa pemerintah memang selayaknya bertanggung jawab secara moral atas tindakan-tindakannya . Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya diletakkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku social yang telah mapan. Oleh karena itu, wajar saja kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu berlandaskan nilai - nilai moral yang telah diterima tadi. Untuk menghindari perilaku koruptif, masyarakat menuntut para aparat pemerintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka.

Perubahan-perubahan birokrasi selama reformasi ini, menurut Budi Winarno (2007) hanya mengubah strukturnya saja sementara

kulturnya belum berubah. Bahkan orang-orang lama yang sudah terkontaminasi masih banyak bercokol dan memainkan peranan penting dalam jabatan public, politik dan birokrasi yang strategis. Meskipun struktur politik mengalami perubahan menjadi lebih demokratis, tetapi budaya politik masih belum berubah. Budaya politik era reformasi tetap bercorak patrimonial, berorientasi kekuasaan dan bersifat paternalistic.¹⁰ Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari system nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, pegawai negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan pegawai negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, *ambtenaar*. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdikan ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia memang sudah mulai diupayakan namun dalam implementasinya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kelembagaan birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung *kultur* dan *struktur*. Factor kultur organisasi merupakan factor yang sangat penting, terutama sikap keteladanan dari para pejabat public, perilaku minta dilayani daripada melayani, sikap mementingkan public daripada diri sendiri dan kelompok, parkinsonisasi birokrasi, dan sebagainya masih sering terjadi. Reformasi birokrasi masih sebatas pada strukturnya, sementara kulturnya masih tetap seperti masa Orde Baru. Oleh karena itu, strategi kebudayaan organisasi diimplementasikan dengan mengubah perilaku birokrat dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *new public service*.

¹⁰ Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hal.159

Daftar Pustaka:

- Denhardt, Janet V. and Robert b. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe, New York
- Effendi, Sofian. "Membangun Budaya Birokrasi untuk *Good Governance*", *Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN*, 22 September 2005
- Islamy, Muh. Irfan, "Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara", *Jurnal Adminstrasi Negara* Vol. II, No, 1, September 2001
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Romli, Lili. "Masalah Reformasi Birokrasi", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik)*. Refika Aditama, Bandung.
- Thoha, Miftah. "Tinjauan Implementasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Politika*, Vol. 4 No.2 tahun 2008
- _____, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenada Group, Jakarta.
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Public Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

❑ **Maksud dan Tujuan**

Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain.

❑ **Ruang Lingkup**

Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.

❑ **Bahasa**

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.

❑ **Bentuk Naskah**

Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3cm dari Kanan dan kiri kertas, atas dan bawah kertas berjarak 2,5cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom.

❑ **Isi Naskah**

Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instansi: Abstrak (100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan (berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian (alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada).

❑ **Judul Karangan dan Nama Pengarang**

Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan.

❑ **Tabel dan Gambar**

Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,... dst).

❑ **Daftar Pustaka**

Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.

❑ **Alamat Redaksi**

Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petungkang Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252